

**Amir Sjarifoeddin:
Nasionalis yang Tersisih**

Yema Siska Purba

Amir Sjarifoeddin: Nasionalis yang Tersisih

**Amir Sjarifoeddin:
Nasionalis yang Tersisih**

Hak cipta © Penerbit PolGov, 2013
All rights reserved

Cetakan I, September 2013
... hlm. 14x21 cm
ISBN

Penulis : Yema Siska Purba
Editor: Dewi Kharisma Michellia
Desain Cover: Ali El Minant
Tata Letak Isi: Mapa

Diterbitkan oleh Penerbit PolGov
Penerbit PolGov khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung *Research Centre of Politics and Government (PolGov)*.

Research Centre of Politics and Government (PolGov) adalah lembaga riset dan publikasi dari Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM. Saat ini *PolGov* berfokus ke dalam empat tema kunci sesuai dengan kurikulum JPP, yaitu: 1) politik lokal dan otonomi daerah, 2) partai politik, pemilu, dan parlemen, 3) HAM dan demokrasi, 4) reformasi tata kelola pemerintahan dan pengembangan sistem integritas.

Pusat Antar Universitas (PAU) UGM
Jl. Teknika Utara, Berek, Yogyakarta, 55281
<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id>
Telp./Fax: (0274) 5522125
Surel: polgov.ugm@gmail.com

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT)
Amir Sjarifoeddin: Nasionalis yang Tersisih
Purba, Yema Siska; Editor: Dewi Kharisma Michellia
Cet.1 – Yogyakarta, PolGov, September 2013;
halaman xviii + 164 ; 14 x 21 cm
ISBN : 978-602-7636-25-5

I. Sosial/Sejarah/Politik
II. Yema Siska Purba

I. Judul

*Untuk S. Saragih, J. Purba, Novita, Roma,
Anzelina, Wendy, Bella;
dan sahabatku, Yosef.*

KATA PENGANTAR

Sejarah adalah bagian penting dari perjalanan suatu bangsa, kelompok, bahkan individu. Darinya, ada pembelajaran penting yang dapat dipetik untuk menjadi referensi dalam menapaki masa yang sekarang dan yang akan datang. Begitu pentingnya sejarah dalam dinamika kehidupan sosial politik sehingga penulisan naskah sejarah perkembangan bangsa beserta aktor yang terlibat didalamnya menjadi proyek penting bagi penguasa.

Maka, sejarah (*history*)—seringkali disebut sebagai *His Story*—barangkali memang mewakili apa yang terjadi di masa lalu di suatu tempat, tetapi juga dipengaruhi oleh yang berkuasa. Demikian pula dengan apa yang terjadi di Indonesia. Penyajian teks sejarah Indonesia selama bertahun-tahun bergantung pada cita rasa penguasa. Manis, asin, pahitnya sejarah menjadi alat penting bagi rezim yang berkuasa untuk memperlihatkan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang memberikan sumbangsih besar bagi negara maupun siapa pengkhianat yang patut dihujat.

Ilustrasi menarik mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam penarasian sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 di

Yogyakarta¹. Ada tiga film yang pernah diproduksi untuk mengisahkan peristiwa penting ini: Enam Djam di Jogja, Janur Kuning, dan Serangan Fajar. Tiga film berbeda satu sama lain, dari sudut pandang siapa aktor yang memegang peran penting dalam peristiwa ini. Dari tulisan Budi Irawanto, tampak dengan jelas bagaimana hegemoni militer coba ditonjolkan dalam film Enam Djam di Djogja sementara dalam film yang lain, “pahlawan” dari Serangan Umum 1 Maret tersebut adalah non militer (masyarakat).

Ilustrasi diatas mempertegas argumen bahwa sejarah sejatinya mempunyai peran signifikan dalam pengembangan karakter suatu bangsa, tetapi pada saat yang sama, rezim yang berkuasa dengan amat sangat mudah menggunakan sejarah sebagai alat untuk mempertegas dan melanggengkan kekuasaannya. Dengan sendirinya, akan ada sejarah *mainstream* yang didefinisikan penguasa dan ada sejarah pinggiran yang menjadi wacana penanding dari naskah yang ada dalam arus utama.

Buku yang diangkat dari skripsi Yema Siska Purba ini dapat disebut sebagai bagian dari sejarah pinggiran tersebut. Ia mencoba menguak tentang sosok yang cukup kontroversial dalam sejarah Indonesia, Amir Sjarifoeddin. Tulisan ini mencoba mengupas sosok, yang dalam bahasa Gerry van Klinken disebut sebagai “Penggerak Bangsa yang

1 Peristiwa ini juga dikenal sebagai Serangan Fajar Momen penting dalam sejarah Indonesia dimana peristiwa ini membuka mata kalangan internasional bahwa Indonesia masih ada. Pengakuan dunia akan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda pasca 1945 salah satunya dimulai dari peristiwa ini. Untuk mengenangnya, didirikan Monumen Serangan Oemoem 1 Maret di titik nol kilometer Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Monumen Jogja Kembali di wilayah Yogyakarta bagian Utara.

Terlupa”.² Sosok yang sejatinya mempunyai peran penting dalam pergerakan nasional di era sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, tetapi karena pilihan politiknya, dipinggirkan oleh penguasa pada waktu itu

Saya kira tidak banyak yang mengetahui apalagi memahami sosok Amir, terutama jika dibandingkan dengan sosok Sukarno dan Hatta. Bahkan, sejarah “*mainstream*” Indonesia justru mencatat Amir sebagai komunis yang terlibat dalam Peristiwa Madiun 1948 di mana hal ini membuatnya dieksekusi regu tembak pemerintah, bersama dengan puluhan orang yang dituduh terlibat dalam peristiwa tersebut.

Jika pun ada yang tahu, mungkin yang akan diingat adalah “kegagalannya” saat selam adua kali ia menjabat sebagai Perdana Menteri RI di Era Demokrasi Parlementer. Setidaknya, itu yang muncul dalam memori saya saat pertama membaca nama Amir Sjarifoeddin di naskah skripsi Yema. Ingatan ini terbentuk dari naskah sejarah dalam pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) saat saya duduk di bangku SMP, perspektif yang tentu cenderung memojokkan Amir.

Sangat sedikit yang pernah ditulis tentang Amir. Satu diantaranya adalah karya Gerry van Klinken, *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen*, yang diterbitkan di Indonesia pertama kali di tahun 2010.³ Dalam buku ini, digambarkan sosok seorang Amir yang mempunyai

2 Baca: Van Klinken, Gerry (2010), *Penggerak Bangsa yang Terlupa, Nasionalisme Minoritas Kristen*, LkiS, Yogyakarta

3 *Ibid.*, Bab 6 Amir Sjarifoeddin dan Kharisma Nasionalis dalam 5 *Penggerak Bangsa yang Terlupa, Nasionalisme Minoritas Kristen*, LkiS, Yogyakarta.

kecakapan pidato dan kepiawaian berbahasa asing yang mirip dengan Sukarno. Dia juga mempunyai kepandaian menulis dalam berbagai tema: politik, agama, dan bahkan ekonomi.⁴

Sisi menarik kedua adalah pada pilihan topik yang diangkat Yema untuk menjelaskan Amir Sjarifoeddin, yaitu nasionalisme. Betapa tidak, di tengah arus desentralisasi, yang di banyak daerah memperkuat ide putra daerah dan menguatnya sentimen etnis, ide nasionalisme seolah-olah tenggelam. Ia hanya muncul pada saat-saat tertentu, misalnya di bulan Agustus, dimana ada perayaan kemerdekaan. Maka, menjadi semakin menarik ketika ide nasionalisme ini dikaitkan dengan sosok Amir, yang notabene merupakan tokoh dari luar Jawa dan beragama Kristen. Dua hal inilah yang menjadikan pembahasan nasionalisme ala Amir menjadi menarik, karena kita dapat mempelajari bagaimana nasionalisme dimaknai oleh sosok yang mempunyai latar belakang berbeda dengan sosok-sosok yang dikenal sebagai pendiri bangsa, yang mayoritas dari Jawa dan tidak Kristen (baca: Islam atau mungkin abangan).

Ada beberapa hal yang perlu diperjelas dari ide nasionalisme ini. Pertama, ia bukanlah sekadar ide yang dapat dengan mudah diterjemahkan menjadi slogan “Cintailah Produk-produk Indonesia” (sepaimana yang sering kita lihat di iklan di televisi terkait merek barang cukup terkenal). Secara praktis, slogan tersebut sedikit banyak merefleksikan apa yang ada dalam ide nasionalisme. Namun secara teoretis, ada banyak variasi dari gagasan

⁴ *Ibid.*

nasionalisme. Kedua, lebih dari sekadar slogan praktis seperti yang disebut sebelumnya, nasionalisme akan punya kaitan erat dengan bagaimana kita mendefinisikan istilah “bangsa”, dan kemudian mengaitkannya dengan istilah “negara”.

Nasionalisme, dalam praktik di banyak tempat, menjadi gagasan yang mencetuskan peperangan dan revolusi. Dari gagasan nasionalisme inilah, suatu negara (atau kerajaan) dapat terbentuk dan juga dapat terbelah.⁵ Gagasan ini menjelaskan suatu fenomena politik yang kompleks.

Dalam buku *Politics* karya Andrew Heywood dijelaskan bahwa ide nasionalisme dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu secara kultural dan secara politis. Dalam nasionalisme kultural, suatu bangsa direproduksi dari gagasan perbedaan antar peradaban yang didasarkan pada sistem kepercayaan bangsa tersebut yang unik, historis, dan bersifat organis. Penekanan nasionalisme tipe ini adalah pada loyalitas dan ikatan etnis, sehingga negara diletakkan diluar bangsa.⁶

Sementara itu, nasionalisme politik memahami bahwa bangsa merupakan komunitas politik yang lebih terikat melalui apa yang disebut sebagai ikatan kewargaan atau persekutuan politik dalam suatu negara, terlepas dari ikatan etnis, kultur, atau agama.⁷ Dalam hal ini, negara (modern) merupakan bentuk konkret dari nasionalisme tipe ini.

Dua pendekatan tersebut mewakili dinamika pemikiran

5 Heywood, Andrew (2002), *Chapter 6 Nations and Nationalism* dalam *Politics* (2nd Edition), Palgrave, New York. Halaman 105.

6 *Ibid.* Halaman 107 – 108.

7 *Ibid.* Halaman 109.

Amir terkait ide nasionalisme untuk Indonesia. Sebagai bagian dari minoritas, ia memperjuangkan Indonesia sebagai rumah yang nyaman bagi semua golongan, suku, maupun agama. Ia sedikit khawatir dengan para tokoh nasionalis lain yang dipandang kurang memperhatikan minoritas. Di sisi lain, pemikiran Amir seringkali ditafsirkan berbeda oleh tokoh lain, dimana ia dianggap sedang memperjuangkan nasionalisme Kristen.⁸

Secara jauh lebih detail dan rapi, melalui buku ini Yemaberusaha menghadirkan sosok Amir. Ia menggali kembali masalah-masalah yang dihadapi Amir dan mempertanyakan hal-hal krusial menyangkut pemerintahan Indonesia sebelum era kemerdekaan dan cukup luas membahas keterlibatan pihak Amerika pada pilihan-pilihan politik yang kemudian diambil pemerintah Indonesia di era tersebut. Diperlihatkan bahwa ada kaitan antara gencatan senjata Amerika-Uni Soviet dengan pilihan pemerintah Indonesia membasmi gerakan kiri—yang berdampak pada tidak tersalurkannya impian Amir dan kamerad ‘kiri’-nya.

Impian Amir dicoba diangkat kembali oleh Yema dalam naskah buku ini. Dia membingkainya sebagai wujud semangat nasionalisme dalam segala masalah di berbagai bidang, di antaranya di bidang bahasa, etnis, peranan negara dalam melawan *nekolim* (neokolonialisme dan imperialisme), upaya mengumpulkan massa, kebebasan pers, pertahanan nasional dan diplomasi internasional, urgensi peran buruh dan petani dalam revolusi, serta perannya yang besar sehingga mampu menghegemoni pembentukan partai dan gerakan-gerakan.

8 Van Klinken, *op.cit.* Halaman 210 – 221.

Kehidupan Amir juga dipaparkan dengan detail oleh penulis buku ini. Latar belakang keluarga, kultur dan pendidikan, yang pada akhirnya membangun karakter dan mempertegas pemikiran Amir dalam berbagai sisi. Dari penjelasan inilah, kita dapat memahami konteks yang pada akhirnya menjadikan Amir melabuhkan pilihan politiknya pada PKI. Pilihan politik yang kemudian mengantarkannya ke hadapan regu tembak di tahun 1948.

Penulis berhasil menghadirkan sosok Amir secara lebih berimbang. Ketekunannya mencari berbagai literatur sejarah untuk dapat menghadirkan sosok kontroversial ini sangat patut diapresiasi. Jikalau ada kekurangan dalam buku ini, mungkin hanya karena gaya penulisan yang sedikit kaku. Namun, mengingat versi asli dari buku ini adalah skripsi ilmiah, “kekakuan” ini dapat dimaklumi.

Semoga, upaya Yema untuk menghadirkan tokoh yang terpinggirkan ini dapat sedikit berkontribusi dalam upaya meluruskan sejarah, yang acap kali dibelokkan karena perbedaan pilihan politik antara tokoh dengan penguasa. Selamat membaca!

September 2013

Nur Azizah, S.IP., M.Sc.

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Foto	
Daftar Singkatan	

Infografis Amir: Silsilah Keluarga

I Riwayat Hidup

Latar Belakang: Keluarga, Pendidikan, dan Pilihan Hidup.....	
Pilihan-pilihan Kontroversial Sang Bangsawan	
Dinamika Profesi: Terdesak Kebutuhan Hidup.....	
Religiositas dalam Gerakan Perjuangan	
Pembentukan Karakter Amir.....	

Infografis Amir: Pendidikan, Profesi

II Karier Politik

Kembalinya Amir dari Belanda.....	
Konteks Sosial Budaya Politik di Masa Kepulangan Amir	
Akhir Pemberontakan PKI I	
Persentuhan Awal dengan PKI.....	
Menuju Panggung Politik.....	
Pembentukan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).....	
Mempertahankan Eksistensi Melawan Jepang	
Lembaran Baru bersama Partai Sosialis	
Perjalanan Karier Pemerintahan	

Peran sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Pertahanan	
Memimpin dalam Sistem Parlemenarian	
Akhir Destinasi Politik bersama PKI-Musso	
Terjebak di Persimpangan Peristiwa Madiun 1948.....	
Dikenang sebagai Seorang Komunis	

III Benang Pemikiran dan Wujud Nasionalisme

Benang-benang Pemikiran di antara *Isme*

Perwujudan Nasionalisme

Identitas Individu dalam Kacamata Amir

Identitas Keagamaan

Sikap terhadap Keragaman Etnik

Negara dan Peranannya dalam Perspektif Amir

Bahasa Nasional sebagai Identitas Perlawanan

Negara

Negara Melawan Imperialisme dan Kolonialisme

Strategi Perjuangan: Hegemoni melalui Partai Revolusioner

Collecting Mass melalui Kebebasan Pers

Gagasan Internasional dalam Membangun Negara

Pertahanan Nasional dan Diplomasi Internasional

dalam Upaya Mencapai Kemerdekaan

Urgensi Peran Buruh dan Petani dalam Revolusi

**IV Pemikiran Nasionalisme dari Sosok
yang Terlupakan**

Pengantar

Amir Sjarifoeddin di Mata Mereka

Abu Hanifah.....

Mohammad Hatta

Sutan Sjahrir

Ali Sastroamidjojo

Soemarsono

Ben Anderson.....

Rosihan Anwar

Adrian Vickers

Daftar Pustaka.....

Indeks

Tentang Penulis

Daftar Singkatan

BO	Boedi Oetomo
BPAP	Barisan Pemuda Asia Raya
<i>CC PKI</i>	<i>Central Comitee PKI</i>
CSI	Central Sjarikat Islam
<i>CSV op Java</i>	<i>Christen Studenten Vereeniging op Java</i>
ELS	Europese Lagere School
FDR	Front Demokrasi Rakyat
GAPI	Gabungan Politik Indonesia
Gerindo	Gerakan Rakyat Indonesia
GMKI	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
GPII	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
ISDV	Indischee Sociaal-Democratische Vereeniging
KNIP	Komite Nasional Indonesia Pusat
KTN	Komisi Tiga Negara
<i>NEI</i>	<i>Netherlands East Indies</i>
NICA	<i>Netherlands-Indies Civil Administration</i>
NIZB	<i>Nederlands-Indische Zendings Bond</i>
Paras	Partai Rakyat Sosialis
Parsi	Partai Sosialis Indonesia
Partindo	Partai Indonesia
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pesindo	Pemuda Sosialis Indonesia
PETA	Pembela Tanah Air
PKI	Partai Komunis Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia

PPPI	<i>Perhimpoean Peladjar-Peladjar Indonesia</i>
PSII	Partai Sjarikat Islam Indonesia
PSII	Partai Syarikat Islam Indonesia
SDI	Sarekat Dagang Islam
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SOBSI	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
TNI	Tentara Nasional Indonesia
VSTP	<i>Vereeniging voor Spoor-en Tramwegpersonel</i>



“Sebagai seorang Marxis, saya ingin suatu masyarakat egaliter dengan distribusi yang adil. Namun, semua ahli teori revolusi harus menerima bahwa aspirasi itu harus tercapai secara bertahap. Mao Tse Tung pernah berkata, perjuangan kita sekarang harus ditunjukkan pada fase pertama, sedangkan fase kedua ditunda untuk sementara waktu.”

(Pidato Amir Sjarifoeddin, 1946)

“Kekejaman Belanda yang sudah berulang-ulang terjadi tidak pantas kita diamkan saja. Dewan Pertahanan siap menghadapi segala kemungkinan. Kita telah mencoba berjuang secara damai, tetapi tidak berhasil, apa boleh buat, kita pun bersedia menghadapi segala kemungkinan.”

(Konferensi Partai Sosialis, Cirebon, 1 April 1946)

“Tentara penjajahan Belanda dan Jepang karena berjiwa kolonial gampang bersifat fasistis, sewenang-wenang dan kejam terhadap rakyat. Ini dipermudah karena untuk menjadi opsir mesti dipenuhi syarat-syarat ijazah yang hanya dapat dipenuhi orang mampu, artinya orang yang biasanya berkepentingan banyak dengan si penjajah alias orang-orang yang tidak bergaul dengan rakyat biasa. Keadaan di zaman penjajahan itu, pasti membawa bekas di zaman Republik. Oleh karena itu, tentara perlu didemokratisasikan.”

(Mosi soal tentara, 1946)



“Saya minta dengan sangat kepada dunia dan kepada sahabat-sahabat kita di Australia, hendaknya memperkuat bantuannya untuk menghentikan pertumpahan darah selanjutnya dan memandang perjuangan kita dengan kacamata keadilan, kemerdekaan, dan kemanusiaan.”

(Pidato kepada Menteri Luar Negeri Australia, Dr. H. V. Evatt, 1947)

“Kita sedang berperang. Kita telah mengeluarkan perintah-perintah untuk tidak bekerjasama dengan musuh. Barangsiapa menentang kita maka dia adalah musuh. Musuh adalah musuh, dan kita tidak mengenal tafsiran yang lain. Kita punya hak untuk menjaga negeri kita dan melindunginya dari bahaya. Ini berarti kita juga harus menghancurkan musuh-musuh kita berikut harta miliknya.”

(Pidato Amir Sjarifoeddin, 21 Agustus 1947)

“Kita harus memperhitungkan diri kita sendiri sebagai penduduk asli Indonesia. Dengan begitu banyak kebangsaan. Dan belum lama ini terbentuk gerakan mempersatukan Islam. Dan kalau orang pribumi Kristen juga punya gagasan untuk mendirikan gerakan persatuan, maka nasionalisme akan tetap terdengar sebagai nada yang tidak ada artinya.”

(Artikel Amir Sjarifoeddin dalam Majalah Terbitan Gymnasium Harleem, Februari 1928)

I

Riwayat Hidup

Amir terbilang cukup misterius. Sosoknya jarang tampil dalam naskah-naskah sejarah. Meskipun, terdapat beberapa tulisan yang mengangkat latar belakang Amir, seperti tulisan Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin: Antara Negara dan Revolusi*, yang terbit pada 1993 dan *75 Tahun Amir Syarifuddin* pada 1982 serta Gerry van Klinken dalam *5 Penggerak Bangsa yang terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen* pada 2010.

Proses penulisan sejarah kehidupan Amir dalam bab ini banyak didukung oleh dua tulisan di atas. Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang keluarga Amir dan sepek terjangnya dalam dunia pendidikan. Letak urgensi penulisan sejarah kehidupan Amir ialah untuk mengetahui titik awal tumbuh berkembangnya tokoh sejarah Indonesia ini—baik di dalam keluarga, pendidikan, keseharian, agama, serta pergaulan yang sedapatnya mendorong pemikirannya dan menemukan epifani dalam hidup. Ulasan dalam bab ini bisa menjadi gambaran konteks sosial budaya politik yang memengaruhi keberadaan dan pola pikir Amir pada masanya.

Latar Belakang: Keluarga, Pendidikan, dan Pilihan Hidup

Kakek Amir, Mangaraja Monang—dengan gelar Sutan Gunung Tua—merupakan seorang bangsawan Batak yang dibaptis menjadi Kristen dan diberi nama Ephraim. Putranya, Djamin—dengan gelar Baginda Soripada Harahap—menikah dengan Basunu Siregar,¹ sosok perempuan muslim taat yang berasal dari keluarga mapan.² Sama seperti ayahnya, Baginda Soripada merupakan seorang Kristen. Namun, ia kemudian menjadi muslim setelah menikah dengan Basunu.

Pernikahan ini kemudian dikaruniai tujuh anak, salah seorang di antaranya ialah Amir Sjarifoedding yang lahir di Medan, 27 Mei 1907.³ Sama seperti leluhurnya, Amir pun memiliki gelar bangsawan Batak, yaitu Sutan Gunung Sualoon. Amir di kemudian hari menjadi sulung dari tujuh bersaudara.

Sutan Gunung Tua merupakan seorang jaksa yang tinggal berpindah-pindah mulai dari Sipirok, kemudian ke Tapanuli, dan terakhir ke Sibolga. Keberadaan Sutan Gunung Tua menjadi jaksa berawal dari kedekatannya dengan misionaris Belanda, A. Scheiber yang membaptisnya menjadi seorang Kristen.⁴ Profesi kakek Amir sebagai jaksa dilanjutkan ayah Amir—yang juga menjadi jaksa di Sibolga.⁵

1 Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin 75 Tahun*, Prisma: No. 12, Desember 1982, hlm. 58

2 Van Klinken, *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen*, hlm.170

3 Benedict Anderson, *Revoeloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Pendudukan di Jawa 1944-1946*, hlm.449-450

4 Benedict Anderson, *op.cit.*, hlm.58

5 *Ibid.*

Kehidupan sehari-hari keluarga Amir cukup terjamin dengan pekerjaan ayahnya sebagai jaksa. Hingga pada 1926, ayah Amir diberhentikan menjadi jaksa karena memukul seorang tahanan.⁶ Baginda Soripada baru diperbolehkan kembali bekerja selang tiga tahun kemudian.⁷ Amir barangkali menyadari pemberhentian kerja ayahnya itu sangat mengganggu stabilitas perekonomian keluarga. Situasi ini mendorongnya yang saat itu berada di Belanda untuk kembali ke Tanah Air.

Masa kecil Amir dihabiskan di Europese Lagere School (ELS), sekolah dasar berbahasa Belanda di Medan—didirikan pemerintah Hindia-Belanda khusus untuk orang Eropa, keturunan Timur, dan elit atau golongan priyayi dari bumiputera.⁸ Amir menunjukkan diri sebagai siswa yang cerdas dan menonjol dibandingkan teman-temannya.⁹ Namun, pendidikan Amir di ELS hanya berlanjut hingga ia duduk di kelas 2 lantaran ayahnya dipindahtugaskan ke Tapanuli.

Ia kemudian melanjutkan sekolah di Sibolgan setelah selesai menempuh pendidikan dasar pada 1921, di usia 14 tahun, oleh ayahnya, Amir dikirim ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan SLTA.¹⁰ Prakarsa agar Amir melanjutkan sekolah di Belanda adalah saran dari Tudung Sutan Gunung Mulia—anak dari kakak tertua ayah Amir, Mangaraja Hamonangan. Sepupu tua Amir ini juga pernah

6 Van Klinken, *op.cit.*, hlm.172

7 Jacques Leclerc, *op.cit.*, hlm.59

8 Djohan Makmur(ed), *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, hlm.76

9 Peter Kasenda, *Amir Syarifuddin Di Persimpangan Jalan*, melalui <http://www.scribd.com/doc/40116021/Amir-Syarifuddin-Di-Persimpangan-Jalan> dilihat pada 15 Desember 2012

10 Van Klinken, *loc. cit.*, hlm.170

belajar di Belanda dan menjadi wakil Tapanuli dalam perkumpulan pelajar *Voolksraad*.¹¹

Maka sejak 1921, Amir menempuh pendidikan Hukum di Harleem. Setahun setelah dari *Gymnasium Harleem*, ia pindah ke *Gymnasium Leiden* dan lulus dari sana pada 1927.¹² Sementara itu, gelar sarjana hukum baru diperolehnya di Indonesia pada 1933 dari *Rechts Hogeschool* (cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Jakarta.¹³

Banyak pemuda Tapanuli juga belajar di Leiden.¹⁴ Di tempat itu pula, Amir menjalin pertemanan dekat dengan Ferdinand Tampubolon—sesama anak muda Batak yang mengenalkan Injil kepadanya. Semenjak berteman dekat dengan Ferdinand, Amir mulai ingin mengetahui tentang Injil lebih dalam dan selama di Belanda ia sedikit demi sedikit dipengaruhi pemikiran Kristen. Pada saat meninggal, Ferdinand bahkan menitipkan Injil-nya untuk Amir.¹⁵

Selain perkara pertemuan dengan Ferdinand dan pengaruh pertemuan tersebut atas keimanan Amir, ia juga terbilang beruntung lantaran masa pendidikannya di Belanda sezaman dengan Revolusi Perancis yang membuatnya mengagumi Comte de Mirabeau (1749-1791) dan darinya Amir mendapat banyak pengaruh pemikiran.¹⁶ De Mirabeau terkenal sebagai diplomat dan orator hebat,

11 Jacques Leclerc, *loc.cit.*, hlm.58

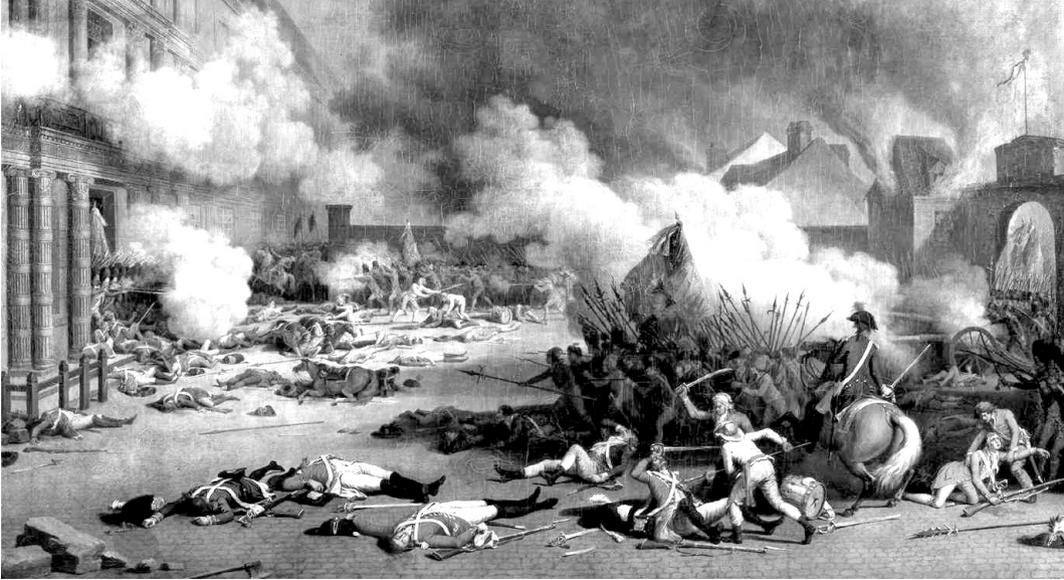
12 Jacques Leclerc, *op.cit.*, hlm.53

13 Benedict Anderson, *op.cit.*, hlm.450

14 Peter Kasenda, *Amir Syarifuddin Di Persimpangan Jalan*, melalui <http://www.scribd.com/doc/40116021/Amir-Syarifuddin-Di-Persimpangan-Jalan> dilihat pada 15 Desember 2012

15 *Ibid.*

16 Van Klinken, *op. cit.*, hlm.174



serta negarawan yang mendukung monarki konstitusional di Perancis dan menggemparkan publikasi untuk Revolusi Perancis.

Selain de Mirabeau, Amir menyukai Maximilien Robespierre yang juga merupakan tokoh dalam Revolusi Perancis dengan latar belakang pendidikan hukum.¹⁷ Robespierre menjabat Ketua Pengadilan Revolusi Perancis dan ia menentang kuat monarki absolut. Terdapat banyak kesamaan antara pribadi Amir dengan kedua tokoh tersebut, baik profesi maupun bidang yang ditekuni. Dalam teks sejarah, banyak dibicarakan tentang keberpengaruhannya

¹⁷ *Ibid.*

tokoh-tokoh di atas sebagai rujukan dalam revolusi yang Amir impikan.

Menjadi mahasiswa Indonesia di Belanda, secara politis Amir juga aktif mengikuti Perkoempoelan Hindia (*Indies Association*), yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (*Indonesian Association*) di bawah pimpinan Mohammad Hatta.¹⁸ Di lingkungan pergaulan selama di Belanda, Amir sangat populer dalam bakatnya berorganisasi, terlebih ia cakap berkomunikasi dan menguasai bahasa Yunani klasik, Latin, Perancis, dan Inggris.¹⁹ Ketertarikannya pada hal-hal bernuansa orientalis-tradisionalis juga tampak jelas dari kegiatannya di Belanda. Ia tercatat pernah mengikuti kuliah filsafat timur dan filsafat barat yang dilaksanakan oleh *Theosophical Society*²⁰ dan menggemari tulisan-tulisan Henriette Roland Holst²¹ yang menulis puisi sosialis-humanis.²²



Pilihan-pilihan Kontroversial Sang Bangsawan

Latar belakang keluarga besar Amir adalah penganut agama Kristen secara turun-temurun. Kakeknya menganut

18 Van Klinken, *op.cit.*, hlm.171

19 *Ibid.*

20 Adrian Vickers, *op.cit.*, hlm.132

21 Salah seorang seniman, tetapi aktif secara politik setelah membaca Das Kapital Karl Marx. Seorang sosialis religius yang puisi-puisinya selalu berkaitan dengan kehidupan politik sehari-hari.

22 Van Klinken, *op.cit.*, hlm.183

Kristen. Hal ini diikuti Tudung Sutan Gunung Mulia, sepupu Amir kendati ibu dari sepupu Amir adalah seorang muslim yang di kemudian hari memeluk Kristen mengikuti suaminya.²³ Berbeda dengan sepupunya itu, Amir merupakan seorang muslim dikarenakan pilihan ayahnya yang memeluk agama Islam mengikuti istri. Pernikahan beda-agama ini sangat mungkin terjadi karena suasana daerah Tapanuli-Medan saat itu merupakan daerah perbauran Islam dan Kristen.

Keberagaman agama dalam keluarganya menjadi penting bagi keterbukaan sikap memilih agama. Pada kenyataannya, walaupun Basunu merupakan seorang muslim yang taat, ayah Amir yang seorang muallaf tidak lantas ikut dengan rutin menjalankan syariat Islam. Bahkan Baginda Soripada tidak pernah terlihat sedang mengaji, salat atau mengajarkan hal-hal terkait agama kepada anak-anaknya.²⁴ Hal ini bisa jadi lantaran perpindahan agama tersebut tidak sepenuhnya dari hati Baginda Soripada, sehingga ia tidak mampu memberikan pelajaran agama yang baik bagi anak-anaknya. Karena itu, pengaruh ketat untuk menjadikan Amir dan adik-adiknya seorang muslim yang taat datang dari ibunya.

Dengan posisi Amir sebagai anak sulung, Basunu sangat mengharapkan putranya kelak menjadi panutan bagi adik-adik sekaligus sosok muslim yang taat beragama sehingga mampu menjadi pemimpin agama.²⁵ Hal ini jelas terlihat

23 Jacques Leclerc, *loc.cit.*, hlm. 58

24 Peter Kasenda, *Amir Di Persimpangan Jalan*, <http://www.scribd.com/doc/40116021/Amir-Syarifuddin-Di-Persimpangan-Jalan> dilihat pada 15 Desember 2012

25 Van Klinken, *loc.cit.*, hlm.170

dari pemilihan nama ‘Amir Sjarifoeddin’ oleh ibunya—kata ‘Amir’ dalam bahasa Arab bermakna pemimpin, dan ‘Sjarifoeddin’ berarti kemuliaan agama. Selain itu, Amir juga menyandang predikat *panggoaran* keluarga. Di dalam adat Batak, *panggoaran* adalah seorang anak pertama dan laki-laki yang menjadi pembawa jalan atau panutan bagi adik-adiknya. Terlebih, anak laki-lakilah yang meneruskan marga keluarga.²⁶

Sepanjang sisa hidupnya, Amir tidak menjadi muslim yang taat karena kemudian hari ia memilih menjadi Kristen. Keteguhan Amir mendalami iman Kristen tidak tanggung-tanggung. Ia memulainya sejak berada di Belanda, dari pertemanannya dengan Ferdinand Tampubolon. Saat itu, ia rutin mengikuti perhimpunan siswa Gymnasium Harleem bersama mahasiswa Kristen. Hal ini berlanjut ketika ia di Indonesia di mana ia menjalin kedekatan dengan seorang misionaris, Julius Schepper, dan belajar Katekismus darinya. Hal ini menjadi cikal bakal Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).²⁷

Terlebih lagi, pemikiran Amir juga sedikit banyak mendapat pengaruh agama Kristen selama belajar di Belanda di mana Amir mengalami pergaulan yang lebih luas. Dalam catatan Klinken, diterangkan Amir dibaptis pada 1931 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Kemolong, Batavia.²⁸

Pilihan Amir tersebut tentu menimbulkan kisruh di dalam keluarga, khususnya dari ibunya yang jelas

26 Terkait budaya patrilineal pada budaya Batak

27 Hotman Jonathan Lumbangaol, *Amir Syarifuddin Harahap Perdana Menteri RI yang Dilupakan*, <http://www.kabarindonesia.com>, Edisi 15 Desember 2008, 16:55:34 WIB., dilihat pada 15 Desember 2012

28 Van Klinken, *op.cit.*, hlm.178

menentang keras. Sebelum Amir resmi dibaptis, ibunya sempat mengancam bunuh diri untuk menunjukkan penolakan baptis terhadap Amir.²⁹ Amir mengabaikan ancaman itu, ia tetap melaju dengan pilihannya. Keadaan itu berlanjut dengan kematian ibunya. Di sisi lain, tindakan bunuh diri Basunu telah dipicu sebelumnya oleh buruknya perekonomian keluarga karena ayah Amir dikeluarkan dari pekerjaan, serta diperburuk dengan kegiatan Amir yang ikut dalam pergerakan.³⁰

Masa-masa perjuangan Amir dalam revolusi Indonesia tidak pula lepas dari Kitab Injil. Ke mana pun ia pergi, selalu dibawanya Injil di saku. Ia gemar berkhotbah di gereja-gereja kendati ia bukan pendeta. Bahkan hingga hari kematiannya, ia masih mengantongi sebuah Kitab Injil.

Setelah membuat pilihan kontroversial dengan berpindah agama, Amir kembali berkontroversi dengan menikahi perempuan yang satu marga dengannya—yang menjadi larangan dalam budaya Batak. Dalam falsafah Batak, adalah sangat tidak etis untuk menikahi sesama marga.³¹

Terlepas dari larangan itu, ia tetap menikahi seorang perempuan Batak yang bernama Djaenah Harahap. Banyaknya ancaman secara adat istiadat tidak menyurutkan niat Amir meresmikan hubungan dengan Djaenah. Dari sini terlihat, Amir sudah memulai kontroversi dalam

29 *Ibid.*

30 Jacques Leclerc, *loc.cit.*, hlm.59

31 Orang-orang semacam ini dapat dikucilkan dari pergaulan lingkungan sesama orang Batak. Pernikahan semarga sangat dianggap tabu dalam adat Batak apalagi saat itu belum zaman modern, di mana adat sangat ditaati. Pernikahan semarga dianggap sebagai aib dan tidak pantas.

kehidupannya dari lingkungan terkecil yakni keluarga. Mereka menikah di bulan Oktober 1935 setelah Amir keluar dari penjara.³² Pernikahan itu dikarunia enam orang anak: Andrea, Lidya Ida Lumongga, Kesas Taromar, Damaris, Tito Batari, dan Helena Luisa.

Dinamika Profesi: Terdesak Kebutuhan Hidup

Hukuman penjara Amir sejak 7 Desember 1933- 5 Juni 1935 berkaitan dengan karangan berjudul “Aksi Massa” yang dimuat majalah Banteng Partindo. Karangan ini kontroversial karena berisi ajakan bagi seluruh masyarakat untuk menenyapkan para penjajah. Walaupun dikarang oleh Mohammad Yamin, dalam penerbitan naskah itu, Amir dinyatakan sebagai penulisnya.³³

Selepas dari penjara, gelar sarjana memberi Amir banyak kemungkinan profesi, tetapi ia terpaku pada kariernya di bidang hukum. Amir secara independen melanjutkan profesi sebagai pengacara, yang dulu juga ditekuni oleh kakek dan ayahnya. Pertimbangan Amir, dengan menjadi pengacara ia dapat menafkahi kehidupan rumah tangga bersama Djaenah.

Sepanjang kariernya, ia meneguhkan diri untuk tidak menjadi seperti pengacara pada umumnya. Pada akhirnya, ia lebih sering disebut sebagai pengacara politik. Sebutan ini disematkan untuknya karena ia bekerja demi membela teman seperjuangan yang banyak tersangkut konflik dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia.

32 Van Klinken, *op.cit.*, hlm.179

33 Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin: Antara Negara dan Revolusi*, hlm.38

Sebagai pengacara, Amir banyak melakukan pembelaan agar hukumanneteman-temannya yang terjerat hukummenjadi lebih ringan atau agar mereka terbebas dari hukuman. Pada tahun-tahun itu (1935-1937), banyak temannya yang berperkara dengan pemerintah Hindia-Belanda. Sebagian besar dari mereka merupakan pemuda yang tergabung dalam Indonesia Muda³⁴, di antaranya Suparna Sastradireja, Pandoe Kartawiguna, Imam Soedjono, dan Soepadiono.³⁵

Upaya pembebasan teman-teman seperjuangan ini tidak menolong keadaan ekonomi keluarganya. Apalagi di kemudian waktu, Amir tidak sejalan dengan pemikiran Yamin yang kemudian menggiring dirinya menghentikan kerjasama di bidang hukum dengan kawan sederahnya itu. Banyak diceritakan dalam buku-buku sejarah bahwa selepas keluar dari penjara, Amir membuka kantor pengacara bersama Yamin, tetapi hubungan kerjasama ini tidak bertahan lama. Walaupun, pada kesempatan lain, mereka tetap menjalin kerjasama di Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).

Pertengahan 1937—tepatnya pada 24 Mei 1937—Amir memprakarsai berdirinya Partai Gerindo yang berhaluan kiri.³⁶ Ia tidak banyak ambil bagian dalam tahun pertama pendirian partai itu karena ia memilih pindah ke Sukabumi. Kepindahannya ke Sukabumi ia niatkan untuk menafkahi anak istri. Di sana ia membuka

34 Merupakan organisasi pemuda-pemuda Indonesia yang menempuh Pendidikan di Belanda

35 Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin 75 Tahun*, Prisma: No. 12, Desember 1982, *op.cit.*, hlm.66

36 Jacques Leclerc, *op.cit.*, hlm.39

kantor pengacara.³⁷ Namun, pada saat itu, masyarakat sangat menghindari orang-orang yang bermasalah dengan Belanda, Amir termasuk di dalamnya.³⁸ Maka dari itu, kantor pengacara Amir sepi dari orang-orang yang membutuhkan jasa pengacara. Amir pun makin terdesak—kesulitan membiayai kehidupan sehari-hari keluarganya, hingga kemudian ia memilih kembali ke Jakarta.

Pada pertengahan 1938, Amir hijrah ke Jakarta dan berpartisipasi aktif dalam Gerindo. Selama kurun waktu 1939-1940, Belanda mengendus gerakan Amir sebagai bagian dari komunis sekaligus gerakan kiri yang anti-fasis. Pihak Belanda memenjarakannya selama seminggu di penjara Boven Digul. Belanda kemudian mengancam akan memenjarakan Amir kembali apabila ia tidak bersedia bekerja untuk Belanda. Atas pertimbangan ekonomi keluarga yang sedang sulit, Amir memilih menyepakati ancaman itu.

Maka pada September 1940, Amir bekerja di Kantor Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perekonomian (*Departemen Economische Zaken*) untuk mengelola urusan informasi dan dokumentasi.³⁹ Di sana ia mendapat gaji untuk menghidupi keluarganya sekaligus mempelajari pemerintahan Belanda di Indonesia dalam kurun waktu dua tahun hingga 1942. Beberapa saat sebelum kedatangan Jepang, Belanda menyusun taktik gerakan bawah tanah untuk menghalau Jepang dengan meminta masukan dari orang-orang Indonesia. Adalah Dr. Idenburg yang

37 Jacques Leclerc, *op.cit.*, hlm.39

38 Jacques Leclerc, *op.cit.*, hlm.67

39 Jacques Leclerc, *op.cit.*, hlm.41



menunjuk Amir menyusun gerakan tersebut.⁴⁰

Idenburg memberikan sejumlah uang kepada Amir untuk menyusun strategi. Pemberian uang tersebut kemudian menjadi pemicu anggapan beberapa kalangan soal Amerika yang pro-penjajahan—dalam hal ini pro terhadap Belanda. Namun, dalam usaha menyusun gerakan menghalau kedatangan Jepang itu, dalam perjanjian itu tertulis bahwa Idenburg sepakat akan melanggengkan kemerdekaan RI jika Amir berhasil mengusir bangsa Jepang. Pada akhirnya, Amir kalah. Jepang pun mengenal Amir sebagai seorang anti-Jepang (fasis) garis keras sehingga ketika Jepang berhasil menguasai Indonesia, Amir dijebloskan ke penjara.

Religiositas dalam Gerakan Perjuangan

Masa kuliah Amir di Belanda menjadi titik mula mendalami agama Kristen dan diperkuat sejak ia menjalin hubungan dengan Schepper. Meskipun, kedekatan Amir dan Schepper telah bermula saat ia berada di Kramat 106,

40 *Ibid.*

tempat yang sering dikunjungi misionaris Eropa.⁴¹ Amir dan Schepper semakin dekat ketika Amir turut dalam diskusi *Christen Studenten Vereeniging op Java (CSV op Java)* yang merupakan cikal bakal GMKI.⁴² Diskusi-diskusi yang diadakan *CSV op Java* tersebut sering dilakukan di rumah Schepper, membahas berbagai persoalan politik yang berkaitan dengan situasi pergerakan nasional di tanah air.

Saat itu, anggota *CSV op Java* antara lain ialah Amir, Johannes Leimena, A.M. Tambunan, A.L. Frans, S.C. Nainggolan, dan G. Siwabessey.⁴³ Para anggota berperan membina persekutuan iman, penelaahan Alkitab bagi mereka yang beragama Kristen. Namun, tidak hanya bekerja di bidang keagamaan, *CSV op Java* juga menyentuh ranah komunikasi dan advokasi terhadap masyarakat melaluitabloid *Semangat Baroe* sejak 1940 dan Amir berperan sebagai dewan redaksi.⁴⁴

Pilihan Amir menjadi seorang Kristen membawa manfaat tersendiri baginya. Sepanjang tahun 1931-1948, banyak orang mengenalnya sebagai seorang Kristen taat. Ia cukup terkenal di banyak gereja dan dikenal di kalangan Kristen, khususnya gereja Batak di Batavia, lantaran sering memberikan khotbah. Dalam keseharian, Amir juga sering menyampaikan ajaran Kristen secara tidak langsung pada

41 Van Klinken, *op. cit.*, hlm.77

42 Hiski Darmayana, *Amir Sjarifuddin Nasionalis dari Tanah Batak yang Terlupakan*, melalui <http://www.berdikarionline.com/tokoh/pemikiran-tokoh/20110523/amir-sjarifudin-harahap-nasionalis-dari-tanah-batak-yang-terlupakan.html>, Edisi : Senin, 23 Mei 2011 dilihat pada 16 Desember 2012

43 Zakaria Ngelow, *Kekristenan dan Nasionalisme: Perjumpaan umat Kristen Protestan dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950*, hlm.142

44 Van Klinken, *op. cit.*, hlm.77

situasi pergerakan masa itu.

Selama dalam pergerakan, orang-orang terbiasa melihatnya membawa Injil ke mana pun ia pergi, bahkan ketika ia dipenjara sekalipun. Selama di penjara Jepang, ia disiksa menyerupai Yesus karena ia memeluk agama Kristen. Setiap kali disiksa, ia disalibkan dalam posisi terbalik dengan kepala mengarah ke bawah dan bagian kaki di atas.⁴⁵

Pengaruh Kristen dalam diri Amir juga terwujud pada proses perekrutan Gerindo, Amir berpegangan bahwa yang menjadi saudara sejati bukan hanya orang kaya dari kaumnya, tetapi juga orang miskin dan hina dari bangsa lain.⁴⁶ Itu berarti, pintu terbuka bagi siapa pun yang ingin tergabung dalam Gerindo. Sosok Amir sebagai seorang Kristen yang baik juga terlihat dalam paruh awal 1942. Sekitar tahun tersebut, Amir banyak terlibat dalam organisasi Kristen dan berperan sebagai panitia Persatuan Kaum Kristen.⁴⁷ Bahkan di tahun-tahun itu pula, ia masih secara teratur berkhotbah di gereja Batak terbesar di Kernolog walaupun ia bukan seorang pendeta.⁴⁸

Keaktifannya di gerakan Kristen tidak secara langsung membuat Amir memiliki pandangan untuk mendirikan Partai Kristen. Menunggu waktu lama bagi Amir untuk melancarkan ide pendirian partai karena mulanya ia percaya bahwa perkara perbedaan agama tidak perlu dibawa-bawa dalam perjuangan kemerdekaan.⁴⁹ Alih-alih mendirikan

45 Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin 75 Tahun*, Prisma: No. 12, Desember 1982, *Op.Cit.*, hlm.55

46 Van Klinken, *op.cit.*, hlm.195

47 Jacques Leclerc, *op.cit.*, hlm.42

48 Van Klinken, *op.cit.*, hlm.210

49 Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin: Antara Negara dan Revolusi*, *Op.Cit.*, hlm.21

partai politik bernapaskan agama Kristen, ia justru menyarankan kepada gereja-gereja agar mampu melahirkan kepemimpinan yang beradaptasi dengan kebebasan kesadaran, demokrasi yang sebenarnya, sampai persoalan yang menyangkut buruh perempuan, dan anak-anak.⁵⁰

Klinken menyatakan dalam tulisannya tentang Amir, bahwa identitas sebagai seorang Kristen membawa Amir pada titik termarginalkan dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyimpulkan, ada beberapa elemen primordial di dalam gerakan nasionalis pada masa itu yang tampak jelas saat Mohammad Natsir menyatakan Amir tidak layak menjadi seorang pemimpin nasionalis lantaran agamanya.⁵¹

Akan tetapi, menurut penulis, keberadaan Amir sebagai penganut agama Kristen tidak serta-merta memarginalkannya. Agama Kristen yang melekat pada dirinya justru menguatkan dan melanggengkan perjuangan Amir untuk kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya—bagaimana keberadaan dirinya sebagai seorang Kristen melepaskan Amir dari tuduhan sebagai komunis. Keberadaan Amir sebagai seorang Kristen yang taat menjadikan sebagian rekan-rekannya tidak percaya bahwa Amir adalah seorang Komunis—apalagi Komunis versi Stalin ataupun versi Lenin.

Hatta ikut meminta Amir dilepaskan dari eksekusi hukuman mati lantaran terdorong oleh latar belakang Amir sebagai orang Kristen.⁵² Hakikat agama Kristen

50 Van Klinken, *op. cit.*, hlm.209

51 Van Klinken, *op. cit.*, hlm.222

52 Hersri Setiawan, *Negara Madiun? : Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*, hlm.47



dijadikan dasar perjuangan Amir—sebagaimana yang Amir sampaikan kepada Soemarsono. Bahkan, menurut Soemarsono, dorongan Amir untuk terlibat dalam pergerakan lebih banyak dipengaruhi agamanya. Amir pernah menyatakan, “Kalau mau jadi Kristen yang baik, kau harus masuk dalam pergerakan. Percuma kita dapat stempel sebagai orang Kristen, tapi tidak berbuat untuk sesama manusia, masyarakat, ataupun bangsa.”⁵³

Seiring waktu, Amir mulai menyatakan kesediaan membantu berdirinya Partai Kristen. Ia memberikan pidato di Karangpandan pada 1941 di mana dalam pidatonya ia menyampaikan kesanggupannya tersebut. Dengan sikap ini, posisi Amir semakin tersudutkan dan menuai banyak kecaman. Walau begitu, pidato Amir itu tidak menyurutkan jumlah massa pendukungnya yang datang dari kalangan agama berbeda dalam gerakan melawan kedatangan Jepang.

Amir tetap melenggang bebas dengan perjuangannya. Agama baginyatetap merupakan identitas pribadi dan juga pendorong dalam perjuangan, yang bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga teman-teman seperjuangan seperti

53 Hersri Setiawan, *op. cit.*, hlm.45

Soemarsono. Hal lain yang menunjukkan agama bukan faktor yang memarginalkan Amir terbukti dari bagaimana ia masuk dan menjalin hubungan dengan Sukarno, Hatta, Yamin, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Bahkan Amir merupakan sosok yang pada awalnya ditunjuk menjadi Presiden RI ketika Jepang kalah melawan Amerika.⁵⁴ Namun dengan pertimbangan bahwa kecil kemungkinan untuk mengeluarkan Amir dari penjara Jepang, maka adalah sulit untuk mengesahkannya sebagai Presiden.

Pembentukan Karakter Amir

Selain tertarik akan masalah politik dan hukum sebagaimana tampak dari tokoh-tokoh yang dikaguminya, Amir juga menyenangi bidang kesusastraan, kesenian, dan filsafat. Sementara untuk mengisi waktu luang, ia terbilang kerap berolahraga, terutama untuk dua jenis olahraga kegemarannya: tenis dan sepakbola. Soal buku bacaan, Amir sangat menyukai buku Edward Douwes Dekker yang berjudul *Max Havelaard* dan tampak bahwa karakternya banyak dibentuk oleh buku-buku bacaannya.⁵⁵

Ia juga menyukai musik. Sepulangannya ke Indonesia selama tinggal di Jalan Kramat 106, Amir dan kawan-kawannya sangat sering bermain biola untuk melepas penat.⁵⁶ Ia memainkan musik ciptaan Schubert atau serenade yang sentimental.⁵⁷ Ia memang mencintai kesenian, tetapi menurut Abu Hanifah dalam tulisannya, Amir mewujud

54 Lebih lanjut dapat dilihat pada bab 3.

55 Abu Hanifah, *Revolusi Memakan Anak Sendiri: Tragedi Amir Syarifuddin*, Prisma : No. 8, Agustus 1977, hlm.100

56 Abu Hanifah, *op.cit.*, hlm.87

57 Abu Hanifah, *Op.Cit.*, hlm.88

sosok lelaki yang emosional dan tidak stabil. Hanifah berpendapat Amir adalah seseorang yang penuh emosi, sentimental, lekas marah, tetapi lekas baik, suka tertawa, tetapi bila sedang main biola menyinarkan perasaan yang sulit dipahami—entah kesedihan ataukahkegembiraan.⁵⁸

Keluarga Amir, pendidikannya, kehidupan pribadi, sampai pada segala sesuatu kebiasaan dan kesukaan Amir ini tak bisa dipungkiri memang membentuk karakter dirinya. Tentu kesemua hal di atas berpengaruh pada cara-cara Amir memperjuangkan cita-cita kemerdekaan yang diimpikan rakyat Indonesia pada masa itu. Apa yang ia pelajari selama masa pendidikan di Belanda memengaruhi caranya menyusun strategi dalam gerakan, partai, hingga jabatan di mana ia terlibat. Demikian pula dengan para tokoh kesukaannya yang dijadikan sebagai rujukan tindakan maupun pemikiran, serta aplikasi nilai-nilai moral melalui agama yang pasti ditunjukkan sebagai sesuatu yang diikutinya.

Takdir terlahir dalam keluarga dengan keragaman agama dan kehidupannya yang nomadenjuga membawa Amir pada keluwesan dalam hubungan sosial—terutama ketika menanggapi konflik atau perbedaan-perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang plural. Situasi menerima perbedaan tersebut terlihat dari perjuangannya dalam menyorankan penjagaan terhadap bangsa yang multikultur agar menjadi satu dalam perjuangan kemerdekaan.

Ia menunjukkan keterbukaannya terhadap keberagaman elemen bangsa Indonesia yang terdiri atas suku, golongan, agama dalam penerimaan kader yang tergabung

58 Abu Hanifah, *Op. Cit.*, hlm.91

di Gerindo. Partai itu bahkan dapat mewedahi orang-orang Tionghoa yang saat itu “sedikit” terpinggirkan dari gerakan perjuangan. Selain itu, tidak seperti Gunung Mulia yang menggunakan gelar Sutan Tudung sebagai nama depan, Amir menghindari penggunaan gelar kebangsawanan. Ia tidak suka menyebutkan marganya (Harahap), meski selama ini nama marga adalah simbol utama kebanggaan masyarakat Batak terhadap budaya asalnya.

Amir kerap kali menggunakan bahasa Indonesia padahal ia sendiri berkhotbah di Gereja Batak yang biasanya melaksanakan ibadah dalam bahasa Batak (bahkan sampai sekarang). Untuk hal ini, Amir sempat tidak disukai oleh orang-orang dari suku Batak karena dianggap tidak terikat pada kebudayaan suku. Padahal, secara tidak langsung Amir ingin menekan rasa “terlalu” bangga atas sebuah identitas kesukuan.

Keberadaan Amir sebagai keturunan bangsawan membawanya pada pendidikan berkelas di masa itu. Ia menempuh pendidikan di ELS dan bertemu dengan orang Eropa, keturunan Tionghoa, serta golongan elit/priyayi dari bumiputera. Amir tentunya menjadi sosok yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak lain yang menempuh pendidikan di sekolah biasa atau bahkan tidak menempuh pendidikan.

Keluarganya menduduki posisi cukup penting pada masa itu, termasuk dari sepupunya Sutan Gunung Mulia yang duduk di *Voolksraad*. Mau tidak mau, di kemudian hari terdapat pengaruh cara-cara berkomunikasi di dalam keluarga yang kemudian banyak dikembangkannya dalam pendidikannya di Belanda. Di Belanda itu pula, tampaklah bahwa kemampuan intelektual dari keluarganya jelas

menurun kepada Amir. Bahkan oleh teman-temannya di sana, ia dikenang sebagai orang yang memiliki kemampuan berpidato baik—di mana pidatonya kerapamat menggugah emosi pendengarnya.

II

Karier Politik

Amir menjadi perdana menteri Indonesia pada masa penjajahan. Saat mengampu jabatan tersebut, ia sering muncul di muka umum dengan kacamata *frame* gelap. Kepiawaian berpidato, keterlibatan serta ketekunan di dunia jurnalistik membuatnya banyak dikagumi. Bagi banyak orang yang menyimak pidatonya, sikap humanis dan ide-ide brilian Amir jelas terwujud dalam tiap orasinya.

Pengagumnya dari beragam kalangan: teman-teman seperjuangan, masyarakat umum, hingga beberapa peneliti revolusi di Indonesia. Namun, tidak sedikit pula orang yang menghujatnya sebagai pemberontak dan pengganggu dalam proses mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, cap sebagai 'orang kiri' dan citra negatif masyarakat terhadap ideologi tersebut lekat pada dirinya.

Tidak hanya menimbulkan kontroversi dalam pilihan-pilihannya di lingkup keluarga, ia juga berkontroversi dengan perannya dalam sejarah kemerdekaan. Pada bab ini akan dipaparkan bagaimana peran Amir dalam rentang waktu sejak kepulangannya ke Indonesia pada 1927 hingga kematiannya pada 1948. Maka, bab ini juga mencakup

berbagai gerakan yang diikuti bahkan didirikan olehnya. Bagian ini juga menguraikan gambaran konteks sosial politik Indonesia, termasuk situasi internasional yang mempengaruhi tahun demi tahun di masa karier Amir. Bab ini juga akan disertai pembahasan lahirnya partai komunis di Indonesia yang dipengaruhi komunisme Uni Soviet, Stalin, dan Lenin, juga pembahasan mengenai pemberontakan yang Amir gagas—hal ini akan terkait dengan: *pertama*, masa awal persentuhan Amir dengan partai berhaluan komunis, karena kemudian ia lebih dikenal dengan *image* PKI dan disamakan dari sejarah. *Kedua*, sejauh mana ideologi komunis dipegang oleh Amir dan partai. *Ketiga*, tentang apakah Amir memang menginginkan Pemberontakan Madiun 1948.

Kembalinya Amir dari Belanda

Kepulangan Amir ke Indonesia terjadi pada 1927. Saat itu, ia terdesak oleh keadaan keluarganya yang mengalami gangguan ekonomi lantaran ayahnya berhenti bekerja. Saat pulang, ia baru saja menyelesaikan ujian penghabisan meski gelar sarjana dari Belanda belum resmi keluar. Amir baru mendapatkan gelar sarjana hukumnya berkat bantuan Schepper yang memohon kepada pihak tempatnya belajar agar Amir diizinkan mengikuti ujian selepas keluar dari penjara di tahun 1933.¹

Setibanya di Indonesia, Amir bergabung dengan teman-teman seperjuangan para kaum muda Indonesia; ia tinggal bersama dengan Yamin, A.K.Gani, Abu Hanifah,

1 Van Klinken, *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen*, hlm. 189

Assat, Mohammad Abbas, dan Mangaradja Pindor di Kramat Jati 106.²Sejak saat itu, Amir bergabung pula dengan *Perhimpunan Peladjar-Peladjar Indonesia*(PPPI).³

Tergabungnya Amir dalam perhimpunan itu membuka ruang pertemuan yang melahirkan banyak diskusi dalam penyampaian gagasan. Di rumah Kramat Jati 106 itu, sehabis makan malam, Amir dan rekan-rekannya sering membahas soal-soal politik, kultur, masyarakat, serta kolonialisme Belanda. Sehari-hari, mereka jugaterbiasa membicarakan teori-teori politik yang rumit. Bahasannya luas, bahkan sampai secara detail mengkaji Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Rusia, dan Revolusi Cina.⁴ Diskusi-diskusi ini yang barangkali menjadi cikal bakal dan melahirkan pemikiran tentang semangat kebangsaan yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Konteks Sosial Budaya Politik di Masa Kepulungan Amir

Pada rentang tahun 1920-1927, situasi politik Indonesia berada pada titik kritis karena banyak terjadi pemogokan buruh dan pemberontakan PKI. Peristiwa pemogokan-pemogokan para buruh mengemuka di pertengahan 1925.⁵ Sementara itu, dalam tataran situasi sosial politik, perlawanan terhadap penjajah serta pergolakan masyarakat yang dipimpin oleh elit kultural banyak terjadi.⁶

2 Van Klinken, *op. cit.*, hlm.172

3 *Ibid.*

4 Abu Hanifah, *Revolusi Memakan Anak Sendiri: Tragedi Amir Syarifuddin*, hlm.87

5 Imam Soedjono, *Yang Berlawan: Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*, hlm.33

6 Imam Soedjono, *op.cit.*, hlm.28



Untuk memahami latar belakang pergolakan, mundur ke tahun lahirnya generasi kuli di Jawa pada 1900-an⁷, saat itu kuli-kuli menyepakati kontrak kerja dengan pasal-pasal yang merugikan. Rakyat berlarut-larut menjadi budak selama masa penjajahan Belanda. Mereka dituntut bekerja di perkebunan dengan gaji sangat minim.⁸ Para petani pun hidup dalam kondisi tak jauh berbeda; mereka sangat menderita karena hasil taninya diserahkan kepada Belanda, belum lagi ada tambahan iuran pajak cukup tinggi yang harus dibayarkan.

Karena keadaan demikian, sejak 1920, mulai bermunculan perlawanan-perlawanan masyarakat secara kultural. Pemikiran mengenai nasib bangsa pun mulai bermunculan. *Indische Partij*—organisasi yang dipimpin Soewardi Soerjaningrat—mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui pendirian berbagai sekolah yang menanamkan rasa nasionalisme. Penanaman semangat ini dilakukan dengan membagi kisah-kisah para pahlawan daerah kepada murid-murid sekolah dasar dan

7 Suyono, *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial*, hlm.121

8 Suyono, *op.cit.*, hlm.126

menengah pada zaman itu.⁹ Gerakan tersebut memberikan dampak positif dan mendorong pendirian banyak sekolah nasional.

Di tahun-tahun Revolusi Eropa 1848—sebagaimana halnya Revolusi Perancis, serikat buruh di Indonesia melancarkan pemogokan dan mendirikan berbagai serikat buruh.¹⁰ Munculnya berbagai gerakan masyarakat dalam perserikatan buruh di tahun 1917-1918 kemudian mengalami transformasi pada tahun 1920 sampai 1923. Takashi menyebutnya Zaman Reactie/Partij, di mana gerakan-gerakan seperti Central Sjarikat Islam, Boedi Oetomo (BO), Insulinde berubah menjadi partai politik seperti Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV)¹¹ yang merupakan cikal bakal partai komunis di Indonesia. Gerakan-gerakan dalam menantang pemerintahan kolonial pun kemudian banyak tersalur melalui partai.

Pemogokan buruh pada tahun-tahun itu, seperti yang terjadi pada 9 Mei 1923, didasari kebijakan pemerintah kolonial mengenai pengurangan jumlah uang untuk biaya hidup pekerja dan penghapusan tunjangan biaya hidup.¹² Hal ini memancing Semaoen, tokoh dalam Sjarikat Islam dan ISDV (kemudian dikenal sebagai PKI), untuk mengajak kelompok buruh di ISDV menolak kebijakan tersebut.¹³ Penolakan muncul berupa pemogokan kelompok buruh PKI, *Vereeniging voor Spoor-en Tramwegpersoneel*

9 Suyono, *op.cit.*, hlm.135

10 Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak*, hlm.147

11 Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm.295

12 Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm.332

13 *Ibid.*

(VSTP), yang berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda—dan kemudian berujung pada penangkapan pemimpin-pemimpin PKI, salah satunya Semaoen.¹⁴

Akhir Pemberontakan PKI I

Tepat setahun setelah kepulangan Amir ke Indonesia, berlangsung pemberontakan PKI I di beberapa wilayah Jawa dan Sumatera. Pemberontakan ini tidak terlepas dari konteks sosial politik di mana terjadi perlawanan para buruh yang diorganisir PKI. Keberadaan partai komunis di Indonesia dipelopori Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet yang datang ke Indonesia pada tahun 1912.¹⁵

Terlepas dari himpitan banyak pihak, PKI tidak kehilangan eksistensi karena ia berhasil mengorganisir buruh dalam menciptakan serikat buruh revolusioner.¹⁶ Pada pertengahan 1925, kembali terjadi pemogokan buruh besar-besaran yang dipimpin kaum komunis, tetapi pemerintah kolonial berhasil menumpasnya.¹⁷ Bagaimanapun, PKI tetap bergerak.

Pemberontakan ini diawali dengan konferensi pada 25 Desember 1925 di Prambanan yang memuat agenda pemogokan umum dan pemberontakan bersenjata untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda pada Mei-Juni 1926.¹⁸ Konferensi dilanjutkan pada Januari

14 Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm.334

15 Ensiklopedia Jakarta, *Hendricus Sneevliet*, melalui <http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/876>
Awalnya ikut dalam organisasi komunis di Belanda yaitu Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP)

16 Takashi Shiraishi, *op.cit.*, hlm.429

17 *Ibid.*

18 Imam Soedjono, *loc.cit.*, hlm.33



1926 di Singapura diikuti Sardjono, Soebakat, Sanoesi, Winanta, Musso, Alimin, Boedisitjro, dan Soegono untuk membicarakan pelaksanaan, tetapi tidak disetujui Tan Malaka.¹⁹ Peristiwa ini mengakibatkan kerenggangan antara Tan Malaka dan kader-kader di PKI.

Pemberontakan tetap berlanjut pada 12 November 1926 di Jakarta dengan melakukan penyerbuan kantor telekomunikasi, rumah wakil residen, serta barikade jalan—sementara di Banten, pemberontakan dilakukan dengan peledakan jembatan berskala luas.²⁰ Pada tanggal 14 November, pasukan rakyat bertempur dengan konvoi militer pemerintah kolonial di Kadujawen dan Kadigedong. Pemberontakan juga terjadi di Priangan, Cisarua, Tasikmalaya, hingga pada 17 November. Pemberontakan mencapai Solo dengan penyerbuan pos-pos kekuasaan.²¹ Pada Januari 1927, terjadi pula pemberontakan di Sumatera Barat dengan menyerang polisi dan menguasai pos-pos pemerintahan.²²

Persentuhan Awal dengan PKI

Pemberontakan yang berjalan selama tiga bulan itu pada akhirnya taklukterhadap tindakan represif

19 Imam Soedjono, *op.cit.*, hlm.33-34

20 Imam Soedjono, *op.cit.*, hlm.35

21 Imam Soedjono, *op.cit.*, hlm.34

22 Imam Soedjono, *op.cit.*, hlm.36-37



pemerintah kolonial Belanda. Alhasil, banyak pemimpin PKI ditangkap dan dijjerujikan. Beberapa dari mereka kemudian dibebaskan, seperti Tan Malaka, Semaoen, Darsono, Alimin, dan Musso.²³ Musso yang sempat melarikan diri ke luar negeri datang kembali ke Indonesia dan menyempatkan diri membangun kembali PKI melalui *Central Comitee PKI (CCPKI)*. Saat kedatangannya itu pula, *CCPKI* baru saja dibentuk yang anggota-anggotanya kemudian terdiri atas Amir beserta Pamoedji, Soekajat, Abdoel Aziz, Haji Abdoerakhim, Wikana, Widarta, dan Atmadji.²⁴ Kedatangan Musso merupakan perintah Georgi Dimitrov, sekjen Komintern yang menyatakan perlunya gerakan antifasis²⁵—yang barangkali terpengaruh gelombang perkembangan negara-negara fasis, seperti Jepang dan Jerman.

Kedatangan Musso ke Indonesia pada tahun 1935 juga merupakan tahap awal Amir bersentuhan dengan komunis.

23 Imam Soedjono, *op.cit.*, hlm.43

24 Imam Soedjono, *op.cit.*, hlm.44

25 Ulfa Ilyas&Kusno, *Sjahrir Terjepit Diantara Konfrontasi dan Diplomasi Bagian Ketiga*, melalui, <http://www.berdikarionline.com/tokoh/20110421/sjahrir-terjepit-diantara-konfrontasi-dan-diplomasi-bagian-ketigaselesai.html>, Edisi : Kamis, 21 April 2011, dilihat pada 14 Desember 2012

Musso atau siapa pun yang membentuk *CC PKI* pada 1935 tentu memilih Amir bukan tanpa sebab, mengingat pada masa 1927-1935 Amir cukup populer sebagai anggota gerakan yang berkarakter radikal. Jauh sebelum terikat dengan *CC PKI*, Amir telah mengenal berbagai *isme* yang berkembang pada abad ke-19 selama ia menempuh pendidikan di Belanda.

Dalam buku Soe Hok Gie yang berjudul *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*, ada pernyataan bahwa Amir telah lama terlibat dalam organisasi komunis dan memang dia jelas berada pada sisi kiri dari *isme-isme* di masa itu. Namun, di antara berita dan pendapat yang simpang siur itu, Amir pernah menyatakan secara jelas; ia seorang Marxis. Keberadaannya sebagai seorang Marxis secara tegas dinyatakan dalam pidatonya di tahun 1946:

*“Sebagai seorang Marxis, saya ingin suatu masyarakat egaliter dengan distribusi yang adil. Namun, semua ahli teori revolusi harus menerima bahwa aspirasi itu harus tercapai secara bertahap. Mao Tse Tung pernah berkata, perjuangan kita sekarang harus ditujukan pada fase pertama, sedangkan fase kedua ditunda untuk sementara waktu”.*²⁶

Dari ajaran Karl Marx, Amir mendapatkan visi mencipta masyarakat yang sederajat melalui pendistribusian yang adil. Pilihan menjadi seorang Marxis merupakan pilihan banyak orang saat itu. Harus diakui doktrin Marx pada masa itu sangat digandrungi oleh para kaum terpelajar di mana pun, termasuk di Indonesia. Abu Hanifah mengatakan bahwa mereka yang tinggal bersama di Kramat Jati sangat sering memperdebatkan *isme-isme* termasuk

26 A.J.S Reid., *Revolusi Nasional Indonesia*, hlm.127

Marxisme dan Komunisme. Diakui Abu, hampir semua anggota di Kramat Jati—termasuk Amir—mengagumi Marx dan Friedrich Engels, tetapi tiada satu pun dari mereka yang terlalu terpengaruh ajaran komunis meski efek pemberontakan komunis masih sangat terasa.²⁷

Doktrin Marx disusun pada era adanya peningkatan industrialisasi di Eropa dengan sistem pemerintahan kerajaan yang merujuk pada kapitalisme.²⁸ Maka dari itu, doktrin Marx menjadi sebuah impian baru agar masyarakat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan sebagai petani dan pekerja. Secara tidak langsung, ideologi Marxisme memberikan harapan untuk menjatuhkan para pengusaha dan memperbaiki nasib serta kehidupan para buruh. Selain itu, doktrin Marx juga menebar pesona yang luar biasa bagi beberapa pejuang yang ingin bebas dari kolonialisme.

Keadaan Indonesia pada abad ke-20 sangat dekat dengan munculnya doktrin Marx pada abad ke-19 tersebut. Keadaan demikian tergambar dalam buku Douwes Dekker yang berjudul Max Havelaar yang sekaligus menjadi buku kesukaan Amir. Sementara itu dari sisi agama, Amir terpesona dengan Injil yang banyak menggambarkan perlu mengasihi orang miskin, melakukan perubahan hidup, dan pelayanan terhadap sesama.

Menuju Panggung Politik

Seperti yang telah disebutkan, awal karier Amir di panggung politik Indonesia dimulai sejak ia bergabung dalam PPPI dan perannya sebagai *CCPKI*. Dalam

27 Abu Hanifah, *op.cit.*, hlm.88

28 T.B.Simatupang, *Tugas Kristen Dalam Revolusi*, hlm.140



perkembangannya, Amir juga aktif di *Jong Batak* dan membawa partisipasi *Jong Batak* ke Sumpah Pemuda 1928. Pada masa Sumpah Pemuda, Amir bahkan berperan sebagai bendahara *organizing-committee* yang kemudian berlanjut bergabung dengan Generasi 28 dibawah pimpinan Sukarno.²⁹

Pembentukan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Gejolak perlawanan terhadap penjajahan kemudian memunculkan banyak pergerakan sebagai wadah untuk persatuan. Pergerakan nasional terbagi menjadi dua bagian: gerakan protonasionalis (1908-1926) dengan tahapan yang ditandai ketidakjelasan konsep kebangsaan Indonesia; dan gerakan *the real* nasionalisme (1927-1942) di mana pada tahapan ini sudah terlihat kejelasan dari *nationhood*.³⁰Peran Amir muncul pada fase kejelasan *nationhood*. Sebagai intelektual muda, Amir terlibat dalam gerakan yang sekaligus berjalan sebagai partai—Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Ia mendirikan bersama Yamin—rekan sederahnya di Sumatera—dan A.K.Gani pada 1937.³¹ Melalui surat kabar *Kebangoenan*, gerakan ini

29 Van Klinken, *op.cit.*, hlm.174

30 Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, hlm.3

31 Arya Ajiaska, *Mengenal Pahlawan Indonesia*, hlm.243

mendeklarasikan diri sebagai gerakan tanpa rasialis³² yang memadukan kekuatan demi merangkul semua pihak yang terlibat dalam usaha memerdekakan Indonesia. Sebelum di Gerindo, Amir telah terlibat dalam pendirian Partai Indonesia (Partindo) yang didirikan di Jakarta pada 30 April 1931.

Selama kepemimpinan Amir, Gerindo dikenal sebagai partai kiri antifasis yang terpengaruh paham komunis.³³ Sebagai partai dan gerakan perjuangan, Gerindo meyakini pencapaian jangka panjang bagi kemerdekaan Indonesia membutuhkan kerjasama Belanda demi mengatasi ancaman Jepang. Gerindo berorientasi pada situasi internasional-nasional—yang mana kemudian gerakan ini meyakini bahwa sedikit banyaknya keadaan secara internasional mempengaruhi kekuatan merebut kemerdekaan.³⁴ Hal ini tentu berkenaan dengan pilihan Amir menjadi anggota *CC PKI* pada 1935.

Melalui Gerindo, Amir memunculkan isu-isu pendidikan politik serta kebudayaan yang menjadi pusat perhatiannya dalam perjuangan.³⁵ Ia juga memasukkan isu-isu penting seperti masalah etnis, agama, hingga bahasa dalam membangkitkan rasa nasionalisme bersama sebagai bangsa Indonesia.

Salah satu isu yang juga menyita perhatian Amir ialah persoalan etnis Cina di Indonesia. Situasi pada saat itu memang agaknya mengucilkan para Tionghoa dari berbagai gerakan kemerdekaan. Sementara itu, di satu sisi terdapat

32 Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm.14

33 Harry Poeze, *Madiun 1948: PKI Bergerak*, hlm.4

34 Leo Suryadinata, *loc.cit.*, hlm.14

35 Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm.397

orang-orang peranakan Tionghoa yang ingin ikut ambil bagian dalam berbagai gerakan maupun partai pada masa itu. Hal ini mendorong Amir untuk menyampaikan pidato mengenai kebijakan membuka Gerindo bagi masyarakat peranakan di Indonesia pada kongres Gerindo tahun 1939 di Palembang.³⁶

Kebijaksanaan Amir dalam Gerindo menjadi salah satu alternatif bagi orang-orang Tionghoa itu untuk menyumbangkan kemampuannya bagi kemerdekaan Indonesia. Secara tegas, Amir menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki tujuan sama, cita-cita sama, dan keinginan sama menjadi satu bangsa tentu harus ikut berjuang—sebagaimana halnya kebijakan yang berlaku di Swiss dan Amerika Serikat bagi kaum imigran.³⁷ Pada kesempatan itu pula, Amir menyampaikan pandangan terhadap situasi politik internasional. Ia mengatakan, “Ini bukan lagi pertarungan antara Timur dan Barat karena kediktatoran sekarang juga ditemukan di Eropa (Austria dan Cekoslowakia) dan di Timur (Cina dibawah kekuasaan Jepang)”³⁸.

Keanggotaan Gerindo di bawah pimpinan Amir, Sartono, Dr. A.K.Gani, Sanoesi Pane, Wikana, dan Hatta kebanyakan merekrut eks-Partindo—yang lebih dikenal sebagai kekuatan nasionalis militan.³⁹ Belakangan setelah itu, ada beberapa konflik terjadi di organisasi, Amir pecah kongsi dengan Yamin sejak 1938 karena perbedaan prinsipil

36 Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm.15

37 *Ibid.*

38 Van Klinken, *op.cit.*, hlm.194

39 George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, hlm.123

untuk bergabung dengan kubu Tan Malaka.

Meski Amir dan Yamin tidak lagi dalam satu gerakan yang sama, tentu tujuan perjuangan mereka tetap sama, yakni demi kemerdekaan negara. Perjuangan tetap berlanjut—hingga Gerindo meluncurkan buletin bulanan politik *Toedjoean Rakjat* yang sangat terkenal pada masanya. Buletin itu banyak berisi penegasan atas penolakan terhadap basis etnik tradisional atau agama sebagai solidaritas sosial dan bagaimana gerakan nasionalis menghindari fasisme.⁴⁰

Amir menjadi pemimpin yang populer pada masanya, sekalipun Gerindo disinyalir sebagai gerakan sosialis kiri (komunis) atau di bawah bayang-bayang PKI sebagai gerakan yang cukup membahayakan. Masa kejayaan Amir dicatat sebagai prestasi dalam menyatukan kemampuan intelektualitas dan semangatnya demi merangkul semua kalangan. Hal ini dinyatakan oleh Simatupang, salah seorang yang dekat dengan Amir:

“Apapun juga yang menjadi pertimbangan terakhir dari penulis sejarah kelak mengenai bung Amir sebagai tokoh politik, namun mereka yang juga pernah mengenalnya dari dekat, akan tetap memelihara kenang-kenangan kepada seorang manusia yang baik dan peramah, seorang pemikir yang tepat kadang-kadang brilliant, seorang orator yang berpidato hanya kalah terhadap bung Karno, seorang pejuang dan pekerja yang tabah dan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri.”⁴¹

Gerindo semakin ternama hingga membawa Amir ke gabungan gerakan sekaligus partai yang lebih besar yaitu Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Pada bulan Mei 1939,

40 George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm.192

41 Harry Poeze, *op.cit.*, hlm.59

GAPI menyatukan delapan organisasi nasionalis terpenting yang diketuai oleh Amir, Abikoesno, dan Thamrin.⁴²

Mempertahankan Eksistensi Melawan Jepang

Kedatangan Jepang ke Indonesia diawali kalahnya Perancis terhadap Jerman.⁴³ Kemenangan Jerman berimplikasi pada Jepang karena keduanya merupakan negara sekutu dengan paham fasis. Jepang kemudian mendirikan pangkalan yang berfungsi dalam persiapan perang dan pangkalan di Vietnam yang dulunya merupakan jajahan Perancis.⁴⁴

Pendirian pangkalan memicu ketegangan hubungan Amerika dengan Jepang. Jepang ingin meneruskan usaha ekspansinya ke arah selatan yang dianggap Amerika sebagai penghambat perdagangan Amerika. Hal ini kemudian berlarut-larut hingga Perancis dan Amerika mulai memunculkan sinyal perang terhadap Jepang. Sementara itu, Jepang juga mulai memasuki wilayah Indonesia dengan melakukan pendaratan di Manado dan Kena pada 11 Januari 1942.⁴⁵ Kemudian dilanjutkan pada 24 Januari 1942, Brigadir Sakaguchi mendarat di Balikpapan dan membunuh semua orang Eropa yang ditemuinya.⁴⁶ Pada 20 Februari 1942, ia berangkat menduduki Pulau Jawa.

Tindakan ini memunculkan amarah pemerintah Hindia Belanda. Maka pemerintah Hindia Belanda pun

42 George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm.123-124

43 Suyono, *op.cit.*, hlm.200

44 *Ibid.*

45 Suyono, *op.cit.*, hlm.206

46 Suyono, *op.cit.*, hlm.207 Pendudukan Jepang selanjutnya dapat dibaca pada buku Suyono halaman 207-208 yang dilakukan dalam upaya mengurung Pulau Jawa

melakukan perlawanan terhadap Jepang, tetapi kalah karena pada saat itu Jepang memiliki angkatan perang yang sangat baik di darat, laut, dan udara.⁴⁷ Tujuan utama Jepang datang ke Indonesia ialah memperkuat angkatan perang melalui perekonomian untuk menguasai Asia.⁴⁸

Serangan bertubi-tubi Jepang di Pulau Jawa membawa kemenangan bagi Jepang. Komandan pertahanan Belanda di Bandung, Jendral Pesman, mulai menyiapkan perintah penyerahan.⁴⁹ Perintah penyerahan ini masih menjadi konflik bagi pemerintah Hindia Belanda—perihal apakah Belanda akan menyerahkan wilayah Hindia Belanda seluruhnya kepada Jepang. Pemerintah Hindia Belanda tidak menghendaki penyerahan total sementara Jepang menginginkan penyerahan total.

Perundingan pun akhirnya dilaksanakan pada 7 Maret 1942 di Kalijati⁵⁰, yang diikuti oleh Jenderal Ter Pooten sebagai pengganti Jenderal Pesman dari pihak Belanda dan oleh Jenderal Imamura dari pihak Jepang.⁵¹ Namun, tidak ada kesepakatan pada hari itu karena masih terjadi penawaran mengenai penyerahan total atau sebagian.

Baru keesokan hari kemudian, pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan kekuasaan wilayahnya secara total kepada Jepang lantaran ancaman perang dan intimidasi terhadap wilayah Bandung. Pada tanggal 10 Maret 1942, radio-radio mengumumkan berakhirnya kekuasaan Belanda

47 Suyono, *op.cit.*, hlm.208 Dalam peperangan tersebut Jepang tidak hanya berhadapan dengan Belanda namun juga Amerika, Inggris dan Australia yang merasa Jepang telah mengambil alih wilayahnya.

48 M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, hlm.299-300

49 Suyono, *op.cit.*, hlm.223

50 Suyono, *op.cit.*, hlm.226

51 *Ibid.*

di Indonesia.⁵² Hal ini diikuti penyerahan kekuasaan Blackburn, selaku Jenderal Sekutu, yang menyerah kepada pihak Jepang pada 12 Maret 1942 bersama-sama dengan Inggris, Amerika, dan Australia.⁵³

Pada mulanya, rakyat Indonesia menyambut gembira keberadaan Jepang di Indonesia. Saat itu, rakyat beranggapan Jepang menjadi pembebas mereka dari masa kolonial. Terlebih lagi, pihak Jepang datang ke Indonesia dengan membawa semangat sebagai pembebas Asia.

Akan tetapi, harapan Jepang sebagai pembebas bagaikan pungguk merindukan bulan bagi rakyat Indonesia. Keberadaan Jepang di Indonesia sama saja seperti pendahulunya—pihak Belanda—yang sepenuhnya berniat menjajah Indonesia. Dalam kurun waktu 1942-1945, Jepang amat menyengsarakan rakyat Indonesia. Beribu-ribu orang Indonesia pada kurun waktu tiga tahun itu dijadikan Jepang sebagai budak-budak pekerja untuk membantu mesin peperangan Jepang. Para pekerja itu disebut sebagai pekerja romusha. Keadaan ini berlangsung hingga kedatangan kembali Belanda ke Indonesia. Maka benarlah yang ditakutkan Amir—yang diperjuangkannya melalui Gerindo—bahwa Jepang akan menjajah Indonesia lebih kejam daripada sebelumnya. Sebelum itu terjadi, Amir pernah berusaha mencegahnya melalui gerakan bawah tanah, tetapi gagal.

Kegagalan tersebut terjadi lantaran Jepang memiliki program membasmi gerakan-gerakan antifasis dan berhaluan komunis di Indonesia—salah satunya terhadap

52 Suyono, *op.cit.*, hlm.246

53 Suyono, *op.cit.*, hlm.229

Gerindo.⁵⁴ Jepang mengetahui bahwa Amir merupakan kelompok gerakan bawah tanah antifasis yang secara otomatis adalah musuh bagi Jepang sehingga ia dikejar-kejar Jepang. Meskipun dalam pengejaran, Amir masih sempat membentuk organisasi untuk melawan Jepang sebelum ia berada di bawah perlindungan *Netherlands East Indies (NEI)* yang dibiayai oleh Belanda sebesar 25.000 gulden melalui Charles van der Plas.⁵⁵ Pada akhirnya, Amir beserta lima puluh orang kawannya ditangkap Jepang pada Januari 1943.⁵⁶

Lembaran Baru bersama Partai Sosialis

Pada tanggal 13 November 1945, Amir mengadakan rapat di Yogyakarta untuk memprakarsai lahirnya partai baru, Partai Sosialis Indonesia (Parsi).⁵⁷ Kelahiran partai ini adalah bentuk semangat masa lalu Amir saat berada di Gerindo yang dikatakan sebagai gerakan sayap kiri dan antifasis tersebut.⁵⁸ Orang-orang yang tergabung dalam partai ini sebelumnya tergabung dalam Gerindo dan beberapa pemuda yang berhasil dipengaruhi oleh Amir, meskipun jumlahnya tidak sebanyak dulu (1937-1939).⁵⁹

Tidak lama kemudian, Sutan Sjahrir pun mendirikan Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang merupakan gubahan dari kelompok Gerakan Pendidikan.⁶⁰ Kurang lebihnya

54 Van Klinken, *op.cit.*, hlm.199

55 George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm.141

56 Rudolf Mrazek, *loc.cit.*, hlm.396

57 Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm.505

58 Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm.506

59 *Ibid.*

60 Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm.508



tujuan Partai Sosialis maupun Paras ialah sama. Maka, pada tanggal 17 Desember 1945, front rakyat antikapitalisme dan imperialisme—Parsi dan Paras—bergabung menjadi Partai Sosialis dengan Sjahrir sebagai ketua dan Amir sebagai wakil ketua.⁶¹

Dalam partainya, Amir membentuk barisan tentara pemuda sendiri diawali dengan Kongres Pemuda pada 6-10 November 1945, pertama kalinya setelah Indonesia merdeka.⁶² Nama barisan tentara muda tersebut ialah Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang banyak mendapatkan bantuan pribadi dari Amir baik berupa fasilitas, uang, senjata, hingga memiliki gudang senjata di Jawa Timur hasil pertempuran dengan Jepang.⁶³ Pemuda Sosialis Indonesia merupakan gabungan dari ikatan pemuda berpengalaman dan terorganisir yang memiliki ketertarikan terhadap pidato Amir dalam kongres tersebut. Adapun dalam pidatonya, Amir menyampaikan hal sebagai berikut, *“Hai pemuda, jika kamu memegang bedil di tangan kanan, haruslah kamu memegang palu di tangan kiri. Dan*

61 *Ibid.*

62 Imam Soedjono, *op.cit.*, hlm.121

63 *Ibid.*

*jika kamu memegang pedang di tangan kanan, peganglah arit di tanganmu kiri”.*⁶⁴

Pesindo berkembang pesat berkat bantuan Amir. Pesindo memiliki surat kabar *Penghela Rakjat* dan majalah *Revolusioner* untuk mendukung politik Amir-Sjahrir serta menekan lawan politik mereka.⁶⁵ Namun, akhirnya Partai Sosialis yang dibangun Amir dan Sjahrir ini runtuh karena Amir dan Sjahrir terjebak dalam masalah politik antaraktor.

Beberapa kalangan menyayangkan perpecahan Amir dan Sjahrir karena keduanya merupakan tokoh yang saling melengkapi. Awalnya, kerja sama yang dirajut oleh Amir dan Sjahrir berjalan cukup baik dan salah satu buktinya ialah pendirian Partai Sosialis menjadi salah satu partai yang menguasai republik selama dua tahun berturut-turut sekaligus menjadi partai revolusioner.⁶⁶

Mereka mendapat dukungan dari kelompok peranakan Cina pro-Republik dan selama 18 bulan berdirinya partai tak ada konflik yang berarti.⁶⁷ Hingga tengah tahun terakhir 1947, terjadi perpecahan kubu Amir dan Sjahrir di Partai Sosialis dan pada saat itu Sjahrir menyatakan penegasan—perihal apakah Amir seorang nasionalis atau komunis.⁶⁸

Selama tahun 1946, Partai Sosialis sempat mengadakan beberapa kongres dalam mengambil kebijakan partai. Pada 1 April 1946, konferensi Partai Sosialis diadakan di Cirebon dan Amir memberikan penjelasan politik luar negeri, sebagai berikut:

64 Imam Soedjono, *op.cit.*, hlm.119

65 Soe Hok Gie, *Orang-Orang di Persimpangan Jalan Kiri*, hlm.82

66 George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm.198

67 George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm.199

68 George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm.326

*“Kekejaman Belanda yang sudah berulang-ulang terjadi tidak pantas kita diamkan saja. Dewan Pertahanan siap menghadapi segala kemungkinan. Kita telah mencoba berjuang secara damai, tetapi tidak berhasil, apa boleh buat, kita pun bersedia menghadapi segala kemungkinan”.*⁶⁹

Kemudian secara berturut-turut kongres diadakan pada 6 sampai 10 September di Yogyakarta.⁷⁰ Konflik berlanjut dalam tubuh partai pasca Amir menyelesaikan Perjanjian Renville. Meskipun, ketika itu, kelompok Sjahrir menentangnya.⁷¹ Akibatnya, Partai Sosialis pun pecah. Amir menghadapi serangan bertubi lantaran perjanjian tersebut hingga ia harus menyerahkan kedudukannya sebagai perdana menteri kepada Mohammad Hatta. Selepas menyerahkan jabatan, kelompok Amir bersama sayap kiri lainnya—seperti PKI, Partai Buruh, Pesindo menuntut empat kursi menteri dengan Amir sebagai Menteri Pertahanan.⁷²

Akan tetapi, hal itu tidak dapat dipenuhi Hatta yang lebih berorientasi pada Masjumi yang menolak sayap kiri.⁷³ Sejak itu, sayap kiri menjadi pihak oposisi, sementara Sjahrir tetap mendukung pemerintahan Hatta.⁷⁴ Tentu saja, hal tersebut menggambarkan pecah kongsi yang jelas antara Amir dan Sjahrir, hingga akhirnya Partai Sosialis bubar pada 13 Februari 1948 dan Sjahrir mendirikan Parsi.⁷⁵

69 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid II (1946)*, hlm.322

70 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*,hlm.383

71 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*,hlm.326

72 George Mc Turnan Kahin, *loc.cit.*,hlm.326

73 *Ibid.*

74 George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*,hlm.327

75 *Ibid.*

Konflik antaraktor jelas mengakibatkan pecahnya Partai Sosialis yang didirikan Amir dan Sjahrir. Sjahrir disinyalir menyimpan kekecewaan terhadap Amir karena keberpihakannya kepada Sukarno. Ditambah pula, Amir sebagai orang yang berkedudukan di Dewan Pertahanan Negara tidak melakukan pertanggungjawaban kepada Sjahrir, tetapi kepada Sukarno.⁷⁶

Dua sekawan ini mengalami perpecahan dikarenakan perbedaan cara berpikir mereka dalam melakukan revolusi demi mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Sjahrir tetap berpikir bahwa diplomasi merupakan jalan terbaik untuk meraih kemerdekaan. Sementara Amir mulai memiliki pandangan tentang jalan perang dalam mempertahankan kemerdekaan. Secara ideologis keduanya juga terhalang oleh arah acuan ideologi yang berbeda. Sjahrir tidak menyukai apabila Amir mendekatkan sosialisme pada komunisme.

Kolaborasi Sjahrir dan Amir menjadi catatan penting pada masa revolusi karena keduanya merupakan tokoh yang sama-sama diharapkan membangkitkan dan memajukan revolusi Indonesia pada masa itu. Hal ini terlihat dari orang sezaman yang menyatakan, "*Sjahrir membimbing diplomasi kita di Jakarta dan Amir membimbing pembangunan angkatan bersenjata di Yogyakarta*".⁷⁷ Di dalam tubuh Partai Sosialis, Amir ialah gas dan Sjahrir menjadi remnya.⁷⁸ Tak pelak banyak pihak memberi penilaian bahwa seharusnya baik Amir maupun Sjahrir bergerak sejalan agar mampu memajukan dan mengatur pergerakan yang dilakukan.

76 Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm.572

77 Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm.574

78 Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm.70

Perjalanan Karier Pemerintahan



Selama kekuasaan Jepang, Amir dipenjara dan disiksa. Awalnya Amir akan didakwa hukuman mati oleh Jepang. Namun, Amir hanya dijatuhi hukuman seumur hiduplantaran permintaan Tudung Sutan Mulia, Hatta, dan Sukarno.⁷⁹Patut ditegaskan bahwa Amir merupakan tokoh populer pada masa itu—yang jika ia dibunuh,masyarakat telah dipastikan akan bergejolak.⁸⁰

Berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia setelah dikalahkan Sekutu dengan pengeboman Nagasaki dan Hiroshima sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia II. Kekalahan Jepang secara tidak langsung memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Namun, kemerdekaan tersebut tidak menghentikan langkah para penjajah untuk kembali menempatkan kekuasaan di Indonesia. Perlawanan masih terus terjadi di berbagai daerah.

Awal kemerdekaan, masyarakat bergerak sendiri. Semua bebas, hingga menciptakan *chaos* dan pertempuran

79 Soe Hok Gie, *op.cit.*,hlm.45

80 *Ibid.*

di berbagai tempat. Solusi dari hal tersebut menuntut adanya seorang pemimpin yang memberi komando. Sukarno bukanlah orang pertama yang ditunjuk menjadi Presiden RI 1, melainkan Amir.⁸¹ Yang menjadi kendala, saat itu Amir masih dipenjara dan diperkirakan telah dibunuh Jepang sehingga keberadaannya diragukan. Sjahrir adalah calon berikutnya—tetapi ia menolak—sementara Tan Malaka tidak diketahui keberadaannya.⁸² Akhirnya, tonggak kepresidenan jatuh ke tangan Sukarno bersama Hatta.

Dengan tidak menjadi presiden, bukan berarti peran Amir tidak ada di pemerintahan Indonesia yang baru dibentuk tersebut. Amir memiliki peran yang sangat signifikan untuk ditempatkan dalam pemerintahan terlebih sebagai mantan pergerakan militan. Riwayat hidup Amir sebagai penggagas berbagai gerakan perjuangan dan partai membuatnya dapat menduduki banyak posisi penting.

Peran sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Pertahanan

Kurang lebih selama dua tahun berada dalam penjara, Amir menghadapi banyak siksaan. Meskipun ia menghabiskan hari-hari dengan siksaan, tetapi ia tetap mampu membaca Injil setiap harinya. Hukuman penjara bagi Amir belum berakhir hingga kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia dibebaskan pada 1 Oktober 1945.⁸³

81 Hersri Setiawan, *Negara Madiun? : Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*, hlm.48

82 Hersri Setiawan, *op.cit.*, hlm.49

83 Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm.395

Pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia secara tidak langsung menghalau keberadaan Jepang di Indonesia. Maka para penggerak bangsa pun mulai berbenah membentuk pemerintahan sebagai negara yang merdeka. Pascamerdeka, Sukarno yang sangat populer di tengah masyarakat berjuang membentuk pemerintahan dibantu dengan penggerakan bangsa lainnya seperti Sjahrir, Hatta, dan lain-lain.

Pada 4 September 1945, terbentuk kabinet Republik Indonesia yang pertama di bawah kepemimpinan Sukarno. Dalam kabinet itu, Sukarno menunjuk Amir sebagai menteri penerangan meskipun pada saat itu ia belum keluar dari penjara.⁸⁴ Kedudukan Amir sebagai menteri penerangan bukan tanpa alasan. Ia memiliki kedekatan dengan dunia jurnalistik— pernah aktif sebagai editor di harian *Indonesia Raja* milik PPPI dan *Banteng* milik Partindo.

Sementara itu, pada 16 Oktober 1945, sistem pemerintahan yang awalnya berbentuk sistem presidensial (17 Agustus-14 Oktober 1945) berubah menjadi parlementarian. Hal ini terjadi karena banyaknya hal yang harus diselesaikan, dan pemerintahan dengan sistem parlementer dianggap cocok dengan keadaan saat itu. Terbentuknya sistem ini didasarkan pada maklumat Wakil Presiden No. X pada 16 Oktober 1945 yang menjadi landasan perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer.⁸⁵

Pemerintahan parlementer pertama diumumkan pada

84 Benedict Anderson, *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Pendudukan di Jawa 1944-1946*, hlm.133

85 Ensiklopedia Jakarta, *Kabinet Amir Syarifuddin*, melalui <http://www.jakarta.go.id> , dilihat pada 12 Desember 2012

14 November 1945 dan dipegang oleh Sjahrir sebagai perdana menteri, merangkap sekaligus menteri luar dan dalam negeri.⁸⁶ Orang kedua yang kemudian menjadi penting posisinya di kabinet ialah Amir sebagai menteri penerangan dan keamanan umum.⁸⁷ Amir dan Sjahrir memiliki kerjasama yang cukup baik di dalam pemerintahan maupun di partai.

Keberadaan Amir dalam pemerintahan dengan jabatan penting bukan tanpa sebab. Keberadaannya sejak tahun 1927 sampai kemerdekaan Indonesia telah membuat teman-temannya seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, serta Abu Hanifah mengakuinya sebagai pejuang yang gigih. Belum lagi, Amir memang memiliki kedekatan dengan Sjahrir terutama terkait ideologi sosialisme. Hal yang menarik ialah pemerintahan Sjahrir dan Amir merupakan simbol perlawanan terhadap Jepang karena keduanya merupakan orang yang antifasis.

Amir dan Sjahrir memiliki kerjasama yang cukup baik dalam pemerintahan maupun di dalam partai. Mereka juga menyarankan adanya KNIP sebagai lembaga legislatif negara dan bersatu dalam satu wadah Partai Sosialis. Para anggota KNIP kebanyakan ialah orang-orang yang aktif dalam gerakan bawah tanah antifasis, antara lain Mr. Soewandi, Mr. Sjarifoeddin Prawiranegara, Kyai Wachid Hasjim, Mr. R. Hendromartono, Dr. R.M Soenario Kolopaking, Dr. A.Halim, Soebadio Satrotomo, Mr. Tam Lin Djie, Soepeno, S. Mangoenkarso, Adam Malik, Tajaloedin, dan Dr. Soedarsono.⁸⁸

86 Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm.504

87 *Ibid.*

88 George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm.192

Pada masa kabinet Sjahrir, negara berada pada posisi lemah karena presiden tidak dapat menguasai situasi.⁸⁹ Selain itu, terjadi beberapa gejolak yang menambah kesulitan dalam pemerintahan—seperti perebutan kekuasaan oleh Tan Malaka, perselisihan dalam pemerintahan dan masyarakat yang bergerak bebas. Tantangan yang dihadapi pemerintah di awal kemerdekaan cukup berat sehingga pembentukan kabinet Sjahrir dirombak sebanyak tiga kali, dan peran Sjahrir sempat dialihkan kepada Sukarno akibat peristiwa 3 Juli 1946.

Amir resmi mengundurkan diri sebagai menteri penerangan pada 4 Januari 1946 dan digantikan oleh Mohammad Natsir.⁹⁰ Sejak itu, Amir fokus menjadi menteri pertahanan dalam kabinet Sjahrir, sekaligus menjadi orang nomor dua di Indonesia saat itu. Meskipun kabinet Sjahrir mengalami perombakan dan gangguan, sampai dua tahun lamanya Amir tetap dipercaya menjadi menteri pertahanan. Pada kabinet kedua, Sjahrir sempat mengalami kudeta dari kubu Tan Malaka dengan melakukan penculikan. Kubu Tan Malaka berhasil menculik Sjahrir, tapi gagal menculik Amir.

Pada peristiwa 3 Juli tersebut, kelompok Tan Malaka menyampaikan dua hal. Yang pertama, kubu Tan Malaka melalui Yamin menyampaikan penolakan terhadap keberadaan Sjahrir selaku kepala pemerintahan.⁹¹ Hal kedua yang disampaikan ialah meminta Sukarno menyerahkan kekuasaan militer dari menteri pertahanan kepada Jenderal

89 Wardaya, *Mencari Demokrasi*, *op.cit.*, hlm.3

90 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil *op.cit.*, hlm.8

91 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil *op.cit.*, hlm.261

Soedirman.⁹² Hal kedua tersebut secara langsung mengarah pada posisi Amir selaku menteri pertahanan yang memang mengalami beberapa konflik dengan Jenderal Sudirman.

Selama menjabat sebagai menteri pertahanan, Amir banyak bertentangan dengan Jenderal Sudirman dalam masalah pelatihan dan pendidikan militer. Jenderal Sudirman merupakan panglima besar yang dipilih para bawahannya dalam kesatuan Pembela Tanah Air (PETA).⁹³ Sementara itu, Amir menganggap para tentara PETA adalah orang-orang dengan jalan pikiran pemerintah Jepang yang mengarahkan tentaranya pada ideologi partai sosialisnya yang ditentang oleh Sudirman—yang saat itu mengepalai Tentara Keamanan Rakyat.⁹⁴

Konflik semakin memuncak ketika Amir menyampaikan mosi soal tentara:

“Tentara penjajahan Belanda dan Jepang karena berjiwa kolonial gampang bersifat fasistis, sewenang-wenang dan kejam terhadap rakyat. Ini dipermudah karena untuk menjadi opsir mesti dipenuhi syarat-syarat ijazah yang hanya dapat dipenuhi orang mampu, artinya orang yang biasanya berkepentingan banyak dengan sipenjajah alias orang-orang yang tidak bergaul dengan rakyat biasa. Keadaan di zaman penjajahan itu, pasti membawa bekas di zaman Republik. Oleh karena itu, tentara perlu didemokratisasikan”.⁹⁵

Perdebatan keduanya berbuntut panjang. Hingga akhirnya, pada peristiwa 3 Juli 1946, Jenderal Sudirman menolak menanganinya para penculik Sjahrir yang didasarkan

92 *Ibid.*

93 Wardaya, *op.cit.*, hlm.23

94 Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm.26

95 Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm.91

pada maklumat 28 Maret 1946.⁹⁶

Selaku menteri pertahanan tentara, Amir (bersama Sjahrir) mendirikan lembaga Pendidikan Politik Tentara pada 19 Februari 1946 karena menganggap tentara merupakan didikan Jepang dan harus dibersihkan dari doktrin yang diajarkannya.⁹⁷Badan pendidikan tentara itu kemudian beranggotakan R. Soekono Djojopratiknjo, Mr. Soenarjo, Dr. Moestopo, H.Faried Ma'roef, H.Moekti, Anwar Tjokroaminoto, dan Soemarsono.⁹⁸

Perihal di atas direalisasikan dengan dikeluarkannya maklumat oleh Amir untuk menyelenggarakan asrama bagi pemimpin, badan pejuang, dan badan lain yang memiliki laskar. Amir memang sangat antifasis—hal ini ditegaskan dengan peristiwa 19 Juli 1946 di mana Amir mengajukan protes kepada tentara Serikat di Indonesia akibat pihak Belanda yang banyak menerjunkan orang-orang Jepang di medan pertempuran Bandung.⁹⁹

Amir juga menerapkan beberapa kebijakan penting untuk memperkuat pertahanan negara, seperti menciptakan konsep tentara kerakyatan dengan poin-poin yang ditekankan pada upaya tentara melindungi rakyat. Itu berarti, tentara tidak terlalu banyak mengurus urusan sipil atau pemerintahan karena akan berdampak pada dwifungsi tentara. Bagi Amir, tentara harus memiliki peranan sebagai

96 *Ibid.*

97 Wardaya, *op.cit.*, hlm.28

Maklumat tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan kementerian dalam negeri dan kementerian pertahanan yang menyatakan untuk menyempurnakan pertahanan Negara dari berbagai golongan yang dianggap mengganggu stabilitas Negara.

98 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*,hlm.17,47

99 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*,hlm.304

benteng untuk melindungi rakyat dan memiliki ideologi yang kuat.

Pada 1 April 1946, Amir membentuk jabatan urusan laut seluruh Indonesia dengan tujuan menyelenggarakan perhubungan antarpulau di daerah Republik Indonesia, perhubungan internasional mengenai masalah ekonomi, impor-ekspor, pendidikan, dan perlengkapan pengangkutan laut.¹⁰⁰ Nama tentara pun sempat berubah-ubah dari Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dan pada akhirnya menjadi Tentara Republik Indonesia. Kiprah Amir sebagai menteri pertahanan berlangsung hingga jatuhnya kabinet Sjahrir akibat Perjanjian Linggarjati.



100 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamilop.cit.,hlm.165



Memimpin dalam Sistem Parlementarian

Pengunduran diri Sjahrir selaku perdana menteri membutuhkan kabinet baru untuk menjalankan pemerintahan. Pada 30 Juni 1947, Sukarno menunjuk empat orang untuk membentuk kabinet baru, terdiri atas Amir, A.K.Gani, Soekiman, dan Setyadjit Soegondo yang masing-masing dari Partai Sosialis, Partai Nasional Indonesia (PNI), Masjumi, dan Partai Buruh.¹⁰¹ Kabinet ini diresmikan pada 3 Juli 1947 dan Amir menjabat perdana menteri. Ada desas-desus tentang pengangkatan Amir menjadi perdana menteri didasarkan pertimbangan bahwa ia akan dibutuhkan dalam perundingan dengan Belanda.¹⁰² Dalam menjalankan pemerintahan, orang kepercayaan Amir dalam mengurus urusan luar negeri ialah A.K.Gani temannya seperjuangan di Gerindo.¹⁰³

Pada masa awal pembentukan kabinet, Amir berdiri tanpa adanya perwakilan dari Partai Masjumi yang duduk

101 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid III (1947)*, hlm.202

102 Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm.615

103 Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm.645

di kursi pemerintahan. Hal ini lantaran tuntutan dari Partai Masjumi yang menginginkan jabatan perdana menteri, menteri pertahanan, menteri dalam dan luar negeri. Tuntutan tersebut membuat partai lain menganggap Masjumi ingin mendominasi pemerintahan.¹⁰⁴ Sebagai pengganti, muncul partai kecil yang merupakan pecahan dari Masjumi yakni Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII) yang kemudian mengisi posisi menteri.

Ketiadaan anggota Masjumi dalam kabinet Amir tidak bertahan lama. Pada 11 November 1947, untuk memperkuat kedudukan kabinet dalam perundingan dengan Belanda, Amir mengajak Masjumi bergabung di pemerintahan. Masjumi pun mendapatkan kursi wakil perdana menteri yang diduduki Sjammoeddin.¹⁰⁵ Maka, secara jelas, Masjumi menyatakan dukungan bagi kabinet Amir pada 13 November 1947.¹⁰⁶ Keberadaan Masjumi dalam kabinet Amir kemudian melengkapi komposisi pemerintahan dari berbagai ideologi serta tercapainya usaha Amir untuk memperkuat kedudukan kabinet.

Masa kabinet Amir dapat dikatakan cukup berat karena banyaknya serangan militer yang dilakukan Belanda di berbagai wilayah Indonesia. Kabinet Amir kemudian melanjutkan perundingan terhadap tuntutan Belanda dan menolak berbagai tuntutan yang dianggap merugikan republik. Atas penolakan tersebut, Perdana Menteri Belanda pada periode itu, Louis Beel, memerintahkan pasukan Belanda menghancurkan republik melalui serangan udara

104 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *loc. cit.*, hlm.202

105 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op. cit.*, hlm.399

106 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op. cit.*, hlm.400

dan darat hingga pelabuhan laut di Jawa dan Sumatera.¹⁰⁷

Lantaran pertempuran yang terus-menerus terjadi, selaku perdana menteri, Amir sempat menyampaikan permintaan kepada Amerika pada 5 Juli 1947 untuk menggunakan pengaruhnya sebagai negara adikuasa demi menjamin perdamaian.¹⁰⁸ Demikian juga penghentian pertempuran diusahakan dengan perundingan-perundingan bersama Belanda, dimulai sejak 14 Juli 1947, mengenai batas garis van Mook.¹⁰⁹

Tawar-menawar dalam perundingan cukup sengit, karena banyak permintaan dari Belanda yang merugikan Indonesia—terutama dari segi wilayah. Bukan hanya masalah permintaan yang merugikan, Belanda pun cenderung mengingkari beberapa kesepakatan dan dengan berbagai alasan melakukan penyerangan-penyerangan. Pada 2 Juli 1947, atas rekomendasi van Mook, Beel melakukan agresi militer dan menyerang tujuh daerah di Jawa dan Sumatera yang merupakan kantong Republik.¹¹⁰ Atas peristiwa tersebut, sekali lagi Amir berpidato meminta perhatian pihak internasional melalui Menteri Luar Negeri Australia, Dr. H. V. Evatt:

“Saya minta dengan sangat kepada dunia dan kepada sahabat-sahabat kita di Australia, hendaknya memperkuat bantuannya untuk menghentikan pertumpahan darah selanjutnya dan memandang perjuangan kita dengan kacamata keadilan, kemerdekaan, dan kemanusiaan”.¹¹¹

107 George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm.267

108 Pamoedyo Ananta Toer, Koesalah & Ediaty Kamil, *op.cit.*, hlm.213

109 Pamoedyo Ananta Toer, Koesalah & Ediaty Kamil, *op.cit.*, hlm.222

110 Pamoedyo Ananta Toer, Koesalah & Ediaty Kamil, *op.cit.*, hlm.234

111 Pamoedyo Ananta Toer, Koesalah & Ediaty Kamil, *op.cit.*, hlm.248

Akan tetapi, ada kalanya perang menjadi jalan yang memang harus dilakukan. Amir menyampaikan pemikirannya terkait hal itu melalui pidato pada 21 Agustus 1947:

*“Kita sedang berperang. Kita telah mengeluarkan perintah-perintah untuk tidak bekerjasama dengan musuh. Barangsiapa menentang kita maka dia adalah musuh. Musuh adalah musuh, dan kita tidak mengenal tafsiran yang lain. Kita punya hak untuk menjaga negeri kita dan melindunginya dari bahaya. Ini berarti kita juga harus menghancurkan musuh-musuh kita berikut harta miliknya”*¹¹²

Amir terlihat dilanda kebingungan atas peristiwa yang terus menerus terjadi. Ia juga sempat mengirimkan memorandum kepada Dewan Keamanan PBB:

*“Setiap keterlambatan dalam mencapai penyelesaian politik secara keseluruhan dan dalam melaksanakan gencatan senjata akan memungkinkan pemerintah Belanda mengkonsolidasikan keuntungan-keuntungan ekonominya, hingga akan sangat memperlemah kedudukan Republik. Kami merasa bahwa blockade yang sekarang dijalankan Belanda tidak hanya akan menciptakan penderitaan yang mengerikan di daerah-daerah yang dikuasai Republik, tetapi juga akan mengurangi penghargaan atas situasi politik di kepulauan ini, dan benar-benar akan menghancurkan penilaian kedua belah pihak atas situasi tersebut”*¹¹³

Langkah menyampaikan memorandum kepada PBB ini sangat diperlukan mengingat gempuran-gempuran yang semakin hebat oleh Belanda. Apalagi, pemerintah Amerika

112 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*,hlm.325

113 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*,hlm.406

tidak kunjung menepati janji menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan Belanda. Inggris dan Amerika sama-sama mengakui kemerdekaan Indonesia secara *de facto*, tetapi keduanya tidak memiliki tindakan untuk menghentikan agresi.¹¹⁴

Pada akhirnya, Dewan Keamanan PBB mengusulkan Komisi Jasa Baik melalui Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri atas Amerika, Australia, Belgia untuk menjadi penengah sekaligus pengawas perundingan Indonesia-Belanda. Sejak 2 Desember 1947, perundingan Indonesia-Belanda dilangsungkan di atas Kapal Renville yang berlabuh di Tanjung Priok.¹¹⁵ Kemudian, disusul dengan perundingan di bawah pengawasan KTN.

114 George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm.269

115 George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm.333



Amir sebelumnya menaruh harapan kepada kelompok Barat seperti Amerika dan Inggris untuk dapat membantu Indonesia. Namun, harapan Amir tidak tercapai hingga dibuatnya Perjanjian Renville. Delegasi Indonesia pada saat itu di antaranya Amir sebagai ketua, beserta Iskaq Tjokroadisoerjo, Ali Sastroamidjojo, Haji Agus Salim, Tjoa Sek Ien, Dr. Djoeanda Kartawidjaja, dan Sjahrir.¹¹⁶ Akhirnya pada 17 Januari 1948, Perjanjian Renville ditandatangani. Dalam perjanjian itu, wilayah kekuasaan Indonesia dinyatakan menjadi lebih sempit—hanya

116 Rudolf Mrazek, *op. cit.*, hlm.647

meliputi Jawa Tengah, ujung barat Jawa, dan Banten.¹¹⁷ Perjanjian Renville terdiri atas 10 pasal gencatan senjata, 12 prinsip politik, 6 pasal tambahan prinsip dari KTN yang secara langsung menuai reaksi keras di kalangan Republik Indonesia.¹¹⁸

Kesetujuan Amir mengadakan gencatan senjata pada 15 Januari 1948 mendapatkan tantangan dari pihak Masjumi. Partai Masyumi menarik menteri-menterinya, diikuti demonstrasi dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) di Yogyakarta.¹¹⁹ Perjanjian Renville membuat Amir mendapatkan banyak tekanan dari masyarakat. Ia semakin terpojok ketika banyak pihak dari republik yang tidak setuju dengan hasil perundingan, terutama dari kalangan Partai Masyumi dan PNI.¹²⁰

Amir akhirnya mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri digantikan Hatta dengan menyerahkan mandat kepada Presiden Sukarno pada 23 Januari 1948.¹²¹ Berdasarkan laporan sangat rahasia antara polisi Belanda atas pertemuan Sukarno dengan Frank Graham—wakil Amerika dalam KTN—dinyatakan sebagai berikut:

“Sukarno memanggil Amir Syarifuddin setelah diketahui Masyumi tidak akan menerima kebijakan-kebijakan Amir. Dengan cara yang kasar Amir diminta membubarkan pemerintahan karena Sukarno menginginkan kabinet yang lain. Amir menjawab bahwa ia tidak dapat melakukan hal itu tanpa menciptakan

117 Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm.649

118 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid IV (1948)*, hlm.3

119 *Ibid.*

120 Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm.650

121 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*, hlm.4

*situasi yang amat sukar. Lebih dari itu, ia telah mengabdikan seluruh tenaganya kepada Republik yang sekarang telah memasuki periode yang paling berbahaya dalam tahun-tahun awalnya. Kemudian Soekarno memutuskan bahwa dia sendirilah yang membubarkan pemerintahan Amir Syarifuddin”.*¹²²

Pada tahun-tahun itu, terjadi perebutan kekuatan antara Amerika dan Uni Soviet di mana Amerika berusaha memperkecil pengaruh kiri atau komunis. Karena itu, Amerika pun berusaha memperkecil peran sayap kiri dalam pemerintahan Indonesia dengan menggeser posisi Amir sebagai perdana menteri lantaran afiliasi sosialis/komunisnya.

Akhir Destinasi Politik bersama PKI-Musso

Perjanjian Renville yang dianggap merugikan berlanjut menjadi kecaman bagi Amir. Hal ini juga dialami Sjahrir ketika menyetujui Perjanjian Linggarjati hingga ia melepaskan jabatan sebagai perdana menteri. Kejatuhan Amir dari posisinya sebagai perdana menteri bukan dikarenakan agamanya, sekalipun kecaman sangat banyak datang dari kelompok Masjumi. Namun, lebih dikarenakan adanya wacana terkait usaha peredaman kekuatan kiri dan komunis secara internasional. Bagaimanapun, beberapa orang tetap bergabung dengan Amir di Front Demokrasi Rakyat (FDR).

Tiga hari setelah melepaskan jabatan sebagai perdana menteri, Amir membentuk FDR yang merupakan gabungan partai dan kelompok berhaluan kiri. FDR didirikan pada

122 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*, hlm.60

26 Januari 1948—koalisi dari anggota-anggota PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Pesindo, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).¹²³ Amir mewakili Partai Sosialis yang kemudian menjadi berseberangan posisinya dengan Sjahrir.

Dalam waktu singkat, FDR menjadi pihak oposisi bagi kabinet Hatta. Selaku gerakan dan partai yang menginginkan keterlibatan dalam pemerintahan, FDR melayangkan berbagai kritik mengenai pelaksanaan Perjanjian Renville. Amir bersama FDR menolak dilaksanakannya Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir sendiri. Atas tindakannya ini, ia banyak menerima kecaman termasuk dari parlemennya terdahulu, seperti dari PNI dan Masjumi. Adapun FDR juga menuntut agar Amir kembali menjadi menteri pertahanan.¹²⁴

Selain usaha agar Amir kembali menduduki pemerintahan, FDR memiliki program-program tertentu. Beberapa program dalam ketentuan FDR sangat tidak bersahabat, seperti menculik dan melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok yang dianggap mengganggu apalagi yang keluar dari FDR (eks-FDR). FDR juga aktif menyusun rancangan untuk menciptakan keraguan masyarakat terhadap pemerintah dengan menciptakan berbagai kekacauan.¹²⁵

Pada 26 Februari 1948, FDR memiliki program pembatalan Perjanjian Renville dan perubahan agraria¹²⁶,

123 A.H. Nasution., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Pemberontakan PKI 1948*, hlm.301

124 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*,hlm.11

125 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*,hlm.12

126 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*,hlm.31

dan juga berusaha mendorong pemerintah menyetujui keberadaan wakil Soviet yang ditempatkan di Indonesia. Menyetujui hal ini tentu menjadi sulit karena saat itu pemerintah Indonesia sedang mengadakan kerjasama dengan Amerika.¹²⁷ Wakil Uni Soviet di Indonesia dapat dikatakan memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan luar negeri, tetapi juga memberatkan lantaran mulai terjadi konflik antara Amerika dan Soviet sebagai dua negara terkuat di dunia. Akhirnya, pemerintah memilih tidak menjalankan saran FDR.

Sedari awal, FDR cukup kuat menjadi oposisi bagi pemerintah. Melalui pidato di hadapan 50.000 orang pada 14 Juni 1948, Amir menginginkan agar rakyat dipersenjatai dalam menghadapi Belanda, dengan alasan Belanda mengulur waktu perundingan dan menghambat pemerintah dalam berdemokrasi.¹²⁸ FDR menjadi gerakan yang jauh lebih agresif setelah 12 Agustus 1948. Hal ini dipicu oleh kedatangan Musso di Indonesia yang langsung memberikan kritik terhadap FDR.¹²⁹ Perubahan yang pertama dilakukan Musso dengan *CCPKI* adalah menyatukan semua kelompok FDR dalam PKI.¹³⁰

Peleburan tersebut terjadi pada 29 Agustus 1948. Dengan peleburan ini, FDR berkembang menjadi gerakan yang dipengaruhi gaya Stalin. PKI semakin sering menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah, terutama mendorong demonstrasi-demonstrasi para buruh serta petani untuk mengambil alih lahan milik tuan tanah.

127 Amerika dan Uni Soviet mulai terancam Perang dingin

128 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*,hlm.275

129 Harry Poeze, *op.cit.*,hlm.27

130 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*,hlm.542

Tuntutan-tuntutan ini kemudian berakibat pada gangguan stabilitas pemerintahan.¹³¹

Hatta, sebagai kepala pemerintahan, mencoba menghalau cepatnya pergerakan PKI. Langkah pertama yang ia lakukan untuk mempersempit dominasi komunis ialah dengan menyingkirkan TNI prokomunis yang berbuntut panjang menjadi peristiwa saling melucuti antara TNI dan tentara PKI. Hal ini yang kemudian diyakini sebagai dasar munculnya Peristiwa Madiun 1948.

Terjebak di Persimpangan Peristiwa Madiun 1948

Amir menjadi pemimpin FDR sebelum Musso datang. Namun, pada 2 September 1948, kepemimpinan FDR diambil alih Musso. Amir kemudian menjadi sekretaris pertahanan. Dengan posisi itu, ia berkampanye ke daerah-daerah dan menyerukan kepada masyarakat untuk memilihberpihak pada Amerika atau Uni Soviet.¹³² Selagi Amir dan Musso dalam perjalanannya ke berbagai daerah, pada petengahan September telah terjadi pengejaran terhadap orang-orang yang diketahui tergabung dalam PKI (diawali dengan pelucutan senjata).

Mau tidak mau, Amir dan Musso kembali ke Madiun dan ikut dalam pertempuran. Berita-berita yang tersiar menyatakan bahwa Musso melalui PKI berkeinginan mendirikan negara Madiun. Pemerintah pun lantas mengambil jalan untuk menumpasnya dengan langsung menangkap orang-orang yang terkait PKI, termasuk yang

131 M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm.344

132 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*, hlm.585

berada di Yogyakarta.¹³³ Hal itu menuai reaksi dari Musso yang kemudian membawanya adu mulut dengan Sukarno melalui pidato-pidato mereka.

Keadaan makin memanas. Hari demi hari korban berjatuhan dan PKI pun disinyalir telah membunuh ratusan orang, hingga akhirnya pihak PKI terdesak kalah. Amir bersama sekitar 2.000 orang dalam rombongan mengadakan *longmarch* melewati hutan.¹³⁴ Setelah sekian minggu menjalani *long march*, Amir tertangkap bersama teman-temannya pada 29 November 1948.¹³⁵ Pada akhirnya, mereka tertangkap dan ditembak mati tanggal 19 Desember 1948 di dekat Desa Ngalihan.¹³⁶

Dikenang sebagai Seorang Komunis

Dalam banyak catatan sejarah, Amir dikenal sebagai seorang komunis, pemberontak yang tunduk pada garis komunis komintern Soviet sebagaimana Musso. Hal ini tidak lepas dari beberapa hal yaitu, *pertama*, terbukanya selubung bahwa Amir telah menjadi anggota PKI sejak 1935. *Kedua*, adanya sikap antifasis yang sangat menonjol dalam dirinya yang biasanya dimiliki seorang komunis. *Ketiga*, keterlibatannya dalam Peristiwa Madiun 1948 dan dikenal sebagai pendiri FDR sebagai cikal bakal kekuatan Musso. Terakhir, ia mengakui dirinya sendiri sebagai komunis ketika FDR dileburkan dengan partai kiri lainnya di bawah bendera PKI. Hal yang terakhir ini membuat teman-temannya terkejut. Beberapa orang masih ragu

133 Pamoedya Ananta Toer, Koesalah & Ediati Kamil, *op.cit.*, hlm.616

134 Harry Poeze, *op.cit.*, hlm.267

135 Harry Poeze, *op.cit.*, hlm.59

136 Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin: Antara Negara dan Revolusi*, hlm.3

apakah Amir memang seorang komunis sesuai wacana yang ia lontarkan. Mereka yang ragu tersebut antara lain Hatta, Rosihan Anwar, T.B. Simatupang, dan Abu Hanifah.

Hatta menyatakan, *“Amir itu komunis. Pemimpinnya, malah. Namun, waktu ia hendak ditembak mati, ia mati sambil memeluk Bibel. Memang Amir adalah salah satu pemimpin yang paling sulit saya analisa”*.¹³⁷ Pernyataan Hatta menunjukkan kebingungan terhadap sisi komunis dan religius sosok Amir. Sementara itu, beberapa orang yang mengenal Amir seperti Sjahrir dan Abu Hanifah tidak meyakini Amir sebagai komunis sejati sekalipun ia terlibat dalam peristiwa Madiun bersama Musso.

Keraguan banyak orang dilandasi oleh dua hal. *Pertama*, Amir dikenal sebagai seorang Kristen yang taat dan bahkan ia dikenal sebagai sosok yang sering membawa Injil. Dalam doktrin Kristen, adalah tidak dimungkinkan seorang komunis sekaligus sebagai Kristen. Hubungan antara seorang komunis dan Kristen diperbolehkan hanya pada batas kerjasama di bidang kemanusiaan dan politik untuk tujuan yang baik.¹³⁸ *Kedua*, ialah gaya hidup borjuis Amir yang tidak menonjolkan sisi apa pun sebagai komunis sejati.¹³⁹

Keterlibatan Amir dengan PKI sejak tahun 1935 tidak dapat dipungkiri apalagi sejak ia bergabung dengan Musso. Namun, pilihannya bergabung dengan komunis setidaknya dapat dijelaskan dengan sebuah pernyataan. Bahwa pada masa itu, orang-orang yang tergabung dengan PKI bukan

137 Z.Yasni & Hatta (ed), *Bung Hatta menjawab: Wawancara Dr. Moh. Hatta dengan Dr. Z.Yasni*, hlm.3

138 T.B. Simatupang. *Tugas Kristen dalam Revolusi*, hlm.168

139 Abu Hanifah, *op.cit.*, hlm.97

semata-mata berideologi komunis atau paham secara utuh apa yang disebut dengan komunis, melainkan karena pada saat itu partai komunis ialah partai paling radikal dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial.¹⁴⁰

Pernyataan di atas menjadi dukungan bagi pribadi keras Amir yang terkadang emosional sehingga membawanya bergabung dengan gerakan radikal. Maka, tidak ada alasan untuk memungkiri keterlibatannya pada gerakan komunis. Keterlibatan itu merupakan upaya yang lahir dari pergolakan pemikiran untuk melawan langgengnya kekuasaan kolonial.

Pemikiran untuk bergabung dengan gerakan komunis hanya salah satu bagian dari pilihan Amir yang coba disandingkan dengan pemikiran lainnya, konteks sosial di sekitarnya, dan agama untuk mencapai cita-cita Amir. Melalui berbagai gerakannya, cita-cita Amir ialah merdeka, bebas dari tekanan bangsa lain dan menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara. Namun, cita-cita itu bahkan kandas sebelum sempat ia capai.

140 Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm.57

III

Benang Pemikiran dan Wujud Nasionalisme

Sebagai salah satu tokoh revolusioner yang menyumbang pemikiran perihal nasionalisme, pengaruh Amir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditinjau dari berbagai gerakan, kedudukan, tulisan, pidato, dan orang-orang terdekatnya pada masa itu. Amir berpendapat pemikiran nasionalisme diperlukan sebagai lambang perjuangan dalam upaya meraih kemerdekaan dari penjajahan—yang menjadi sejarah penting terbentuknya sebuah bangsa. Bahwa nasionalisme merupakan kata yang tidak pernah hilang dalam perwujudan cinta terhadap tanah air. Semangat yang sama menyoal nasionalisme dapat dilihat dari kutipan pidato Sukarno pada 1963:

“Jikalau kita benar-benar hendak menyelesaikan revolusi, kita harus bersatu. Jikalau kita hendak benar-benar ingin menjadi mercusuar dalam hidup manusia di dunia ini, kita harus bersatu. Saya juga berkata dan mengkehendaki, supaya dalam hal persatuan segala unsur bangsa Indonesia itu yang disatukan”.¹

1 Kadjat Adra'i, *Percintaan Bung Karno dengan Anak SMA*, hlm.28

Secara sederhana, nasionalisme dipahami sebagai kebersamaan nasib untuk melepaskan diri dari penjajahan. Perjuangan tersebut dimulai dengan lahirnya berbagai gerakan-gerakan perlawanan. Meskipun lahir dengan nama berbeda, serta garis-garis haluan berbeda, gerakan-gerakan tersebut mengemban tujuan untuk memerdekakan diri dan melawan penjajah.

Upaya-upaya Amir dalam memperjuangkan pemikiran nasionalismenya dapat dilihat melalui keterlibatannya dalam organisasi dan partai yang digagasnya semasa hidup, seperti Gerindo dan Partai Sosialis, bahkan termasuk perjuangannya saat memegang kekuasaan sebagai perdana menteri Indonesia kedua.

Kenyataannya, Amir tidak menonjol seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir yang banyak ditulis orang. Banyak orang menduga hal ini lantaran keterlibatan Amir dalam PKI. Harry Poeze, dalam bukunya *PKI Bergerak 1948*, menulis bahwa Amir adalah seorang komunis seperti halnya Musso. Mereka berdua dianggap mengakibatkan perpecahan bangsa. Konsekuensinya, sosok Amir dilenyapkan dari sejarah.

Pertanyaan demi pertanyaan muncul ketika penulis menemukan tulisan van Klinken dalam *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa*. Buku tersebut menyatakan Amir sebagai salah satu tokoh penggerak bangsa yang menjalin kerjasama dengan Sukarno, Hatta, dan Sjahrir. Berangkat dari hal di atas, wajar saja bila kemudian timbul pertanyaan, jika Amir seorang penggerak bangsa, mengapa begitu sedikit tulisan sejarah tentang dirinya?

Adrian Vickers, dalam bukunya *Sejarah Indonesia Modern*, memang menyatakan keadaan Amir sebagai

pemimpin komunis, “*Musso, Amir, dan pemimpin komunis lainnya tak punya banyak pilihan selain pergi ke Madiun, karena basis dukungan mereka sedang berkumpul di sana*”.²Akan tetapi, apakah lantas seorang yang terlibat komunis dapat dianggap tidak memiliki pemikiran untuk kemerdekaan bangsa atau tidak berkontribusi terhadap perjuangan?

Selain keterlibatan sebagai komunis, ada banyak aspek kehidupan Amir yang patut diapresiasi. Kita perlu menggali pemikiran yang melandasi Amir bergabung dalam PKI—kendati ia merupakan sosok Kristen yang religius. Selanjutnya, perihal bagaimana sumbangsih pemikiran Amir dalam pembangunan bangsa melalui pendirian partai juga pengambilan keputusan-keputusan politiknya.

Berbagai hal tersebut menjadi alasan penting untuk mengetahui dan mengulas pemikiran nasionalisme ala Amir yang lebih dikenal sebagai pemberontak. Bagaimanapun, ia turut mewarnai perjuangan bangsa. Oleh karena itu, buku ini berusaha memaparkan beberapa fakta sejarah yang bengkok mengenai Amir melalui serangkaian kisah hidupnya. Buku ini juga secara tidak langsung mencari jawaban apakah Amir memang seseorang yang sepenuhnya bertindak kontra pada bangsa dan negaranya seperti yang selama ini ada dalam beberapa wacana sumber-sumber sejarah yang beredar pada masa Orde Baru.³

2 Adrian Vickers, *Sejarah Indonesia Modern*, hlm.133

3 Harry Poeze, *Madiun 1948 : PKI Bergerak*, hlm.67 Majalah Merdeka pernah memuat artikel anonym yang menilai Amir sangat negative: pemimpin oposisi destruktif yang memanfaatkan kas Negara untuk membangun landasan kekuasaan

Benang-benang Pemikiran di antara *Isme*

Dasar pemikiran nasionalisme Amir tidak dapat lepas dari sosoknya yang dikenal sebagai komunis dan lekat dengan sisi kiri, tetapi juga bertindak sekaligus berpikir sebagai manusia bebas. Oleh karena itu, dalam upaya pbingkaiian pemikiran nasionalisme Amir, berikut ini konsep nasionalisme, Marxisme, sosialisme, dan liberalisme:

1. Nasionalisme

Seorang nasionalis ialah seorang yang memiliki kebanggaan atas bangsanya hingga kadang sampai pada taraf memuja.⁴ Secara sederhana, seorang nasionalis tentu memiliki rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan tanah airnya. Hal ini pun dinyatakan dalam arti nasionalisme di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan, nasionalisme bermakna sebagai paham atau ajaran untuk menjadi bangsa dan negara sendiri.⁵

Benedict Anderson memahami nasionalisme dari sisi berbeda. Ia menyatakan, nasionalisme merupakan paham yang hadir dalam *imagined community*. Dikatakan *imagined community* sebab adalah tidak mungkin membuat seluruh warga dalam suatu komunitas dapat saling mengenal, saling berbicara, dan saling mendengar. Suatu bangsa dapat terbentuk jika sejumlah warga dalam komunitas mau menetapkan diri sebagai bangsa yang mereka angankan dan bayangkan.⁶

4 Hugh Purcell, *Fasisme*, hlm.7

5 Ita Mutiara Dewi, *Nasionalisme dan Kebangkitan dalam Teropong*, hlm.1

6 Ben Anderson, *Imagined Community*, hlm.xxi

Sementara itu, dalam pidatonya pada 1928, Sukarno menyatakan bahwa nasionalisme kita (sebagai bangsa Indonesia) adalah nasionalisme ketimuran bukan kebaratan.⁷ Berdasarkan hal tersebut, dapat ditemukan perbedaan pemaknaan nasionalisme dalam konteks negara. Konteks negara yang berperan sebagai negara penjajah dan dijajah tentunya berbeda, begitu pula dengan negara industri dan negara yang belum mengalami kebangkitan industri. Untuk lebih sederhana, buku ini berusaha menguraikan perbedaan makna nasionalisme pada konteks negara-negara Eropa dan negara di dunia ketiga.

Nasionalisme dalam konteks dunia ketiga menjadi garis penting dalam menggambarkan perjuangan kemerdekaan negara Asia. Berbeda dengan Eropa, nasionalisme di Eropa pada abad modern membawa pada semangat kolonialisme dan imperialisme, sementara itu nasionalisme yang muncul pada negara-negara terjajah ialah yang antikolonialisme.⁸ Nasionalisme yang dijadikan dasar bagi negara-negara di Eropa adalah tentang bagaimana menyejahterakan dan memperkuat negaranya dengan memanfaatkan atau memberi pengaruh pada tanah jajahan. Sementara bagi yang terjajah, nasionalisme ialah bentuk kebebasan diri untuk lepas dari ketertindasan dan menjadi bangsa sendiri—atau dapat dikatakan sebagai nasionalisme antikolonial.

Sejarawan Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa nasionalisme sebagai gejala historis merupakan jawaban atas kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang timbul lantaran penjajahan atau kolonialisme. Ia menyatakan bahwa:

7 Ben Anderson, *op.cit.*, xxxix

8 Sindung Tjahyadi, *Nasionalisme dan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Perspektif Filosofis*, hlm.3

*“Tidak dapat disangkal lagi nasionalisme merupakan hasil yang paling penting daripada pengaruh kekuasaan Barat di negeri-negeri Asia pada zaman modern. Hal yang esensial bagi tujuan kami adalah, bahwa nasionalisme dan kolonialisme itu tidak terlepas satu sama lain, dan terasa juga adanya pengaruh yang timbal balik antara nasionalisme yang sedang berkembang dan politik kolonial dan ideologinya”.*⁹

Secara sederhana, dapat dikatakan nasionalisme menjadi sebuah landasan untuk lepas dari ketertindasan dan menjadi bangsa yang merdeka. Seperti yang diungkapkan oleh Ernest Renan, nasionalisme ialah keinginan untuk ada bersama dan keinginan untuk hidup bersama menjalani satu riwayat.¹⁰ Rasa keinginan menjalani satu riwayat untuk mencapai tujuan tersebut kemudian melahirkan berbagai gerakan perlawanan terhadap tindak kolonial.

2. Marxisme

Paham Marxisme yang digagas oleh Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895) mengkaji tentang konsep kelas sosial. Gagasan ini semakin kuat dengan kehadiran tulisan *The Manifesto of The Communist Party* (Manifesto Partai Komunis) yang dicetak pada Februari 1848.¹¹ Teori Marx dan Engels menjadi cikal bakal gerakan kiri di berbagai negara. Bahkan, dalam perkembangan lebih lanjut, Marx terkadang diidentikkan dengan komunis. Frans Magnis Suseno (2001) mengatakan:

“Sebenarnya Marxisme tidak sama dengan Komunisme.

9 Ben Anderson, *op.cit.*, hlm.xiii

10 Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, hlm.3

11 Ahmad Suhelmi, *op.cit.*, hlm.267

Komunisme adalah gerakan dan kekuatan politik partai-partai komunis yang sejak Revolusi Oktober 1917 dibawah pimpinan W.I.Lenin menjadi kekuatan politis dan ideologis internasional. Istilah komunismee atau Marxisme-Leninisme yang mejadi ajaran atau ideologi resmi komunisme. Jadi, Marxisme merupakan salah satu komponen dalam sistem ideologis komunisme yang dimonopoli untuk memperlihatkan diri sebagai pewaris tahta ajaran Marx".¹²

Dalam ajarannya, Marx ingin menyampaikan bahwa *pertama*, keberadaan kelas-kelas sosial dalam masyarakat berhubungan dengan fase sejarah dalam perkembangan produksi. *Kedua*, diperlukan perjuangan kelas untuk membentuk kediktatoran proletariat, dan *ketiga*, kediktatoran tersebut menjadi bentuk transisi dari penghapusan semua kelas sosial.¹³ Maka dari itu, paham komunis menunjukkan hanya ada partai tunggal yang berfungsi menjadi kaum penguasa dari kaum buruh dan menjaga sistem tersebut.

3. Sosialisme

Kata sosialisme awalnya muncul di Perancis sekitar tahun 1830, hampir bersamaan dengan munculnya kata komunisme yang semula diartikan sama atau mirip dengan makna sosialisme. Cita-cita sosialisme terbilang utopia—lantaran sebagai reaksi terhadap terjadinya Revolusi Perancis yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh seperti Gracchus Babeuf, Henri de Saint-Simon, Charles Fourier,

12 Frans M.Suseno, *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis ke Revisionisme*, hlm.14

13 Muhidin Dahlan, *op.cit.*,hlm.39

dan seorang kapitalis sosialis Robert Owen.¹⁴

Dengan memakai dialektika Marx, dapat dikatakan bahwa gerakan sosialis merupakan antitesis dari sistem produksi kapitalisme yang berbasis kekuatan buruh, kaum tertindas yang dimiskinkan oleh kapitalisme. Di negara-negara jajahan, perjuangan ini diwujudkan dalam bentuk melawan imperialisme dan kolonialisme yang merupakan bentuk perkembangan dari kapitalisme.¹⁵

Lebih lanjut mengenai perjuangan sosialisme ialah kekuatannya dalam menggabungkan perjuangan dan agama. Attlee mengatakan tempat pertama bagi pengaruh-pengaruh dalam gerakan sosialis khususnya di Inggris harus diberikan pada agama yang didasarkan pada Injil.¹⁶ Sementara itu, George Lansbury menyatakan bahwa sosialisme berarti cinta dan persaudaraan dalam setiap urusan kemanusiaan. Hal itu adalah satu-satunya pernyataan yang keluar dari seorang Kristen sebagai pemercaya Injil.¹⁷ Cita-cita sosialisme yang ditegaskan oleh Theimer ialah:

*“Kekayaan dunia merupakan milik semua, bahwa kepemilikan bersama lebih baik daripada milik pribadi, sudah sangat tua. Pemilikan bersama akan menciptakan dunia lebih baik, membuat situasi ekonomis semua orang, meniadakan perbedaan antara miskin dan kaya, menggantikan usaha mengejar keuntungan pribadi dengan kesejahteraan umum.”*¹⁸

14 Sigit Pamungkas, *Pemikiran Politik HOS. Tjokroaminoto, op.cit.*, hlm.16

15 Muhidin Dahlan, *op.cit.*, hlm.31

16 William Ebenstein, *Isme-Isme yang Mengguncang Dunia*, hlm.312
Gerakan sosialis yang diulas oleh Atlee ialah gerakan sosialis Inggris sehingga dalam masalah Agama, Injil sebagai unsur penting yang dituliskannya dalam *The Labour Party in Perspective*.

17 William Ebenstein, *op.cit.*, hlm.313

18 Frans M.Suseno, *op.cit.*, hlm.14

4. Liberalisme

Liberalisme merupakan paham yang menandakan adanya kebebasan dan tiadanya pembatasan. Dalam kerangka liberal, nasionalisme dimaknai sebagai bentuk pemikiran yang tidak berusaha memaksakan identitas nasional, walaupun lembaga-lembaga publik barangkali dicirikan oleh karakter nasional tertentu. Nasionalisme liberal kemudian memberi kebebasan pada individu untuk lebih banyak mengekspresikan diri tanpa harus terpaku pada identitas nasional. Oleh karenanya, ciri nasionalisme liberal lainnya adalah inklusivitas yang terlihat dari pembentukan konsep identitas nasional yang lebih banyak bersifat non agresif, dan menolak tujuan terbentuknya sebuah negara-bangsa yang homogen (Kymlicka, 1998:145-146).¹⁹

Hobsbawm menyatakan bahwa kekuatan pembebasan atau paham liberalisme dari Amerika dan Eropa tersebut yang nyata dan terus berkembang mengambil alih bentuk kebencian terhadap para penakluk atau penguasa—yang dianggap sebagai orang asing—menjadi sebuah sikap antiimperial. Maka di sini liberalisme bersinggungan dengan nasionalisme dalam konteks dunia ketiga yang memiliki keinginan melawan kolonialisme dan imperialisme.²⁰

Nasionalisme liberal tidak memaksakan apa pun bagi setiap orang. Oleh karena terdapat ketersediaan ruang bagi kelompok-kelompok kultural non-nasional seperti imigran, pengungsi, minoritas agama, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) untuk menunjukkan siapa dirinya. Sikap ini didasarkan pada adanya kondisi

19 Sindung Tjahyadi, *op.cit.*, hlm.5

20 E.J.Hobsbawm, *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*, hlm.157

multikulturalisme yang mendukung kepentingan fundamental individu dalam budaya nasional berdasarkan kebebasan, identitas, dan khususnya jaminan atas makna hidup yang mereka perjuangkan. Moralitas dan hukum harus bertugas melindungi, dan bagi nasionalisme-liberal, sarana untuk mewujudkan perlindungan itu adalah melalui hak penentuan-sendiri nasional, suatu hak untuk negara (*a right to a state*) (Gans, 1998: 159).²¹

Perwujudan Nasionalisme

Amir dieksekusi tembak di Ngalihan, Solo pada 19 Desember 1948. Sebelum pelaksanaan eksekusi, ia berdoa selama satu jam dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Internationale.²² Ada sepuluh tahanan lain yang menjalani eksekusi mati sepertinya. Hukuman itu mereka jalani lantaran peran mereka sebagai bagian dari kelompok Komunis dalam Peristiwa Madiun. Sebelumnya, pada 9 September 1948, ia telah menyampaikan pengakuan kontroversial:

“Saya undang mereka di depan umum supaya mereka juga mengakui kesalahannya. Kalau benar-benar Rustam Effendi seorang komunis, maka harus dia mengakui kesalahannya pula.

Bukan saja Setiajid dan Maruto Darusman telah menjadi anggota Vereeniging Nederland di Indonesia, tetapi juga Rustam Effendi adalah anggota dari perkumpulan itu. Dalam zaman kependudukan Jerman di Nederland, komunis Rustam Effendi bersembunyi dan tidak menampakkan diri. Sebaliknya 80% dari anggota CPN mati terbunuh oleh fasis Jerman. Selaku anggota CPN,

21 Sindung Tjahyadi, *op. cit.*, hlm.3-4

22 Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin : Antara Negara dan Revolusi*, hlm.3

Rustam Effendi telah indisipliner terhadap partai yang tidak mau direcall oleh partainya waktu dia waktu dia tidak boleh berkhianat terhadap Partai Komunis, dan tidak boleh menjalankan fraksivorming dalam partai. Baiklah kita konfrontir di depan muka rakyat.

Orang bilang saya mesti digantung. Saya tidak takut, saya cukup melatih diri dalam penderitaan dan siksaan. Kalau saya harus dihukum gantung karena kesalahan politik, di zaman republik, saya bertanya : Hukuman apakah harus diberikan kepada kaum kooperator pendudukan Jepang? Kepada penjual beratus-ratus romusha, seperti Somukaco Syamsu Harya Udaya?

Saya akui telah menerima uang dari Van der Plas f 25.000,- tetapi saya jalankan itu karena Komintern telah menganjurkan kepada kami untuk kerja sama dengan kaum penjajah di dalam front bersama melawan fasisme. Tetapi setelah Perang Dunia II selesai kaum komunis telah melepaskan kerjasama itu. Sekarang kami dari PKI tidak mengakui lagi Linggarjati, Renville, dan Manifesto Politik 1 Nopember 1945 dan menjelaskan politik kompromi dengan musuh. Juga SOBSI telah memutuskan menjalankan politik ofensif dan meninggalkan politik defensif.²³

Amir kemudian memang dikenang sebagai seorang komunis, tetapi jejak langkah perjuangannya tidak lepas dari sosoknya yang nasionalis. Sepanjang 41 tahun hidupnya, ia mendedikasikan 20 tahun untuk pergerakan perjuangan dan politik. Ia juga mengaku menerima bantuan dari Belanda untuk menghadang fasisme. Namun, Abu Hanifah mengatakan bahwa Amir sempat mengalami kekecewaan terhadap Belanda dan secara khusus terhadap Van der

23 A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Pemberontakan PKI 1948*, hlm.211

Plas.²⁴ Amir kecewa terhadap janji Belanda yang tidak membiarkan Indonesia merdeka walaupun sebelumnya telah terjalin kerjasama antara Indonesia-Belanda dalam menghadang fasisme.

Sepanjang karir politiknya, Amir terjebak dalam pilihan kontroversi yang lebih luas. Masih banyak orang meyakini Amir sebagai nasionalis, terbingkai dalam pemikiran nasionalis revolusioner, nasionalis Marxis, nasionalis sosialis radikal, dan demokrat.

*“Perjuangan yang kami adakan waktu ini hanya buat memberi koreksi kepada revolusi-revolusi kita. Jadi tidak berubah sama sekali. Revolusi ini tidak berubah dari corak nasionalisnya, yang sebenarnya adalah revolusi merah putih, dan lagu kebangsaan kami tetap Indonesia Raya”.*²⁵

Amir ingin membuktikan ia tidak bermaksud mendirikan Negara Madiun sebagaimana yang ditakutkan pemerintah. Perjuangan yang dilakukan Amir tetap perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Namun, perjuangannya untuk perubahan dan meraih cita-cita rakyat Indonesia yang merdeka terhenti karena pertempuran senjata di Madiun dan pemerintah yang tidak mengacuhkan pernyataannya.

Untuk sebuah negara dan masyarakat yang merdeka, Amir melibatkan diri dalam berbagai pergerakan bersama sekian tokoh bangsa. Berbagai persinggungan pemikiran menjadi pijakan bagi negara Indonesia yang saat itu baru merdeka. Namun, pemikiran tentang strategi serta

24 Abu Hanifah, *Revolusi Memakan Anak Sendiri: Tragedi Amir Syarifuddin*, hlm.92

25 Abu Hanifah, *op.cit.*,hlm.99

kolaborasi tokoh-tokoh tersebut diwarnai perbedaan yang membawa Amir terjebak dalam perjuangannya seorang diri. Ia terjebak dalam peran sebagai pendiri bangsa, tetapi tetap memiliki kesempurnaan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Bagaimanapun, ia memiliki cara pandang sendiri terhadap individu, negara, dan strategi perjuangan.

Identitas Individu dalam Kacamata Amir

Indonesia bukan negara yang homogen. Hal ini lantaran Indonesia terlahir dari berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Orang-orang yang hidup di Indonesia terdiri atas berbagai perbedaan, bukan sekadar suku, melainkan juga agama, dan asal kedatangannya.

Identitas Keagamaan

Perkembangan agama merupakan hal penting dari peradaban manusia dan bangsa. Agama dapat menjadi teropong yang menggambarkan keadaan sebuah bangsa. Bahkan, beberapa negara didirikan berlandaskan ajaran agama tertentu. Di Indonesia, kendati agama Islam menjadi mayoritas, masalah agama kerap memicu konflik. Di masa awal kemerdekaan, bahkan terjadi perdebatan sengit di antara *founding fathers* mengenai dasar negara tentang tujuh kalimat dalam Piagam Jakarta.

Amir sendiri ialah seorang Muslim yang berpindah menjadi Kristen. Semasa menempuh pendidikan di Belanda, ia dikenal sebagai seorang Islam Liberal.²⁶ Amir mengetahui bahwa keberagaman Indonesia telah

²⁶ Jan Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, hlm.206

mengangkat berbagai pergerakan muncul ke permukaan. Gerakan-gerakan yang bukan semata-mata berdasar satu identitas nasional, melainkan juga pergerakan sebagai identitas pribadi—seperti gerakan yang membawa unsur agama.

Tahun 1928, misalnya, menjadi tahun bangkitnya berbagai gerakan perlawanan dan partai-partai. Pada saat itu, berdiri dan berkembang beberapa partai Islam—di antaranya PSII dan Persatuan Islam (yang sebelumnya telah berdiri pada 1923). Berdirinya partai bernapaskan keagamaan juga terjadi di lingkungan masyarakat Katolik sejak tahun 1923 dan diresmikan sebagai Partai Katolik Rakyat Indonesia pada Desember 1945.

Berdasarkan situasi di atas, Amir menulis sebuah artikel di majalah terbitan Gymnasium Harleem pada Februari 1928, yang menyatakan:

“Kita harus memperhitungkan diri kita sendiri sebagai penduduk asli Indonesia. Dengan begitu banyak kebangsaan. Dan belum lama ini terbentuk gerakan mempersatukan Islam. Dan kalau orang pribumi Kristen juga punya gagasan untuk mendirikan gerakan persatuan, maka nasionalisme akan tetap terdengar sebagai nada yang tidak ada artinya.”²⁷

Dari petikan tulisan Amir itu, tampak bahwa ia tidak menyetujui perjuangan yang selalu dibumbui dengan agama. Identitas individu secara pribadi merupakan identitas yang terpisah dari identitas kenegaraan. Nasionalisme, ia katakan, akan hilang jika perjuangan didasarkan pada gerakan yang berlandaskan hal-hal bersifat individualis

27 *Ibid.*

seperti agama. Amir mengharapkan bahwa kesatuan gerakan bukan dibentuk berdasar agama atau suku, tetapi berdasar satu hal yang sama. Ia mengusulkan kesepahaman sebagai penduduk pribumi sebagai identitas nasional.

Akan tetapi, pemikiran Amir tersebut agaknya sedikit berubah menjelang tahun 1941. Ia mulai melirik perlunya gerakan Kristen seperti gerakan Islam untuk tujuan bersama. Meskipun demikian, Amir tidak menyatakan keinginannya untuk mendirikan Partai Kristen; ada kegusaran baginya mengenai seberapa pentingnya Partai Kristen.

Amir mulai melihat bahwa identitas pribadi dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi landasan dalam pergerakan. Sosoknya sebagai pejuang dan Kristen yang taat membawa Amir pada ketenaran di kalangan misionaris dan kalangan Gereja Protestan di Indonesia masa itu. Amir menyampaikan buah pemikirannya kepada umat Kristen dalam Konferensi *Nederlands-Indische Zending's Bond* (NIZB) pada 21 Oktober 1941. Dalam konferensi tersebut, Amir mengajukan pokok-pokok pikirannya:

“Pertama, dalam pertabrakan Timur dan Barat ternyata Timur tidak hancur, melainkan semakin kuat dengan munculnya gerakan-gerakan yang mengungkapkan kekuatan sekuler. Bagaimana memberi suatu latar belakang transenden (n’eeuwigheidsachtergrond) terhadap gerakan-gerakan itu. Kedua, pentingnya suatu era Kristen dalam pergerakan nasional yang mengandung berbagai pertanyaan yang jawabannya tidak diberikan oleh Gereja : Dalam tujuan politiknya, orang-orang Kristen harus berdiri di samping orang-orang Islam dan para nasionalis lainnya. Mereka harus hidup dari visi dan ideologinya sendiri. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berdiam diri, kita harus menuntut tempat kita yang sah. Bagaimana ideologi kita ini dirumuskan? Bagaimana tempat kita itu ditentukan? Di mana letak

kekhasan visi Kristen?

Ketiga, seruan kepada oudere Kerken untuk bekerjasama memecahkan masalah-masalah yang ada dan yang akan muncul dalam kehidupan di Indonesia sehingga dari pengalaman Gereja Kristen petunjuk diberikan menyangkut soal-soal seperti kebebasan hati nurani, demokrasi yang murni dan yang semu, masalah-masalah sosial seperti pelayanan anak-anak. Keempat, seruan kepada gereja-gereja muda juga harus bekerja didalam kenyataan dunia Timur. Kelima, menyangkut pilihan apakah akan membentuk Partai Kristen tersendiri, atautkah dengan berusaha member pengaruh dalam pergerakan nasional yang ada, pembicara belum mempunyai jawaban, namun bersedia membantu jika dibutuhkan”²⁸

Pemikiran Amir tersebut dapat menunjukkan ia bermaksud menyampaikan konsep kerukunan antara Islam dan Kristen pada masa itu. Pemikiran kedua Amir menunjukkan adanya kesetaraan antara Islam dan Kristen dalam berjuang mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Di dalam kesetaraan itu, Amir jelas menyisipkan pesan bahwa orang Kristen mempunyai ciri dan ideologi tersendiri dalam perjuangan. Semua individu atau kelompok dari berbagai agama memiliki latar belakang dari ciri khas ideologinya untuk berjuang. Namun, yang terpenting dari itu ialah tujuannya untuk mencapai kemerdekaan.

Sementara itu, pokok pemikiran kedua bertautan dengan pokok pemikirannya yang kelima, di mana ia menyatakan bersedia membantu mendirikan partai berhaluan Kristenjika tenaganya dibutuhkan. Meskipun demikian, pada akhirnya Amir tidak terlibat dalam

28 Zakaria Ngelow, *op.cit.*, hlm.169-170

pembentukan partai. Ketidakterlibatan Amir sekaligus menjawab bahwa tidak ada ancaman yang berarti bagi kehidupan beragama pada masa itu. Ia jelas memilih tetap sebagai seorang nasionalis sekular sejak ia berada di Partindo.

Amir juga tidak menonjolkan identitas agamanya dalam kepentingan politik dan ia mampu menghargai identitas keagamaan pihak lain. Ia membangkitkan semangat perjuangan kemerdekaan di antara orang-orang dari berbagai kalangan agama. Lebih jauh lagi, Amir menghargai perbedaan dan keberadaan mayoritas penduduk Indonesia dan membangkitkan semangat melalui penghargaan terhadap perbedaan melalui pidatonya menjelang dua tahun perayaan kemerdekaan Indonesia, 15 Agustus 1947:

Saudara-saudara bangsa Indonesia di luar negeri dan kawan-kawan perjuangan bangsa Indonesia dari berbagai negara, yang mencintai perdamaian dan keadilan, telah banyak menyokong perjuangan kita, dan segala-galanya itu sangat membesarkan hari kita, dan segala-galanya itu sangat membesarkan hati kita. Untuk ini pemerintah dan rakyat Indonesia merasa syukur dan berterima kasih banyak”.

Kedudukan politik kita kuat, tetapi perjuangan kita tetap berat. Saudara-saudara bangsa Indonesia di luar negeri sedari dulu telah mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan kita sebagai “voorpost”, yang sangat berharga. Junjung tinggilah tradisi ini!

Teruskanlah perjuangan saudara-saudara, kokobkanlah persatuan dan organisasi antara saudara-saudara di luar negeri, mengabdikan kepada tujuan kita yang sama! Rayakanlah tanggal 17 Agustus yang akan datang sebagai hari besar nasional kita, pada waktu yang bersama-sama kita, dan dengan diikuti pula oleh hari Lebaran Idulfitri

yang suci itu, maka kami yakin pada hari-hari yang bahagia itu gabungan batin antara saudara-saudara dan kita ditanah air akan terasa lebih erat, sebagai satu bangsa dalam satu perjuangan, kearah satu tujuan.

Dalam menginjak tahun Republik yang ketiga ini, marilah kita bersama meneguhkan keyakinan bahwa kita pasti menang. Bersama-sama dengan kawan-kawan perjuangan kita di luar negeri, dari segala bangsa dan golongan di dunia, Republik Indonesia yang kita cintai itu akan berdiri tegak, lambang kesatuan dan demokrasi di Indonesia, untuk turut mempertegakkan perdamaian dan keadilan didunia. Merdeka. Tetap Merdeka!!²⁹

Amir menunjukkan bahwa seluruh organisasi dan perbedaan dalam masyarakat tidak menjadi pemecah, tetapi justru penyatu keragaman Indonesia. Nasionalisme yang dimaksud Amir ialah mencintai tanah air sebagai bangsa dengan satu tujuan mencapai kemenangan. Tidak hanya memperhatikan bentuk luarnya, tetapi lebih ke substansi untuk mengalahkan penjajahan.

Adalah suatu hal yang biasa bagi Amir ketika pergerakan disandingkan dengan nilai-nilai agama. Masing-masing individu memberi penghargaan terhadap perbedaan agama sebagai bentuk penghargaan demokrasi. Demokrasi juga menandakan setiap individu (warga negara) berhak berorganisasi demi tujuan kemerdekaan Indonesia.

Ketiga rantai pidato Amir di atas memberi petunjuk pada pernyataan bahwa setiap individu memiliki identitas yang bersifat pribadi berdasar keinginan diri sendiri. Setiap individu dapat mengekspresikan diri melalui identitasnya.

29 A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Agresi Militer I*, hlm.437

Individu memiliki kebebasan terhadap identitas, tetapi dapat diselaraskan dengan tujuan-tujuan yang sejalan dengan kepentingan negara. Hal demikian seperti menemukan *otherness* dalam *selfness*. Individu memiliki identitas yang dirasa dimiliki oleh dirinya sendiri, tetapi disisi lain juga harus mampu menemukan sisi *otherness* sebagai identitas dalam kehidupan bersama dengan individu lainnya.

Sikap terhadap Keragaman Etnik

Etnis Tionghoa memiliki masalah tersendiri lantaran keberadaan mereka di Indonesia. Para keturunan Tionghoa dianggap warga kelas dunia ataupun asing dibandingkan suku-suku lain di Indonesia. Pada masa pergerakan sebelum kemerdekaan Indonesia, Tionghoa dianggap tidak pantas turut serta dalam perjuangan karena lebih mengarah pada Republik Rakyat Cina.

Masalah keberadaan orang-orang Tionghoa di Indonesia telah lama menjadi sorotan bagi Amir.³⁰ Ia menegaskan, lantaran posisi orang Tionghoa sebagai warga negara, mereka harus ikut berjuang. Hal ini ia sampaikan melalui pidatonya dalam Kongres Gerindo di Palembang untuk merangkul keturunan Tionghoa terlibat dalam Gerindo:

“Kebangsaan seseorang tidak ditentukan oleh darah atau warna kulit atau bentuk muka, tetapi oleh tiga faktor : tujuan, nasib, dan keinginan. Orang-orang yang mempunyai persamaan tujuan, nasib, yang sama dan keinginan yang sama termasuk ke dalam satu bangsa”.³¹

30 Perhatian terhadap etnis Tionghoa mulai diperlihatkan Amir sejak ia mendirikan Gerindo

31 Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, hlm.164

Lebih lanjut, Amir memberikan contoh Swiss dan Amerika sebagai bangsa yang memiliki warga negara beragam ras.³² Melalui itu, Amir menegaskan bahwa Gerindo membuka pintu bagi kehadiran keturunan Tionghoa.

Sejarah keberadaan keturunan Tionghoa di Indonesia dimulai sejak terbukanya jalur perdagangan ke Nusantara. Orang-orang Tionghoa yang didominasi oleh pedagang dan pengrajin hokkian menikah dengan perempuan pribumi dan menjadi semakin banyak jumlahnya.³³ Keberadaan orang-orang Tionghoa sama lamanya dengan orang-orang Arab yang melakukan perdagangan ke Nusantara pada masa itu yang kemudian menetap di Indonesia.

Selama dari masa awal kedatangannya, orang Tionghoa dikenal sangat lihai berbisnis. Hal tersebutlah yang memicu lahirnya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 1912, untuk melindungi para pebisnis kalangan pribumi dan tidak melibatkan penduduk Tionghoa didalamnya.³⁴ Jika keberadaan SDI untuk melindungi pebisnis pribumi, gerakan BO yang telah muncul sebelumnya dan yang ditujukan sebagai cikal bakal gerakan nasionalis justru bahkan tidak menerima keturunan Tionghoa dalam gerakan tersebut.³⁵

Perkembangannya kemudian ialah para keturunan Tionghoa berusaha membangun gerakan bagi mereka sendiri. Salah satu gerakan yang menandakan etnis Tionghoa ialah Partai Tionghoa Indonesia yang berdiri pada 1931.

32 *Ibid.*

33 Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm.20

34 Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm.155

35 *Ibid.*

Hal tersebut didorong keadaan ras Tionghoa terhadap para pribumi yang tidak memiliki hubungan baik setelah masa protonasionalis. Ketika itu, keberadaan mereka ditolak oleh gerakan lainnya—seperti oleh Partai Nasional Indonesia. Penolakan tersebut lebih diarahkan kepada permasalahan keaslian ras dan *nation* para keturunan Tionghoa. Maka, pada awal 1930, Amir bersama Sanoesi Pane dan Yamin mengembangkan konsepsi *nation* Indonesia.³⁶

Konsep kebangsaan perihal kewarganegaraan yang Amir jadikan acuan ialah tempat lahir dan juga tujuan yang ingin dicapai. Konsep kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir ini juga disetujui oleh Tjipto Mangoenkoesoemo.³⁷ Pemikiran ini membuka asal muasal pemikiran konsep kewarganegaraan ini sebagai konsep *Ius Soli* yang pernah diungkapkan oleh Jean-Jacques Rousseau.

Permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia bukan hanya terkait dengan sedikitnya gerakan nasionalis yang menerima mereka sebagai anggota. Orang-orang Tionghoa juga sering menjadi sasaran kekejaman dan penjarahan baik pada masa Belanda dan Jepang. Salah satunya terjadi hampir dua tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pertengahan 1947, dimana Belanda melakukan Agresi Militer I. Saat itu, polisi Belanda menjarah orang-orang Tionghoa di daerah *vacuum of power*.³⁸

Walaupun, warga Tionghoa menjadi sasaran penjarahan, tetapi ada pula beberapa warga Tionghoa yang justru berpihak kepada Belanda. Keberpihakan ini tampak

36 Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm. 159

37 Patricius Mutiara Andalas, *Resensi: Amir Syarifuddin Antara Negara dan Revolusi*, Driyarkara Tahun XXII No.3, hlm.67

38 A.H.Nasution, *op.cit.*, hlm.360

seperti yang terjadi di Semarang, di mana banyak pemuda Tionghoa dipersenjatai oleh Belanda. Maka, selain sering menjadi korban, orang-orang Tionghoa juga hampir selalu mendapat stigma negatif sebagai bagian dari Belanda. Namun, Amir memusatkan pikiran pada upaya melindungi warga negara dari segala bentuk kejahatan. Ia menyatakan, *“Pendirian pemerintah republik untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta milik mereka. Di Indonesia tidak ada soal minoritas dan tidak ada ras diskriminasi (membeda-bedakan golongan bangsa)”*.³⁹

Amir juga menegaskan bahwa perlindungan secara khusus kepada masyarakat Tionghoa adalah aksi yang mampu mengakomodasi perbedaan kebangsaan dan etnis. Dalam usaha mengakomodasikan perbedaan kebangsaan dan etnis, mekanisme utama yang harus dilakukan ialah dengan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara.⁴⁰ Perlindungan ini mencakup kebebasan untuk berkumpul, beragama, berbicara, berorganisasi dan lainnya, karena semua kebebasan itu akan menjadi sia-sia tanpa perlindungan.⁴¹ Amir menunjukkan negara semestinya memandang warga negara didasarkan pada keinginan mereka menjadi bagian dari identitas nasional. Dengan demikian, negara harus siap melindungi individu/kelompok dari beragam asal usul—terutama meliputi hak asasinya.

39 A.H.Nasution, *op.cit.*, hlm.361

40 Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas*, hlm.38

41 *Ibid.*

Negara dan Peranannya dalam Perspektif Amir

Miriam Budiardjo memaparkan bahwa negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan. Dalam artian ini, negara secara langsung berintegrasi dengan masyarakat. Integrasi tersebut ditunjukkan dengan adanya penghargaan antara negara dan masyarakat. Dari sisi penghargaan masyarakat terhadap negara, masyarakat bersikap menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, seperti dengan menjunjung tinggi bahasa nasional dan kebersatuan membela negara. Sementara itu, dari sisi penghargaan negara terhadap masyarakat ialah negara bertugas melindungi masyarakat dan bekerjasama dengan masyarakat untuk mengentaskan segala bentuk penindasan terhadap masyarakat dan negara.

Bahasa Nasional sebagai Identitas Perlawanan Negara

Indonesia dikenal multietnis dengan jumlah suku bangsa hingga mencapai ribuan, dengan beragam bahasa. Perbedaan-perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Dibutuhkan usaha yang kuat untuk menyatukan visi misi sebagai warga negara Indonesia.

Keadaan negara yang sangat multikultur membawa satu pemikiran mengenai hal apa yang bisa digunakan sebagai pemersatu dalam interaksi dan pemersatu bangsa. Kita mengingat bahwa Sumpah Pemuda melahirkan satu ikrar bahwa bangsa Indonesia memiliki satu bahasa yakni bahasa Indonesia sebagai pemersatu di atas segala perbedaan tersebut. Adanya bahasa kesatuan sebagai bahasa bersama mendasari nasionalisme, atau setidaknya mampu

menciptakan semangat ke arah itu. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan untuk memahami bahasa sebagai landasan persatuan. Pertama, bahasa digunakan untuk berinteraksi. Kedua, bahasa digunakan untuk mengidentifikasi diri.

Amir mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga ia memberikan banyak perhatian pada permasalahan bahasa sebagai identitas bangsa. Sebagai bangsa yang belum merdeka sepenuhnya dan telah mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sangat penting baginya untuk mengamati perkembangan bahasa—di mana, itu artinya melanjutkan bagaimana bahasa tersebut diperbaiki dan digunakan. Ini berkaitan dengan hal yang lebih detail mengenai bunyi dan ejaan dalam bahasa yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik Indonesia pada masa itu.

Kepedulian Amir dan kesukaannya pada bahasa mulai tampak pada masa lahirnya Sumpah Pemuda. Selaku tokoh yang populer pada masa itu dan dengan keterlibatan dalam Sumpah Pemuda, ia diundang menjadi pembicara pada Kongres Bahasa Indonesia I. Dalam kongres di Solo pada 1938 tersebut, Amir menyampaikan makalah berjudul *“Adaptasi Kata-kata Asing dan Konsep-konsep ke Dalam Bahasa Indonesia”*.

Dalam makalah ini, Amir menekankan sepuluh poin penting bahasa bagi gerakan perjuangan dan pentingnya menjadi orang yang antikolonial (yang bukan berarti antibarat). Berikut merupakan sepuluh hal penting mengenai adaptasi kata-kata asing dalam bahasa Indonesia:

“Pertama, segala bahasa yang berevolusi suatu ketika akan menghadapi soal menyesuaikan kata dan faham asing ke bahasa sendiri. Kedua, Bahasa Indonesia saat ini

menghadapi soal itu dan terutama pada saat ini bahasa Indonesia menghadapi bahasa pengetahuan. Ketiga, dalam tiap bahasa, bahasa pengetahuan sebenarnya satu bahasa yang terasing dari bahasa umum dan merupakan satu bahasa golongan. Keempat, hal ini terang sekali dalam bahasa pengetahuan exact (dan juga dalam bahasa tidak exact, seperti dalam bahasa filosofis). Kelima, sebab pengetahuan di negeri Barat kebanyakan terikat dalam bahasa Greco-Rumawi maka disana bahasa pengetahuan terdiri atas bagian besar bersifat Greco Rumawi. Keenam, bahasa barat inilah yang menjadi perantaraan mengembangkan pengetahuan disebagian besar dunia sekarang. Ketujuh, oleh sebab itu, sudah ada suatu vocabolarium yang hampir internasional berisi kata-kata pengetahuan. Kata-kata pada masa ini terdapat didalam hampir segala bahasa yang di dalamnya ada bahasa pengetahuan. Kedelapan, membentuk bahasa pengetahuan didalam bahasa Indonesia dapat diambil vocabolarium internasional tadi. Kesembilan, mengambil kata-kata itu mesti dilakukan dengan memperhatikan aturan bunyi: kata-kata Indonesia. Kesepuluh, dalam melakukan hal ini mesti juga diperhatikan susunan kalimat asing yang masuk dalam bahasa Indonesia”⁴²

Bahasa merupakan wujud persatuan yang menunjukkan nasionalisme. Demikian pula dinyatakan Benedict Anderson dalam bab ketiga bukunya yang berjudul *Imagined Community* bahwa bahasa merupakan salah satu unsur pembentuk lahirnya nasionalisme. Urgensi bahasa dalam pemikiran nasionalisme ialah sebuah alat penyatu berbagai perbedaan dalam satu persamaan yang disebut *nation*. Pada masa itu, Indonesia dalam situasi mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan yang

42 Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin 75 Tahun*, Prisma: No. 12, Desember 1982, hlm.60

terpecah-pecah. Oleh karenanya, bahasa dapat menjadi alat penyatu.

Bangsa Indonesia pada masa perlawanan terhadap kolonialisme dikonstruksikan oleh para pemuda yang terlibat dalam Sumpah Pemuda sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam etnis. Semua etnis tersebut membentuk satu tanda identitas nasional, yakni bahasa.⁴³ Keterlibatan Amir yang aktif dalam perumusan Sumpah Pemuda bersama pemuda lainnya menunjukkan adanya pembentukan bangsa. Bahasa mampu menembus tembok pemisah antar kelompok yang berbatas agama, kelompok etnis, kelas sosial.

Perlunya pengembangan bahasa ialah buah pemikiran untuk mempercepat tumbuhnya kesadaran nasional. Sebagai hal yang dibentuk dan dikembangkan, pengembangan bahasa Indonesia juga boleh menyerap kata-kata dari bahasa lain, tetapi perlu disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Dari hal ini, kita menemukan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat pengembangan pengetahuan. Mempertahankan orisinalitas bentuk asli bahasa, seperti yang diungkapkan Amir—dengan kembali memperhatikan aturan-aturan berbahasa bukan ditujukan sebagai hal yang semata-mata mudah dicerna atau sekadar demi pengetahuan. Letak pentingnya mempertahankan orisinalitas bahasa yang ditekankan Amir sangat berkaitan dengan konteks di Indonesia saat itu. Di masa perjuangan, terdapat hal yang dinamakan eksklusivitas penggunaan bahasa Belanda dan Eropa. Eksklusivitas Belanda dan golongan Eropa terlihat

43 Katubi, *Bahasa dan Nasionalisme di Indonesia: Kajian Politik Bahasa*, Majalah Indonesia: No 2, Edisi XXXIV 2008, hlm.23

melalui penggunaan bahasa Belanda yang teramat sering dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam pidato-pidato.

Secara tidak langsung, penggunaan bahasa Belanda dan Eropa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat banyak mempengaruhi gaya bahasa Indonesia dan bahkan dapat menggeser posisi bahasa Indonesia itu sendiri sebagai simbol pemersatu bangsa. Yang ditunjukkan Amir melalui catatan-catatannya—perihal pentingnya mempertahankan keaslian dan aturan bunyi yang sesuai dengan ke-Indonesiaan. Baginya, hal itu dapat menjadi bentuk perlawanan terhadap bahasa Belanda dan Eropa.

Amir berusaha menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki ciri sendiri dan sekaligus menjadi identitas diri yang orisinal. Keterbukaan terhadap berbagai ilmu pengetahuan dan pengaruh-pengaruh lain dapat diterima dengan melakukan penyaringan demi perkembangan bahasa sebagai identifikasi diri. Oleh karenanya, sangat perlu pengembangan penyerapan bahasa asing yang disesuaikan dengan bahasa Indonesia.

Amir menyadari bahwa bahasa sebagai identifikasi diri bukan sekadar tutur kata biasa, melainkan juga terkait hal-hal politis untuk mempertahankan identitas nasional. Dengan mempertahankan keaslian dan memperhatikan aturan bunyi dalam suatu bahasa, kita menutup kemungkinan terjadi pemerkosaan identitas nasional melalui bahasa. Bahasa bukan hal sepele, melainkan suatu hal yang sangat penting dan cukup rumit dalam pengembangan identitas sekaligus menjadi simbol perlawanan identitas.

Keberadaan bahasa nasional di tengah bahasa asing menjadi simbol pertarungan politik nasional. Seperti yang diungkapkan Amir, bahasa lain dapat membantu

pengembangan pengetahuan bangsa Indonesia—di mana bahasa juga digunakan untuk membela kepentingan nasional. Bahasa nasional bukan sekadar berfungsi untuk mempermudah komunikasi, tetapi bahasa juga menyimpan berbagai pertimbangan politik. Lebih lanjut menurut Ben Anderson, bahasa Indonesia harus dikembangkan sebagai aspirasi Indonesia itu sendiri.⁴⁴ Maka dari itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan sebuah cara berpikir dalam membawa aspirasi kenegaraan.

Negara yang menetapkan dan memiliki bahasa nasional menjadi negara yang memberikan identitas utuh bagi masyarakatnya. Kesatuan identitas menciptakan negara pada kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa tersebut bukan lagi semata-mata gabungan berdasarkan suku, agama dan etnis. Bukan pula dimaknai sebagai himpunan keragaman kultural dan etnis, melainkan sebagai persatuan yang diciptakan dari keragaman.⁴⁵ Persatuan menandakan hilangnya sekat pembeda yang sebelumnya mengacu pada nilai-nilai kultural.

Kepedulian Amir terhadap bahasa tentu tidak hadir secara kebetulan. Selama berada di Belanda, perguruan Gymnasium Leiden—tempat Amir belajar—mengutamakan program belajar bahasa. Pada tahun pertama, dari 33 jam waktu belajar dalam seminggu, 16 jam dialokasikan untuk program belajar bahasa dan dinaikkan menjadi 19 jam pada tahun keempat.⁴⁶ Bahasa yang dipelajari Amir antara lain Belanda, Perancis, Latin,

44 Benedict Anderson, *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*, hlm.266

45 Sindhunata, *Politik Kebangsaan dan Keadilan Sosial*, hlm.82

46 Jacques Leclerc, *loc.cit.*, hlm.60

Yunani Kuno, Jerman, dan Inggris.⁴⁷ Dari program belajar di Gymnasium Leiden, jelas bahwa bahasa memiliki peranan sangat penting dan mengembangkan khazanah pemikiran Amir.

Negara Melawan Imperialisme dan Kolonialisme

Kolonialisme adalah upaya penindasan yang biasanya diawali dengan kepentingan ekonomi. Kepentingan ini merujuk pada imperialisme kemudian beralih menjadi penjajahan politik terkait penguasaan pemerintahan negara. Tidak bisa dipungkiri, pembacaan kolonialisme dari sisi sosialisme merupakan sebuah kenyataan di mana terjadinya sebuah kolonisasi menandakan adanya perbudakan.⁴⁸

Sementara itu, tujuan imperialisme lebih mengacu pada pengerukan sumber kekayaan wilayah atau negara lain. Kekhasan sebuah rezim imperialis ialah adanya negara yang lebih berkuasa untuk memeralat negara lain demi mencapai tujuannya.⁴⁹ Hal ini ditandai dengan adanya keinginan menjadi bangsa penguasa dunia, seperti yang dulu sempat dilakukan Jepang. Oleh karena imperialisme dapat pula mengarah pada masalah rasisme.

Amir bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Abu Hanifah, dan lainnya merupakan tokoh yang turut dalam perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Perjuangan Amir secara nyata dimulai sejak kepulangannya ke Indonesia. Demikian

47 Jacques Leclerc, *op.cit.*, hlm.60-61

48 Andi Achdian, *Tentang Kolonialisme: Multatuli dan Pemikirannya*, Driyarkara Tahun XXII No.3, hlm.3

49 J. Verkuyl, *Ketegangan Antara Imperialisme dan Kolonialisme Barat dan Zending Pada Masa Politik Kolonial Etis*, hlm.12

pula ketika ia menjabat sebagai perdana menteri yang berusaha memperjuangkan Perjanjian Linggarjati dan mengadakan perlawanan dengan Belanda.

Perjanjian Linggarjati dilatarbelakangi masuknya pasukan *Netherlands-Indies Civil Administration* (NICA) ke Indonesia. Pelaksanaan sebuah perjanjian merupakan strategi diplomasi dalam menyelesaikan masalah dengan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Strategi diplomasi merupakan pilihan Sjahrir dan Amir selaku dua orang yang menduduki peranan penting di pemerintahan. Langkah ini tidak disetujui oleh Tan Malaka, sehingga berakibat pada Peristiwa Juli 1946. Walaupun terdapat peristiwa politik yang mengganggu, diplomasi melalui Perjanjian Linggarjati tetap dilaksanakan.

Perjanjian tersebut membawa dampak cukup serius bagi pergolakan perjuangan sehingga menimbulkan berbagai pro dan kontra.⁵⁰ Tidak adanya pengakuan secara *de jure* dan adanya wilayah strategis yang justru ditempati Belanda menjadi keluhan atas terjadinya perjanjian tersebut. Akibat dari peristiwa ini, Sjahrir mengundurkan diri dan digantikan Amir. Amir lantas membangun kabinet dengan merangkul semua partai termasuk Masjumi. Dalam pembentukan kabinetnya, Amir menyampaikan pidato:

“Republik bersedia menerima susunan tertinggi (super structure) dalam pemerintahan peralihan, yang hanya menyelenggarakan kepentingan-kepentingan bersama sedang hal-hal khusus mengenai Republik akan diurus Republik sendiri. Kekuasaan de facto Republik yang telah diakui dalam naskah Linggarjati tak dapat ditawar-

50 Sampai sekarang masih terdapat catatan persetujuan Sjahrir dan Sukarno mengenai terjadinya perjanjian ini.

tawar lagi".⁵¹

Konteks pemerintahan Amir berada pada situasi tegang pasca Perjanjian Linggarjati. Amir bersikap tegas setelah perjanjian tersebut disepakati di mana tidak boleh ada penawaran lebih lanjut. Namun, selanjutnya Belanda melanggar perjanjian dengan membuat penawaran untuk membentuk badan kepolisian bersama guna menjaga ketertiban umum daerah Republik. Badan kepolisian tersebut diusulkan terdiri atas polisi dari pihak Belanda dan Indonesia. Namun, Amir tidak menyetujui karena penjagaan oleh pihak Belanda tersebut dianggap merugikan Indonesia.

Menanggapi konflik yang berkepanjangan tersebut, Indonesia masih tetap berjuang mendapatkan kemerdekaan penuh. Oleh karena itu, Amir tetap meminta keterlibatan rakyat secara langsung dalam perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara. Keinginannya tersebut ia sampaikan pada pidato tanggal 10 Oktober 1947:

"Pekerjaan yang pertama-tama kita lakukan dalam revolusi ialah memperkuat kedudukan kita sebagai Republik dan menyempurnakan organisasi kita, sehingga kalau timbul reaksi kita sudah mempunyai organisasi yang baik dan tenaga yang cukup.

Didalam perjuangan demikian tidak bisa kita mencapai sekaligus tujuan kita yang penghabisan, melainkan mesti kita bagi-bagi perjuangan dalam beberapa tingkat, sedangkan tiap tingkat itu mesti mempunyai tujuan yang tertentu. Itulah sebabnya yang pertama kita mesti capai ialah organisasi negara yang utuh dan tenaga didalam penyusunan negara kita. Hal yang demikian

51 A.H.Nasution, *op. cit.*, hlm.48-49

mesti disambung pula dengan pengakuan organisasi itu dari luar, sehingga mudah mendapat tempat yang nyata itu, baik didalam dunia internasional. Tempat yang nyata itu, baik didalam hubungan sehari-hari maupun didalam pikiran orang, sehingga ucapan Republik Indonesia itu menggambarkan suatu kenyataan riil. Itulah pekerjaan kita sebelum Linggajati. Tercapailah maksud itu, sehingga waktu serangan Belanda mulai, maka dunia merasa bahwa serangan itu merupakan aksi politik terhadap daerah yang otonom.

Didalam manifestatie destrictieve krachten (tenaga perusak) yang didalam tiap revolusi kita jumpai dan yang tidak boleh jadi anasir gerakan nasionalisme, sebab hendak merusak apa yang dianggap asing didalam badan bangsa itu, didalam timbulnya gerakan perusak itu, hingga gerakan demikian itu jarang menjadi demikian besarnya dibandingkan dengan gerakan pembangunan.

Mengerahkan rakyat tidak boleh tidak mesti berarti membangunkan tendenzen dan kehendak diantara rakyat yang menjadi motor untuk rakyat itu sendiri. Hal ini dapat kita kerjakan dengan dua dasar, yaitu dengan menghidupkan dan sekalipun melaksanakan dua prinsip, yaitu demokrasi baru dan keadilan sosial. Hal ini tidak dapat kita laksanakan sekaligus sebagai einddodel, tapi kita laksanakan dengan bertingkat-tingkat. Dalam garis dasarnya mesti kita capai tingkatan, di mana rakyat merasa turut bertanggungjawab dan turut memimpin gerakan anti Belanda ini. Dan seterusnya mereka mesti merasa dan yakin, bahwa kita bersama-sama suka dan berusaha menggentengkan penderitaannya dan mencari jalan untuk menambah keamanan hidup⁵².

Pada akhirnya, revolusi dianggap merupakan jalan untuk mengakhiri konflik. Menurut Amir, revolusi sebagai

52 A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan: Perang Gerilya Semesta I*, hlm.8-9

upaya mencapai perubahan dan pembebasan bisa datang dari masyarakat sendiri sebagai penggerak. Dalam revolusi versi Amir, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mempertahankan negara sehingga tampak bahwa negara itu benar-benar ada dan dilihat oleh seluruh dunia.

Setelah kedua tahap revolusi tersebut selesai, Amir menegaskan bahwa terdapat dua prinsip penting kehidupan bernegara yakni keadilan sosial dan demokrasi. Demokrasi dalam sebuah negara banyak ditunjukkan Amir terkait masalah individu; bagaimana ia berhak atas identitas pribadinya, seperti agama dan etnis, tetapi tetap harus menjunjung identitas kebangsaannya.

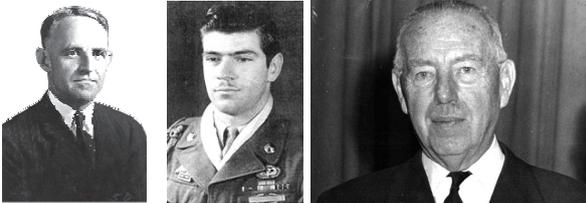
Sementara, keadilan sosial semakin ditegaskan Amir melalui ajakannya bersama seluruh masyarakat untuk duduk sama rata dalam menanggung beban maupun mendapatkan kegembiraan. Adanya ajakan kebersamaan dalam segala situasi ini mengarahkan pada keadaan masyarakat yang tanpa jurang pemisah. Masyarakat dalam pandangan negara menjadi sama rata dan berjuang demi negara pula.

Akan tetapi, konflik tidak kunjung selesai kendati telah melibatkan PBB dan menarik perhatian internasional. Agresi militer telah dihentikan, tetapi kesepakatan mengenai kemerdekaan Indonesia belum tuntas. Belanda masih bersikeras untuk kembali menjajah Indonesia. Berbagai tuntutan dilayangkan pihak Belanda kepada pemerintah Indonesia. Tuntutan Belanda tersebut membawa pada Perundingan Renville yang ditengahi oleh KTN. Pada pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Renville, Amir selaku perdana menteri Indonesia, menyampaikan pidato sebagai berikut:

“Republik Indonesia merasa lega dan senang, bahwa perkelahian dan pembunuhan dikepulauan ini harus dihentikan. Dalam pada itu kami kecewa, bahwa usul-usul mengenai gencatan-gencatan senjata yang dikemukakan Komisi pada waktu-waktu yang lalu, yang telah diterima oleh Republik, dianggap tidak dapat diterima oleh pihak Belanda. Tentulah kami kecewa, bahwa usul-usul Belanda, atas nama tercapai persetujuan, jauh selisihnya dengan apa yang kami harapkan dari sugesti-sugesti Komisi. Meskipun demikian, kami menerima gencatan senjata ini karena yakin akan senantiasa bertambahnya kerjasama dari pemerintah Nederland. Kami berniat untuk menjalankan persetujuan ini dengan kerjasama yang jujur dan dengan kehendak yang kuat untuk melihat dijalankannya gencatan senjata itu dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya.

Kami melakukan ini dengan pengertian penuh bahwa perundingan-perundingan politik akan dimulai dengan segera, dan dengan kepuasan bahwa pihak Belanda dan kami telah bersetuju bahwa penyelesaian politik harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang menjadi dasar Serikat Bangsa-Bangsa, dan dengan jalan demokrasi sebenar-benarnya.

Kalau saja boleh menyebut pikiran-pikiran yang semula dinyatakan pada kami oleh Dr. Graham, pemimpin delegasi Amerika, maka gencatan senjata dan prinsip yang disetujui hari ini mengandung pula arti ditinggalkannya jalan perkelahian dan kekerasan, dan diambilnya jalan demokrasi.



Inilah semangat yang terkandung oleh Republik ketika menandatangani naskah-naskah yang penting ini. Dalam

semangat inilah Republik mendekati perundingan-perundingan politik, dan dengan semangat itu pula kami akan mendekati Komisi dan pihak Belanda, dengan harapan yang teguh bahwa kedua pihak itu akan membantu kami untuk menyatakan pendirian kami dengan aman dan demokratis, dengan tidak merugikan atau dirugikan, sebagai imbalan pendirian dan pendapat golongan politik di Indonesia.

Saya terutama mengemukakan hal itu, karena nyata bahwa demokrasi tergantung pada syarat-syarat yang lebih luas lagi daripada tergantung pada kesempatan kesempatan ekonomi dan alam, pada soal kecil tetapi penting, pada persediaan kertas yang dapat kami gunakan untuk menerangkan kepada rakyat kami pikiran-pikiran dan keinginan kami, pada kesempatan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan diseluruh kepulauan ini, di mana kami memupuk rasa saling mengerti dan kesukaan membantu rencana politik dan ekonomi kami.

Jaminan akan adanya kerjasama Republik kearah terdapatnya penyelesaian politik, saya rasa sudah termasuk dalam konsesi kami dengan tercapainya persetujuan hari ini. Kami harapkan kami dapat segera menyatakan dengan semangat penyokong kami dengan jalan perundingan yang aman, dengan jalan pertimbangan dan putusan. Ini bisa terjadi dengan anjuran politik dan dengan menerangkan kepada penyokong-penyokong kami diseluruh kepulauan ini akan pentingnya organisasi dan jalan-jalan demokrasi, dan akan pentingnya prinsip-prinsip politik yang telah disetujui.

Kami tahu, bahwa politik ini, yaitu satu-satunya politik yang selaras dengan persetujuan hari ini, akan mendapat sokongan sepenuhnya dari Komisi. Kami duga ini akan merupakan percobaan bagi kejujuran dan kerjasama kedua pihak, dan kami menunggu bantuan segera dari Nederland untuk mengatasi banyak kesukaran praktis

*yang ada dijalan kami”.*⁵³

Pelaksanaan Perjanjian Renville berlanjut menjadi hujatan karena tidak membuahkan hasil dalam gencatan senjata dan justru semakin mempersempit wilayah Indonesia. Amir kehilangan kekuatan tanpa ada dukungan untuk menghadapi orang-orang yang berseberangan dengan dirinya, sehingga memilih mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri.

Mundurinya Amir dari ranah pemerintahan membawanya pada perlawanan terhadap pemerintahan selanjutnya dalam kabinet Hatta. Amir mendirikan FDR yang kemudian menyatu dengan PKI. Keberadaan Amir di PKI membawanya pada peristiwa Madiun 1948.



Selama menjalankan oposisi terhadap pemerintah, Amir menyampaikan beberapa pidato mengenai pilihan politik setelah tidak lagi memegang kekuasaan di Republik.

53 Antara, *Renville Principle*, hlm.27-29

Dalam salah satu pidatonya, ia mengungkapkan dirinya sebagai seorang komunis dan menjelaskan perihal kesalahan haluan politik yang ia jalani sebelum kedatangan Musso ke Indonesia.

“..... pokok pangkal kesalahan politik yang kita lakukan terletak pada Manifesto Politik Pemerintah tanggal 1 Nopember 1945 yang kemudian menelorkan Naskah Linggajati dan Persetujuan Renville, dan lain-lainnya. Isi dari manifesto tersebut ialah pengakuan, bahwa “mau tidak mau kita mesti hidup didalam lingkungan pengaruh kekuasaan imperialisme Inggris dan Amerika. Kita berpendapat, bahwa sistem ekonomi imperialis belum bisa kita bongkar dengan segera, bahwa kita belum bisa mewujudkan satu sistem perekonomian seperti yang kita harapkan. Oleh karenanya kita terpaksa harus mengembalikan perusahaan-perusahaan kepada kaum modal.

Perhitungan politik di atas adalah salah. Revolusi kita adalah revolusi istimewa. Segera setelah kita proklamirkan kemerdekaan, segala alat-alat negara dan alat-alat perekonomian telah kita rampas, tetapi kemudian karena kesalahan yang kita buat pada tanggal 1 Nopember 1945 itu, sebagian yang telah ada ditangan kita, kita lepaskan kembali. Terutama bagi kaum komunis politik ini adalah politik yang salah. Kaum komunis semestinya konsekuen, tidak berkompromi dengan pihak musuh”⁵⁴

Pidato itu disampaikan Amir pada kongres koreksi serikat buruh. Beberapa waktu kemudian, Amir juga menyampaikan pidato pada kongres di hadapanburuh pabrik gula:

“Kita batalkan semua kompromi itu setelah kita akui kesalahan-kesalahan kita. Ini berarti perang! Kalau saya

54 A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Pemberontakan PKI 1948*, op.cit.,hlm.210

sekarang anti Renville dan anti Linggarjati, itu bukan karena Belanda melanggarnya, tetapi karena prinsipil politik itu salah. Juga kalau Belanda jujur menepati persetujuan-persetujuan tersebut, kita tetap menolaknya. Kita sekarang harus berjuang seperti kaum komunis Yunani, kaum komunis Tiongkok, yaitu konsekuen anti imperialisme. Kita tidak mau kemerdekaan seperti negeri Nehru”.⁵⁵

Kedua pidato Amir tersebut disampaikan saat ia masih bekerjasama dengan Musso dalam PKI. Pada pidato di atas dua hal ditunjukkan oleh Amir, yakni satu hal berseberangan, sementara satu hal lainnya tetap konsisten. Hal pertama yang berseberangan ialah pernyataan ketidaksetujuan Amir atas Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Kendati menyatakan tidak setuju, ia tetap terlibat dalam perundingan. Pada penandatanganan Perjanjian Linggarjati, Amir menyatakan ketidaksetujuan yang kemudian membuat ia pecah kongsi dengan Sjahrir. Namun, ketika ia menjabat sebagai perdana menteri, ia menyatakan keinginannya untuk melaksanakan perjanjian Linggarjati.

Kedua, hal yang konsisten ialah ia menentang kolonisasi terhadap Indonesia oleh Belanda. Konsekuensi antiimperialisme menjadi harga mahal dalam perjuangan Amir. Ia tetap menunjukkan perlawanan terhadap penjajahan sama seperti yang ia usung selama menjabat sebagai perdana menteri.

Amir menyalahkan langkahnya dalam perjuangan diplomasi dan usaha meminta dukungan internasional yang selama ini telah ia lakukan. Melalui pidatonya dalam

⁵⁵ *Ibid.*

penandatanganan Perjanjian Renville, secara jelas ia menyatakan kekecewaan terhadap KTN dan Belanda. Amir kecewa terhadap Belanda karena berbagai perundingan didominasi tuntutan dari Belanda bahkan dalam pelaksanaannya, Belanda melanggar apa yang telah disepakati. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya agresi militer lanjutan pada Desember 1948. Sementara itu kekecewaan Amir pada pihak penengah—KTN—terutama Amerika, ialah karena usaha yang dikerahkan Amerika dalam perundingan tidak maksimal dan cenderung memihak kepada Belanda.

Kekecewaan tersebut membawa Amir pada keputusan menjadi oposisi. Amir meninggalkan jalan diplomasi dan memilih melawan dan menyerang dengan “jalan lain” yang disampaikan Amir lewat pidatonya pada 17 Juli 1947. Langkah tersebut, disampaikan pula melalui pidato pengakuannya saat mendapatkan bantuan Belanda, ia menyatakan keinginannya mengubah arus politik defensif menjadi ofensif.

Amir tampaknya tidak lagi setuju terhadap posisi menerima kemerdekaan secara formal seperti yang dialami India. India dinyatakan merdeka, tetapi kekuatan kolonial tidak keluar dari negara tersebut. Amir sedang menuju sebuah kemerdekaan yang nyata, menjadi bangsa dan negara sendiri. Hal tersebut tampak dalam setiap pidato Amir yang menyatakan penolakan terhadap berlangsungnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Meski pada beberapa hal Amir tampak tidak konsisten karena perubahan jalan meraih kemerdekaan, ia tetap konsisten pada nasionalisme antikolonial.

Selanjutnya, mengenai dosa-dosa politik Amir (versi Amir sendiri) merupakan sebab-akibat kesadaran yang tidak

muncul sedari dulu. Amir menunjukkan diri sedang terbawa arus dengan cara-cara orang di sekitarnya. Kemudian ia sendiri terbawa arus kedatangan Muso yang memiliki cara pandang berperang untuk mencapai kemerdekaan.

Pidato-pidato Amir menunjukkan sisi sosialisme dan nilai-nilai nasionalisme sekalipun ia memilih mengakhiri diplomasi menuju konfrontasi. Hal ini dapat kita lihat dari sisi ekonomi dan penjagaan aset-aset nasional yang diserukan Amir sebagai dasar pembentuk kesejahteraan ekonomi. Dalam kongres koreksi serikat buruh, Amir juga menyampaikan harapannya supaya terwujud perekonomian yang memakmurkan semua lapisan masyarakat.

Tujuan sosialisme diarahkan pada masalah kekayaan dan ekonomi. Hal ini menunjukkan perjuangan sosialisme sebagai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Hal ini sangat erat kaitannya dengan upaya menjaga sumber-sumber ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Kolonialisme dan imperialisme dianggap akan menghabiskan kekayaan yang seharusnya diberikan negara kepada rakyat.

Pidato Amir pada Kongres Buruh Gula menyatakan secara jelas posisi dan keinginannya agar bangsa Indonesia berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme merupakan hal yang menghambat tercapainya kemerdekaan Indonesia. Dalam perspektif sosialisme, kolonialisme dan imperialisme bukan sekadar pencurian kekayaan, melainkan juga tindakan perbudakan yang menempatkan individu sebagai budak miskin.

Dengan perspektif demikian, keberadaan negara adalah untuk melindungi individu dan memberikan

kehidupan yang lebih baik melalui kesejahteraan ekonomi. Negara merupakan penjaga semua sumber ekonomi untuk disalurkan kepada masyarakat. Sementara itu, adanya penjajahan membelenggu negara dalam ekonomi imperialisme Inggris dan Amerika yang dibuktikan dengan dilepaskannya perusahaan-perusahaan pada pemilik modal. Padahal menurut Amir, perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya berada di tangan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada para buruh.

Sebagaimana dinyatakan Amir dalam pidatonya, perekonomian yang diimpikannya bagi bangsa Indonesia belum terwujud. Alat-alat negara dan perekonomian yang dahulu dikuasai penjajah seharusnya diambil negara dan perusahaan-perusahaan yang telah dikuasai tidak seharusnya dikembalikan kepada kaum modal. Dengan menyebutkan juga kaum modal, berarti bagi Amir yang terjadi bukan hanya masalah penjajahan wilayah, melainkan juga penjajahan ekonomi dan bisnis.

Dalam hal ini, kaum modal bukan berarti Belanda selaku pihak yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kaum modal dapat berasal dari para pribumi sendiri, atau bahkan individu atau kelompok yang berasal negara lain. Penekanan kelompok kaum modal di sini menunjukkan kekuasaan kemudian terletak pada masalah ekonomi yang mampu menciptakan sistem kerja penindasan yang akan merugikan para buruh dan petani.

Dalam pandangannya, bagi Amir masalah ekonomi pada sebuah negara sangat penting untuk dikaji. Masalah sumber-sumber apa yang harus diberikan kepada negara, kaum modal/pasar, buruh dan petani merupakan masalah politik dari sisi ekonomi. Amir berusaha mengembalikan

sumber daya kepada negara dengan merefleksikan revolusi yang telah dijalankan selama ini.

Kenyataannya adalah revolusi yang berkeadilan sosial dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tidak tercapai karena keterlibatan para kelas pekerja—sebagai pihak yang paling diutamakan kesejahteraannya—masih rendah. Kepemilikan bersama melalui negara merupakan salah satu jalan yang mampu melahirkan keadilan sosial. Namun kenyataannya, revolusi belum selesai, buruh baru saja bergerak.

Amir telah meninggalkan kenangan dalam pidatonya saat ia menyatakan keinginan menciptakan masyarakat egaliter dan distribusi yang adil. Ia menunjukkan dua sisi kekhasan dalam sosialisme. Sosialisme memiliki dua sisi, yaitu penekanan pada aspek ekonomi dan internasional.⁵⁶Kedua aspek ini saling berkaitan. Negara harus memperhatikan sumber-sumber ekonomi dan berhati-hati terhadap imperialisme internasional seperti Amerika dan Inggris.

Kajiannya tidak berhenti di sana. Melalui berbagai hal yang telah dilakukan, Amir menunjukkan keinginan terbentuknya sebuah negara merdeka dengan nasionalisme kebangsaan yang didukung oleh demokrasi serta gaya hidup negara dan masyarakat sosialis. Dalam pidatonya mengenai kehidupan bernegara, yang disampaikan pada 10 Oktober 1947, ia menyatakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat didasarkan pada dua prinsip, yakni demokrasi dan keadilan sosial tidak melulu bentuk negara.

56 Winardi, *Kapitalisme versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, hlm.181

Hal ini juga tampak pada pidatonya pada 2 Desember 1947 melalui radio:

“Bahwa dengan agresi Belanda, pelita kemerdekaan yang sudah bersinar akan tetap bersinar, bukan saja bagi rakyat kita di daerah Republik, tetapi juga bagi mereka yang sementara waktu dijajah kembali sebagai “aksi polisionil” Belanda itu, dan bagi mereka di luar daerah Republik yang sampai sekarang masih memandangi Republik kita sebagai sumber pergerakan kemerdekaan Indonesia, lambang kemenangan revolusi kita.

Kami yakin atas satu hal, perjuangan untuk Republik Indonesia satu, dan tidak dapat dipecah-pecahkan. Republik kita adalah gabungan tenaga perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sesempurna-sempurnanya. Dengan hilangnya Republik ini akan hilang gabungan itu dan 100 negara boneka tidak akan dapat menggantikannya.

Komite Indonesia Serikat yang diketuai oleh Hussein Jayadiningrat bersama RVD Belanda memperingati penerangannya melalui alat-alat penyiaran Belanda. Kementerian Penerangan RI memperingatkan kepada rakyat, agar jangan sampai tertipu oleh interpretasi (tafsiran) perkataan “demokrasi” oleh Belanda, sebagai mereka lakukan dalam penjajahan masa lampau.

Jika komite itu memang hendak melakukan demokrasi yang sebenar-benarnya, dengan lain perkataan demokrasi yang dilaksanakan dengan tidak menggunakan bayonet dan tank, maka tujuan mereka tidak bertentangan dengan tujuan Republik Indonesia sendiri.

Apakah Indonesia akan berbentuk federal atau negara kesatuan, hal ini semata-mata tergantung kepada niat bangsa Indonesia yang sebenarnya. Selama dua tahun bangsa Indonesia mempertahankan Republiknya atas dasar negara kesatuan, tetapi jika pada satu saat keinginan untuk federasi menjadi terbesar, maka pasti negara Indonesia tidak akan terlepas dari bentuk federasi.

Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah menindas keinginan rakyat untuk mempunyai pemerintah Republik atas dasar federasi, tetapi keinginan ini harus timbul dari sebagian besar penduduknya. Hal yang terpenting ialah menjaga kemerdekaan Indonesia di belakang harus terbebas dari pemerintah jajahan Belanda.

Didaerah-daerah pendudukan Belanda pun timbul demonstrasi-demonstrasi yang menentang gerakan "federasi" Belanda, seperti demonstrasi pemuda-pemuda di Bandung tanggal 16 Desember 1947, yang akhirnya dengan kekuatan senjata dibubarkan oleh Belanda. Tetapi Belanda bekerja terus melakukan balkanisasi".⁵⁷

Dengan adanya demokrasi, akan tercipta pemerintahan atas nama rakyat dan semua kedudukan masyarakat menjadi setara tanpa harus menciptakan sekat minoritas, mayoritas, agama, etnis. Dengan demikian, terwujud keadilan sosial yang didukung oleh penjagaan sumber-sumber ekonomi oleh negara. Sisi lain kemunculan demokrasi dalam pemikiran Amir memiliki hubungan erat dengan sosialisme. Demokrasi pada penganut sosialisme demokrat merupakan sebuah cara untuk mewujudkan sosialisme.⁵⁸

Strategi Perjuangan: Hegemoni melalui Partai Revolusioner

Kepulauan Amir ke Indonesia diisi dengan keterlibatannya di PNI, Partindo, Gerindo dan Partai Sosialis. Masuk dan bergabung dalam sebuah partai menunjukkan idealisme seorang Amir. Ketiga partai di atas, kecuali PNI, merupakan partai yang dalam pendiriannya

57 A.H.Nasution, *Perang Sekitar Kemerdekaan Jilid VI: Perang Gerilya Semesta I, op.cit.*, hlm.21-22

58 Ign. Gatut Saksono, *Neoliberalisme vs Sosialisme*, hlm.10

terkena campur tangan Amir dan dikenal memiliki idealisme kiri seperti Gerindo dan Partai Sosialis.

Amir memikat orang-orang untuk tergabung dalam partai melalui pidato-pidato yang ia sampaikan. Asisten penasihat untuk urusan pribumi, G.F. Pijper, pada 1932 menyatakan, “Amir itu seorang orator berbakat. Dia mengekspresikan diri dengan jelas dan mengkaji tema-tema yang diuraikannya secara jelas menyeluruh. Dengan tempramen revolusionernya, dia menguasai publik dan memukau audiensnya”.⁵⁹

Kemampuan seseorang menarik orang lain mengikuti partainya—bahkan sampai memiliki pengikut—bisa dianggap sebagai strategi hegemoni. Strategi hegemoni ini yang membuat beberapa orang berpikir sama dengan Amir. Mereka yang terpengaruh dengan pemikiran Amir menjadi pengikut. Hal ini dipertegas dengan keberadaan Amir dalam gerakan bawah tanah selama di Gerindo.

Gerakan bawah tanah merupakan gerakan radikal yang mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk berpikir sama dengan pembawa gerakan.⁶⁰ Maka partai pada masa itu bukan sekadar tempat untuk memiliki jabatan, tetapi juga wadah pertarungan *isme-isme* dalam membangun sebuah gerakan perjuangan dan negara. Antonio Gramsci menyatakan hegemoni pemikiran ini sebagai hegemoni sipil yang dilakukan oleh partai revolusioner.⁶¹ Melalui hegemoni, partai membentuk kesadaran masyarakat untuk

59 Van Klinken, *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen*, hlm.186-187

60 Gerakan bawah tanah dilakukan Amir pada masa kedatangan Jepang. Gerakan tersebut dilakukan untuk menghadang berkembangnya fasisme yang dibawa oleh Jepang

61 Ign. Gatut Saksono, *Op.Cit.*, hlm.14

menerima pemikiran-pemikiran dari partai, misalnya mengenai masalah buruh dan kelas sosial. Hal ini lebih lanjut membawa kelompok buruh pada kepemimpinan intelektual dan moral sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.⁶²

Legitimasi hegemoni kemudian didukung oleh adanya sistem demokrasi. Seperti yang telah dinyatakan di atas, demokrasi adalah alat mewujudkan sosialisme. Karena itu, demokrasi menjadi sangat penting diaplikasikan dengan jalan seperti yang tertuang dalam beberapa pidato Amir. Sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu menjadi celah melegitimasi para pendukung sosialisme untuk menyebarkan pemikiran dan menunjukkan eksistensi dengan keberadaan massa.

***Collecting Mass* melalui Kebebasan Pers**

Pemerintahan setelah proklamasi kemerdekaan berbentuk kabinet Presidensil yang ditetapkan pada 2 September 1945. Pada kabinet pertama ini, Amir memegang jabatan sebagai menteri penerangan. Pada masa itu, pers berkembang pesat sebagai alat perlawanan. Terkadang pers menjadi “masalah” bagi pemerintah karena kerap memprovokasi masyarakat. Pada masa ia menjabat sebagai menteri penerangan, Amir mengambil kebijakan mengeluarkan Maklumat Menteri Penerangan mengenai kebebasan pers yang menegaskan:

“Bahwa fikiran masyarakat umum atau pendapat umum merupakan sendi landasan pemerintah yang menjamin berkedaulatan rakyat, sehingga media yang tidak

62 *Ibid.*

*merdeka tidak mungkin menyatakan fikiran masyarakat, melainkan hanya fikiran beberapa orang berkuasa saja. Itulah sebabnya ditegaskan bahwa asas yang dianut oleh pemerintah ialah media harus merdeka”.*⁶³

Kemerdekaan pers yang dinyatakan Amir sebagai buah pemikiran dari masyarakat merupakan hal yang penting menjadi masukan dalam berjalannya pemerintahan. Pernyataan pemikiran masyarakat ialah suatu tanda adanya demokrasi melalui adanya kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Pers merupakan pilar yang menyelamatkan demokrasi dan mencegah adanya absolutisme dalam pemerintahan. Thomas Jefferson menyatakan, “pers semacam itu (bebas/merdeka) adalah penjamin terbaik dari kebebasan”.⁶⁴ Dengan adanya pers, masyarakat dapat memberikan buah pemikiran yang mampu menentukan kebijakan dan memberikan sumbangsih pada komunitas politiknya selaku bangsa.

Melalui pers, Amir membangun integrasi kecintaan terhadap bangsa dan negara yang bertujuan menghapuskan penjajahan. Keberadaan pers menjadi sangat penting untuk menyebarkan berbagai peristiwa serta sebab akibat dari peristiwa tersebut. Terutama, demi mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang yang siap bertempur demi bangsa dan negara.

Pers sebagai media saluran pengetahuan kepada masyarakat sekaligus juga sebagai mekanisme politik yang

63 Erman Anom, *Kebijakan dan Sistem Media Era Soekarno*, hlm.8
Tulisan ini dipublikasikan pada Aceh International Conference 2011,
diakses melalui acehpublication.com pada 20 Desember 2012, hlm.8

64 John W Jhonson, *Peran Media Bebas*, Majalah Demokrasi Amerika
2008, hlm.56

memberi ruang kepada masyarakat untuk memahami fenomena yang terjadi. Keberadaan pers ialah taktik untuk menggiring opini masyarakat ke dalam sebuah perspektif sehingga mencapai visi dan misi yang sama. Visi misi ini sangat penting keberadaannya dalam perjuangan, utamanya untuk membangkitkan berbagai perlawanan.

Maka, sembari memimpin partai, Amir memberikan perhatian pada masalah-masalah bahasa, pers, komunikasi, pendidikan politik, dan pendidikan sekolah. Selain berkiprah pada harian yang merupakan bagian dari gerakannya, Amir juga membantu Adam Malik mendirikan kantor berita *Antara* pada 13 Desember 1937.⁶⁵ Harian ini kemudian berkembang dan menjadi salah satu harian yang selalu memberitakan peristiwa revolusi pada masa itu. Selain itu, Amir juga terlibat dalam majalah *Pujangga Baru* yang terkenal pada masanya dan merupakan cikal bakal koreksi ejaan pada bahasa Indonesia.⁶⁶

Gagasan Internasional dalam Membangun Negara

Ide antipenjajahan dan pemikiran universal yang disebarkan Amir tidak lepas dari asal muasal kebangkitan nasionalisme. Nasikun menuliskan:

“Nasionalisme, tidak peduli dengan aneka ragam wujud penampilannya, pada dasarnya lahir sebagai respons terhadap kekuatan-kekuatan yang sejak Revolusi Perancis secara revolusioner mentransformasikan Imperium Barat menjadi emperium yang sepanjang abad-abad sesudah berhasil meluaskan penetrasinya hampir keseluruhan sudut permukaan bumi. Melalui kolonialisme sebagai suatu

65 Jacques Leclerc, *op.cit.*, hlm.67

66 Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin: Antara Negara dan Revolusi*, *op.cit.*, hlm.15

*sekolah demokrasi didalam masyarakat diluar Eropa menampilkan diri pertama-tama dan terutama sebagai suatu gerakan kemerdekaan dari dominasi kolonial, dan baru kemudian menjadi gerakan demokrasi”.*⁶⁷

Tidak dipungkiri Amir, nasionalisme lahir dari fenomena internasional seperti Revolusi Perancis. Oleh karenanya, dalam upaya pengembangan gagasan nasionalisme, tak jarang Amir menjadikan negara-negara Eropa sebagai contoh kebangkitan nasionalisme.

Atas dasar itu, Amir kemudian memiliki pandangan dan pemikiran secara internasional, di mana ia tidak melihat sebuah peristiwa secara lokal, tetapi juga global. Amir meyakini bahwa keadaan internasional sangat berpengaruh pada usaha perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi Hukum Internasional atas undangan PPPI, 10 November 1938. Ia menyatakan, “dunia selalu menuju satu tatanan universal”.⁶⁸

Tatanan universal yang dimaksud Amir ialah asas yang digunakan mayoritas negara-negara dunia. Pemikiran Amir yang sangat antifasis memberikan pilihan demokrasi atau fasis. Pemikiran tersebut lahir dari Perang Dunia I yang berlangsung sepanjang tahun 1914-1918 antara Sekutu yang merupakan kubu demokrasi (seperti Amerika) dan Blok Sentral yang diisi oleh negara-negara fasis (Jepang dan Jerman).

Sifat internasionalisme juga sangat melekat dalam sosialisme.⁶⁹ Amir melihat perang yang terjadi bukan

67 Nasikun, *Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk*, hlm.3

68 Jacques Leclerc, *op.cit.*, hlm.68

69 Edward Hallet Carr, *Nasionalisme Dalam Politik Internasional*,

sekadar persoalan uji kekuatan, tetapi sebagai *isme* yang menguasai dunia dan mengatur bagaimana tatanan dunia. Amir mencegah tumbuhnya fasisme pada masa sebelum Perang Dunia II dengan formasi sama, Sekutu (Kubu Demokrasi) dan Blok Sentral (Kubu Fasis).

Salah satu cara menguatkan demokrasi dan meredam kekuatan fasis secara lebih luas ialah dengan mendirikan harian *Kebangoenan*. Harian ini didirikan oleh Amir, Sanoesi Pane dan Liem Koen Hian dengan dasar pengembangan pemikiran demokrasi di Asia Tenggara.⁷⁰ Sebagai bagian dari Gerindo, *Kebangoenan* coba menjelaskan bahwa kedatangan Jepang bukan sebagai pembebas Asia, tetapi lebih menjadi penjajah yang kejam.⁷¹

Selain memiliki berita harian, Gerindo sebagai gerakan militan juga memiliki majalah yang diberi nama *Toedjoean Rakjat*, terbit pada awal 1938. Terbitan pertama *Toedjoean Rakjat* diisi dengan sebuah artikel Amir mengenai masalah Munich dan Spanyol. Dalam tulisannya, Amir menekankan pentingnya menyingkirkan demokrasi borjuasi.⁷²

Selain masalah demokrasi melawan fasisme, Amir juga menyampaikan pandangannya mengenai masalah ekonomi. Imperialisme Amerika dan Inggris membuktikan ada ketergantungan yang mengakibatkan tidak majunya perekonomian rakyat. Para buruh dan petani menjadi sendi-sendi perekonomian terkecil dalam pandangan Amir. Menurut Amir, selama ini mereka menjadi korban

hlm.31

70 Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin 75 Tahun*, Prisma: No. 12, Desember 1982, *op.cit.*,hlm.62

71 Jacques Leclerc, *op.cit.*,hlm.63

72 Jacques Leclerc, *op.cit.*,hlm.66

penindasan yang harus disejahterakan. Dengan demikian, selama kekuatan ekonomi hanya dipegang oleh para imperialis dan kaum modal, tidak akan ada kesejahteraan secara merata.

Pertahanan Nasional dan Diplomasi Internasional dalam Upaya Mencapai Kemerdekaan

Konflik Linggarjati berlanjut. Amir menolak permintaan Belanda untuk mengadakan aksi polisionil. Belanda tidak menerima keputusan yang diambil oleh Amir; dan pada tanggal 20 Juli 1947, melakukan agresi militer ke berbagai daerah Indonesia. Agresi ini baru berakhir pada 4 Agustus 1947. Agresi ini mengganggu stabilitas pemerintahan dan menimbulkan korban di berbagai daerah. Peningkatan kegiatan tentara Belanda tersebut berakibat pada reaksi dari pasukan Republik, sehingga terjadi pertempuran. Keadaan demikian dimanfaatkan Belanda untuk menduduki hampir seluruh wilayah *gendarmerie*.⁷³ Hal ini mendorong Amir berpidato pada tanggal 17 Juli 1947:

Pada jam ini, saya berdiri dimuka corong radio untuk menjelaskan beberapa hal. Republik telah menyatakan sikap damainya untuk menyelesaikan persoalan Indonesia-Belanda. Tuntutan politik Belanda lima soal, kita setuju lebih dari separoh, tetapi kita jelaskan, bahwa tentang hal gendarmerie bersama Republik tetap bersikap seperti dahulu.

Nota kita tertanggal 8 Juli yang lalu telah membawa kelegaan. Tetapi pihak Belanda tetap menuntut tentang memasukkan gendarmerienya ke dalam Republik. Malahan pertama kali resmi oleh pemerintah Belanda dinyatakan kemungkinan

73 A.H.Nasution, *op.cit.*, hlm.78

penyelesaian soal Indonesia Belanda dengan jalan kekerasan.

Pemerintah Republik tidak putus asa.

Sesudah kelihatan sikap Belanda tetap kaku, maka diputuskan supaya saya sebagai perdana menteri berangkat ke Jakarta untuk mencoba mendapat penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda ini. Sementara itu pihak Belanda mulai mengemukakan tuntutan baru:

Penghentian permusuhan di fronten, kata mereka.

Penghentian blockade makanan, kata mereka.

Penghentian perusakan yang dilakukan, kata mereka.

Pemerintah Republik telah menyatakan kehendak baiknya. Pangkat Gubernur kita tiadakan dengan rasa berat.

Kita sedia menolong daerah Malino dengan beras, seperti baru diumumkan Menteri Kemakmuran.

Sudah beberapa usaha kita, sebab kita mengerti kehendak Belanda, sebab kita tetap suka menghargai pihak Belanda.

Sesampai saya di Jakarta pada 14 Juli yang lalu, terus diadakan perundingan dengan Belanda sampai dua kali. Pada perundingan itu, yang disaksikan Wakil Perdana Menteri Setiadjud dan Dr. Leimena dan kedua kalinya juga oleh Dr. Gani, maka sudah banyak yang dapat mendekatkan Belanda kepada kita, dan kami merasa kaku itu mulai hilang.

“Pemerintah Republik menyerukan dengan sangat kepada dewan keamanan dari UNO, untuk mempercepat penyelesaian perselisihan dengan mengirimkan sebuah komisi terdiri dari wakil-wakil negara yang dipilih oleh Dewan Keamanan ke Republik guna menyaksikan dengan mata kepala sendiri keadaan yang sebenarnya di Republik.

Sesudah pertukaran beberapa banyak nota antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik, di mana

Pemerintah Republik telah menguraikan pendiriannya terhadap penghentian permusuhan dapat dimengerti (diterangkan), bahwa Pemerintah Republik dapat menyetujui usul dalam sidang Dewan Keamanan, yang ditunjang oleh beberapa fihak, untuk bersama-sama menghentikan pertempuran-pertempuran dengan perjanjian, bahwa sebagai permulaan untuk menghentikan itu, serta mencapai secara efektif, masing-masing tentara dari kedua belah fihak harus ditarik kembali di belakang garis demarkasi yang ditetapkan pada bulan Oktober 1946.

Supaya dapat dijamin jangan sampai perdamaian terancam, dilanggar, atau ada perbuatan serangan lagi, maka adalah perlu Dewan Keamanan memerintahkan kepada negeri Belanda untuk menarik kembali tentaranya dari daerah seluruh kepulauan Indonesia”⁷⁴

Pidato Amir tersebut menuai hasil. Sehari setelah itu, Belanda menghentikan agresi. Pertikaian antara Belanda dan Indonesia berusaha diselesaikan dengan bantuan KTN.

Amir menyambut baik keterlibatan ketiga negara asing dalam penyelesaian persengketaan tersebut dan mendukung kemerdekaan bagi Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemikiran yang memandang adanya hubungan sosial, politik, dan ekonomi antarnegara. Hal ini dapat dilihat dari pidato yang ia sampaikan pada 4 Agustus 1947:

“Kita diserang oleh Belanda dan dalam dunia minggu kita telah menangkis segala serangan Belanda secara yang belum pernah kita lakukan. Belanda menyerang Republik kita, lambang persatuan dan kemerdekaan kita. Mereka mengadakan perang kolonial, walaupun mereka katakan hanya mengadakan tindakan kepolisian saja.

74 A.H.Nasution, *op. cit.*, hlm.321-322

Betapa hebatnya serangan Belanda dan propaganda dalam menjelekkkan Republik di luar negeri! Berpuluh-puluh pahlawan kita menjadi serangan Belanda dari udara, darat, dan laut. Pengorbanan pemuda-pemuda dan prajurit-prajurit itu tidak sia-sia dan kami telah mengetahui di mana dan dipasukan mana saudara-saudara berada, dan juga nama saudara-saudara. Terima kasih dan hormat dari pemerintah Republik kepada pahlawan-pahlawan kita di garis depan itu!

Orang Belanda mengatakan, bahwa Republik hidup seakan-akan dalam impian, tetapi orang-orang yang bertanggungjawab di Nederland lupa mengetahui kenyataan-kenyataan. Belanda sekarang mengadakan perang kolonial justru di tahun 1947, pada waktu dunia telah mempunyai PBB dan diwaktu Inggris menjanjikan menyerahkan seluruh kekuasaannya di India kepada bangsa India sendiri. Tetapi untung di tahun 1947 ini dunia telah lebih maju dan Dewan Keamanan PBB memutuskan supaya permusuhan dihentikan dengan segera”.⁷⁵

Pada pidato yang disampaikan melalui radio tersebut, tampak bahwa Amir mendukung keberadaan PBB sebagai suatu badan yang mampu mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Namun—sekalipun bantuan penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda dibantu oleh Dewan Keamanan PBB—bukan berarti masalah telah selesai. Amir tetap meminta keterlibatan rakyat secara langsung dalam perjuangan kemerdekaan bangsa.

Urgensi Peran Buruh dan Petani dalam Revolusi

Dalam melaksanakan revolusi, Amir telah membentuk

75 A.H.Nasution, *op.cit.*,hlm.330-331

beragam strategi—dari yang tidak menggunakan kekerasan hingga menggunakan kekerasan. Dalam berbagai strategi itu, Amir turut meminta keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, melalui pidato-pidatonya, terlihat bagaimana Amir menaruh perhatian khusus pada masalah buruh dan petani sebagai kelas pekerja yang harus diperjuangkan dan ikut berjuang. Sebagaimana yang tertulis dalam pidato Amir pada Kongres Koreksi Serikat Buruh:

Diwaktu yang dulu, kita tidak percaya kepada kekuatan kaum buruh. Kesalahan lain ialah tidak menimbulkan Partai Komunis, sebaliknya kita memberi kesempatan PSI. Partai Sosialis kita dirikan, sedangkan Partai Komunis kita kesampingkan. Mulai dari tanggal 1 Nopember itu berturut-turut kita lakukan kesalahan dalam lapangan politik pertanian, politik perburuhan, perekonomian, kemiliteran dan lainnya. Semboyan yang memberikan keuntungan kepada kaum tani dan buruh tidak kita pakai dan tidak kita jalankan.

Kita akui dan saya sebagai seorang komunis akui, telah menjalankan kesalahan dalam lapangan politik dan saya berjanji tidak akan menjalankan politik salah lagi, dan akan saya perbaiki selanjutnya. Kesalahan di Eropa Barat, seperti di negeri-negeri Belanda, Inggris, Perancis, menjalankan kesalahan serupa di Indonesia, seperti politik Unie verband, Commonwealth, dan Union Francaise. Kepada saudara-saudara saya permaklumkan disini, bahwa baru baru ini CPN telah meninggalkan politik Unie-verbandnya dan telah membenarkan politik PKI kita".⁷⁶

Pidato tersebut disebut sebagai hasil refleksi revolusi yang dijalankan Amir. Ia menginginkan peran buruh dan

76 A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Pemberontakan PKI 1948*, loc.cit.,hlm.210

petani harus diperkuat dalam revolusi. Sebuah kesalahan revolusi terjadi akibat pertimbangan politik yang dijalankan tidak mengakomodasi kepentingan buruh sebagai tonggak perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.

Keberadaan buruh dan petani sebagai sebuah kelas sosial menjadi penting bagi Amir. Demikian pula sosialisme yang berusaha menyamaratakan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran Amir dengan prinsip sosialisme tampak dalam hal-hal yang meliputi pembentukan serikat buruh. Ia memperhatikan nasib buruh yang tampak dari beberapa pidatonya di atas.

Perhatian Amir akan pentingnya nasib para buruh merupakan hal yang menyerupai gerakan *The Social Gospel* yang memperhatikan kehidupan para budak dan perempuan.⁷⁷ Gerakan *The Social Gospel* dalam kehidupan Kristen diarahkan untuk memperbaiki kehidupan para kelas pekerja tanpa harus mengandalkan kekuatan fisik saja.⁷⁸ Perbedaannya, Amir mulai mengarah pada tindakan radikal dengan tujuan perbaikan nasib buruh yang sebenarnya tidak terlalu didukung oleh ajaran Kristen.

Dalam praktiknya, yang kemudian diinginkan Amir ialah mengusir penjajah dengan mengandalkan kekuatan rakyat dan kelas pekerja dan bukan lagi melalui jalur diplomasi. Hal ini berkaitan dengan posisi para buruh

77 Dalam ajaran Kristen kaul kemiskinan adalah merupakan sebuah saran kehidupan dengan cara melepas secara sukarela barang-barang dan harta seseorang dan kemudian melakukan pelayanan penuh terhadap Tuhan melalui kehidupan sehari dengan cara mengasihi sesama, memberikan harta kepada yang miskin, menjadi pelayan di gereja. Dalam perjanjian Baru, pada bagian Injil Kisah Para Rasul menunjukkan kehidupan Kristen dahulu diwarnai dengan kepemilikan bersama dan pelepasan hak milik pribadi.

78 Winardi, *op.cit.*, hlm.186

dan petani dalam perlawanan kolonialisasi terletak pada penghancuran sistem feodalisme—kondisi buruh-tuan yang sulit dihapuskan. Dengan masih berlakunya sistem tersebut, maka penjajahan tetap bertahan. Hal ini dibuktikan dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang menciptakan sistem birokrasi yang mendukung terciptanya feodalisme.⁷⁹

Pada kenyataannya, adanya sistem penindasan yang diciptakan oleh para kolonial menimbulkan kenyataan adanya pihak yang berkuasa (kaya) dan pihak yang sama sekali tidak berkuasa (miskin). Penindasan tidak hanya datang dari penjajah, tetapi juga dari masyarakat yang melakukan penjajahan terhadap sesamanya. Perjuangan bersama kaum buruh dan petani sebagai kelas pekerja menjadi perjuangan yang bertujuan merebut sumber-sumber ekonomi yang sebelumnya dikuasai oleh para kolonial atau mereka yang disebut sebagai tuan dan pemilik modal.

.....

Pemerintah menjawab bahwa keadaan damai akan tercipta, kalau penyelesaian politik sudah dapat dibereskan, dan segera akan dijalankan penghentian permusuhan umum (dari kedua belah pihak). Tapi kita kemukakan, barulah dapat dijalankan penghentian permusuhan itu, kalau Belanda suka menerimanya kita jalankan bersama-sama, sebab permusuhan itu juga ada dari kedua belah pihak.

Dengan penuh rasa tanggung jawab pemerintah menolak tuntutan Belanda itu.

Kita mengetahui apa yang akan menjadi akibatnya. Tapi pemerintah Republik beranggapan, bahwa kebenaran

79 Andi Achdian, *op.cit.*, hlm.7

dalam hal ini adalah pada fihaknya.

Kita suka damai, tapi damai dengan kebenaran. Kita mencari penyelesaian politik dengan damai, tapi dalam usaha ini dipersukar oleh fihak Belanda dengan tuntutan-tuntutan yang tidak berarti penyelesaian politik, dan tidak adil pula, sebab seolah-olah hanya fihak Republik yang bersalah.

Rakyat Indonesia!

Sekali lagi saya ucapkan: insyallah, bahwa keadaan sekarang ini sangat genting. Sikap fihak Belanda menunjukkan bahwa mereka akan melupakan jalan damai. Pemerintah Belanda telah mengucapkan kata-kata kekerasan. Marilah kita bersatu dalam menghadapi kekerasan Belanda itu. Marilah kita tetap waspada dan aman. Marilah kita menyusun tenaga kita. Kita tidak akan melupakan jalan lain”⁸⁰

Adapun Belanda bersikap tidak acuh dalam menanggapi pidato Amir. Belanda tetap menunjukkan keinginan menguasai Indonesia. Sikap Belanda yang demikian lama-kelamaan mematahkan keteguhan Amir dalam berdiplomasi. Amir mulai meminta keterlibatan rakyat dalam usaha meredakan perang yang terus menerus di berbagai daerah Indonesia dan kembali melawan Belanda—sebagaimana pidato yang disampaikan Amir melalui radio pada 21 Juli 1947:

“Dan kita sudah mengetahui resep perang kolonial.

Pertama, jelekkan nama rakyat daerah yang dilawan. Kedua, pecah belah rakyat itu. Ketiga, pisahkan pemimpinnnya dari rakyat. Demikian pula resep fihak Belanda sekarang. Bangsa Indonesia kena pengaruh Jepang, tidak berpandangan luas, sudah kena penyakit

80 A.H.Nasution, *op.cit.*,hlm.79-80

korupsi dan sebagainya, katanya. Belanda bukan perang melawan rakyat Indonesia, katanya. Dan akhirnya : pemerintah rakyat Indonesia dan pemimpinnya tidak baik, katanya. Sudah jemu kita mendengar cerita ini, tapi tidak akan ada seorang rakyat Indonesia akan masuk perangkap lagi. Pengalaman pahit di jaman jajahan. Belanda dan Jepang sudah cukup. Kita rakyat merdeka dan bersatu. Kita rakyat bernegara dan berpemerintah. Dan sebab itu, kita tidak mengakui dan mengetahui tindakan polisi dan negara lain didaerah kita. Kita hanya mengetahui, bahwa ada pertahanan nasional, kalau yang disebut polisi Belanda itu memasuki darah kita.

Salah perundingan akhir ini hanya satu soal yang belum dapat persetujuan bulat: urusan polisi (gendarmerie bersama). Yang diusulkan kepada kita ialah supaya kita menerima pasukan Belanda didaerah kita. Sepanjang pengetahuan kita soal keamanan dalam negara Republik adalah urusan Republik. Kita telah bersedia bekerja bersama-sama dalam pimpinan gendarmerie bersama ini. Tetapi memasukkan pasukan Belanda di daerah kita berarti meniadakan kekuasaan kita, sekurang-kurangnya mengurangi kuasa kita. Hal itu telah kita tolak. Inilah pokok perselisihan politik kita. Bukan cease fire, bukan urusan blockade makanan. Sebab kalau pada dewasa sekarang Republik dapat bertanya : Apa sebab ada blockade darat yang antara lain mempersukar masuknya tenunan dan obat ke pedalaman? Apa sebab pelabuhan-pelabuhan besar tidak segera dibuka untuk perdagangan bahan ekspor sejak dari dulu? Apa sebab angka tentara Belanda tidak dikurangi? Apa sebab Bogor, Krian, Sidoarjo, Mojokerto tidak dikembalikan? Apa sebab Belanda belum suka mengerjakan arti Linggarjati yang menyatakan bahwa daerah pendudukan dikembalikan "aanstonds". Daftar kita masih panjang, yang dikehendaki Belanda ialah perang kolonial. Untuk menegakkan kuasa jajahan kembali, walaupun dengan cara dan bentuk lain.

Dan bagi kita hanya ada satu jalan, mempertahankan kemerdekaan kita. Mempertahankan hak untuk terus memajukan negara kita. Marilah, rakyat Indonesia bersama-sama menggunakan segala tenaga, segala usaha seluruh rakyat mempertahankan kemerdekaan kita. Kita berjuang, kita berjuang terus, seluruh rakyat mengadakan pertahanan nasional, menyelenggarakan pertahanan rakyat. Segala lapisan, segala partai, pemudanya, wanitanya, tentaranya, seluruh rakyat saya menjalankan kewajiban kita: pertahanan nasional”⁸¹

Tidak hanya itu, Amir mencoba membakar semangat rakyat untuk melawan Belanda yang disampaikan Amir:

*“Kita akan melawan terus, sehingga Belanda merasa bosan dan tidak kuat memikul biaya lagi, sehingga dengan sendirinya mengangkat kakinya dari Indonesia. Lebih baik Belanda sedia lengkap barisan pemadam api”.*⁸²

Dilatarbelakangi ultimatum Belanda yang sebenarnya menginginkan gendarmerie bersama, namun pihak pemerintah dan masyarakat tidak menginginkan kekuasaan Belanda yang semakin besar. Belanda juga memberi tekanan kepada Indonesia dengan mempersiapkan 150.000 tentara sebagai simbol perlawanan”⁸³

Dalam pidato 21 Juli 1947 tersebut, perjuangan melawan kembalinya penjajahan perlu melibatkan seluruh rakyat—perempuan dan laki-laki, tua maupun muda, tentara maupun bukan tentara—sebagai pertahanan nasional. Seluruh kekuatan dikerahkan demi melawan kuasa imperialisme dan kolonialisme. Hal ini dikarenakan suatu perspektif—bahwa jika imperialisme dan kolonialisme

81 A.H.Nasution, *op.cit.*,hlm.111-112

82 A.H.Nasution, *op.cit.*,hlm.20

83 A.H.Nasution, *op.cit.*,hlm.15

berkuasa kembali, rakyat akan kehilangan kesejahteraannya. Karena itu, rakyat harus melawan.

Strategi perjuangan Amir dalam melawan kembalinya penjajahan melibatkan seluruh kekuatan masyarakat. Amir memandang, perlawanan yang hanya dalam bentuk kata-kata dan dilakukan oleh sebagian orang akan membuat Belanda semakin mudah menduduki kembali Indonesia—terutama melalui penaklukan wilayah per wilayah. Strategi Amir melawan kuasa asing menjadi nyata ketika Amir menyatakan adanya “jalan lain” dari jalan damai yang selama ini diusahakan. Jalan lain dari damai ialah sebuah pertempuran melawan Belanda dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pertahanan nasional.

Selama Amir menduduki jabatan sebagai menteri pertahanan dan perdana menteri, Amir memberi banyak perhatian pada keperluan pertahanan Indonesia. Amir memperkuat benteng pertahanan dengan memperbanyak jumlah tentara dan menyelenggarakan pendidikan politik tentara. Kebijakan tersebut didasarkan pada usaha melawan kembalinya para penjajah ke Indonesia.

Selain itu, Amir juga melakukan strategi diplomasi internasional. Diplomasi dilakukan dengan melibatkan peran negara asing dalam menangani konflik Indonesia dengan Belanda. Diplomasi internasional ini didukung oleh pemikiran Amir yang terbuka secara internasional yang juga menjadi salah satu strategi dalam perjuangan sosialisme.



Demi memenuhi diplomasi internasional, Amir membawa masalah agresi militer Belanda ini ke dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada 3 Agustus 1947. Pada sidang tersebut, Amir menyampaikan pidato yang secara langsung menuntut perhatian internasional agar mendukung kemerdekaan Indonesia:

“Pemerintah Republik menyerukan dengan sangat kepada dewan keamanan dari UNO, untuk mempercepat penyelesaian perselisihan dengan mengirimkan sebuah komisi terdiri dari wakil-wakil negara yang dipilih oleh Dewan Keamanan ke Republik guna menyaksikan dengan mata kepala sendiri keadaan yang sebenarnya di Republik.

Sesudah pertukaran beberapa banyak nota antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik, di mana Pemerintah Republik telah menguraikan pendiriannya terhadap penghentian permusuhan dapat dimengerti (diterangkan), bahwa Pemerintah Republik dapat menyetujui usul dalam sidang Dewan Keamanan, yang ditunjang oleh beberapa pihak, untuk bersama-

sama menghentikan pertempuran-pertempuran dengan perjanjian, bahwa sebagai permulaan untuk menghentikan itu, serta mencapai secara efektif, masing-masing tentara dari kedua belah pihak harus ditarik kembali di belakang garis demarkasi yang ditetapkan pada bulan Oktober 1946.

Supaya dapat dijamin jangan sampai perdamaian terancam, dilanggar, atau ada perbuatan serangan lagi, maka adalah perlu Dewan Keamanan memerintahkan kepada negeri Belanda untuk menarik kembali tentaranya dari daerah seluruh kepulauan Indonesia”⁸⁴

Pidato Amir tersebut menuai hasil. Sehari setelah itu, Belanda menghentikan agresi. Pertikaian antara Belanda dan Indonesia berusaha diselesaikan dengan bantuan KTN.

Amir menyambut baik keterlibatan ketiga negara asing dalam penyelesaian persengketaan tersebut dan mendukung kemerdekaan bagi Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemikiran yang memandang adanya hubungan sosial, politik, dan ekonomi antarnegara. Hal ini dapat dilihat dari pidato yang ia sampaikan pada 4 Agustus 1947:

“Kita diserang oleh Belanda dan dalam dunia minggu kita telah menangkis segala serangan Belanda secara yang belum pernah kita lakukan. Belanda menyerang Republik kita, lambang persatuan dan kemerdekaan kita. Mereka mengadakan perang kolonial, walaupun mereka katakan hanya mengadakan tindakan kepolisian saja.

Betapa hebatnya serangan Belanda dan propaganda dalam menjelekkkan Republik di luar negeri! Berpuluh-puluh pahlawan kita menjadi serangan Belanda dari udara, darat, dan laut. Pengorbanan pemuda-pemuda dan prajurit-prajurit itu tidak sia-sia dan kami telah

84 A.H.Nasution, *op. cit.*, hlm.321-322

mengetahui di mana dan dipasukan mana saudara-saudara berada, dan juga nama saudara-saudara. Terima kasih dan hormat dari pemerintah Republik kepada pahlawan-pahlawan kita di garis depan itu!

Orang Belanda mengatakan, bahwa Republik hidup seakan-akan dalam impian, tetapi orang-orang yang bertanggungjawab di Nederland lupa mengetahui kenyataan-kenyataan. Belanda sekarang mengadakan perang kolonial justru di tahun 1947, pada waktu dunia telah mempunyai PBB dan diwaktu Inggris menjanjikan menyerahkan seluruh kekuasaannya di India kepada bangsa India sendiri. Tetapi untung di tahun 1947 ini dunia telah lebih maju dan Dewan Keamanan PBB memutuskan supaya permusuhan dihentikan dengan segera”⁸⁵

Pada pidato yang disampaikan melalui radio tersebut, tampak bahwa Amir mendukung keberadaan PBB sebagai suatu badan yang mampu mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Namun—sekalipun bantuan penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda dibantu oleh Dewan Keamanan PBB—bukan berarti masalah telah selesai. Amir tetap meminta keterlibatan rakyat secara langsung dalam perjuangan kemerdekaan bangsa.

Urgensi Peran Buruh dan Petani dalam Revolusi

Dalam melaksanakan revolusi, Amir telah membentuk beragam strategi—dari yang tidak menggunakan kekerasan hingga menggunakan kekerasan. Dalam berbagai strategi itu, Amir turut meminta keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, melalui pidato-pidatonya, terlihat

85 A.H.Nasution, *op.cit.*,hlm.330-331

bagaimana Amir menaruh perhatian khusus pada masalah buruh dan petani sebagai kelas pekerja yang harus diperjuangkan dan ikut berjuang. Sebagaimana yang tertulis dalam pidato Amir pada Kongres Koreksi Serikat Buruh:

Diwaktu yang dulu, kita tidak percaya kepada kekuatan kaum buruh. Kesalahan lain ialah tidak menimbulkan Partai Komunis, sebaliknya kita memberi kesempatan PSI. Partai Sosialis kita dirikan, sedangkan Partai Komunis kita kesampingkan. Mulai dari tanggal 1 Nopember itu berturut-turut kita lakukan kesalahan dalam lapangan politik pertanian, politik perburuhan, perekonomian, kemiliteran dan lainnya. Semboyan yang memberikan keuntungan kepada kaum tani dan buruh tidak kita pakai dan tidak kita jalankan.

Kita akui dan saya sebagai seorang komunis akui, telah menjalankan kesalahan dalam lapangan politik dan saya berjanji tidak akan menjalankan politik salah lagi, dan akan saya perbaiki selanjutnya. Kesalahan di Eropa Barat, seperti di negeri-negeri Belanda, Inggris, Perancis, menjalankan kesalahan serupa di Indonesia, seperti politik Unie verband, Commonwealth, dan Union Francaise. Kepada saudara-saudara saya permaklumkan disini, bahwa baru baru ini CPN telah meninggalkan politik Unie-verbandnya dan telah membenarkan politik PKI kita”⁸⁶

Pidato tersebut disebut sebagai hasil refleksi revolusi yang dijalankan Amir. Ia menginginkan peran buruh dan petani harus diperkuat dalam revolusi. Sebuah kesalahan revolusi terjadi akibat pertimbangan politik yang dijalankan tidak mengakomodasi kepentingan buruh sebagai tonggak perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.

86 A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Pemberontakan PKI 1948*, loc.cit.,hlm.210

Keberadaan buruh dan petani sebagai sebuah kelas sosial menjadi penting bagi Amir. Demikian pula sosialisme yang berusaha menyamaratakan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran Amir dengan prinsip sosialisme tampak dalam hal-hal yang meliputi pembentukan serikat buruh. Ia memperhatikan nasib buruh yang tampak dari beberapa pidatonya di atas.

Perhatian Amir akan pentingnya nasib para buruh merupakan hal yang menyerupai gerakan *The Social Gospel* yang memperhatikan kehidupan para budak dan perempuan.⁸⁷ Gerakan *The Social Gospel* dalam kehidupan Kristen diarahkan untuk memperbaiki kehidupan para kelas pekerja tanpa harus mengandalkan kekuatan fisik saja.⁸⁸ Perbedaannya, Amir mulai mengarah pada tindakan radikal dengan tujuan perbaikan nasib buruh yang sebenarnya tidak terlalu didukung oleh ajaran Kristen.

Dalam praktiknya, yang kemudian diinginkan Amir ialah mengusir penjajah dengan mengandalkan kekuatan rakyat dan kelas pekerja dan bukan lagi melalui jalur diplomasi. Hal ini berkaitan dengan posisi para buruh dan petani dalam perlawanan kolonialisasi terletak pada penghancuran sistem feodalisme—kondisi buruh-tuan yang sulit dihapuskan. Dengan masih berlakunya sistem tersebut, maka penjajahan tetap bertahan. Hal ini dibuktikan dengan

87 Dalam ajaran Kristen kaul kemiskinan adalah merupakan sebuah saran kehidupan dengan cara melepas secara sukarela barang-barang dan harta seseorang dan kemudian melakukan pelayanan penuh terhadap Tuhan melalui kehidupan sehari dengan cara mengasihi sesama, memberikan harta kepada yang miskin, menjadi pelayan di gereja. Dalam perjanjian Baru, pada bagian Injil Kisah Para Rasul menunjukkan kehidupan Kristen dahulu diwarnai dengan kepemilikan bersama dan pelepasan hak milik pribadi.

88 Winardi, *op.cit.*, hlm.186

pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang menciptakan sistem birokrasi yang mendukung terciptanya feodalisme.⁸⁹

Pada kenyataannya, adanya sistem penindasan yang diciptakan oleh para kolonial menimbulkan kenyataan adanya pihak yang berkuasa (kaya) dan pihak yang sama sekali tidak berkuasa (miskin). Penindasan tidak hanya datang dari penjajah, tetapi juga dari masyarakat yang melakukan penjajahan terhadap sesamanya. Perjuangan bersama kaum buruh dan petani sebagai kelas pekerja menjadi perjuangan yang bertujuan merebut sumber-sumber ekonomi yang sebelumnya dikuasai oleh para kolonial atau mereka yang disebut sebagai tuan dan pemilik modal.

89 Andi Achdian, *op.cit.*, hlm.7

IV

Pemikiran Nasionalisme dari Sosok yang Terlupakan

Amir menjadi salah seorang yang terlupakan dalam sejarah bangsa. Ia semata-mata diingat karena peristiwa di mana ia mengakhiri hidupnya, Peristiwa Madiun 1948. Padahal, proses pencapaian pemikiran nasionalisme Amir telah jauh sebelumnya terakumulasi dari berbagai peristiwa dalam kehidupannya. Karena itu, seharusnya keterlibatannya dalam Peristiwa Madiun 1948 tidak lantas menjadi jalan untuk mengabaikan pemikirannya.

Titik awal pergulatan pemikiran terjadi saat ia memutuskan melanjutkan studi ke Leiden, Belanda. Pemikirannya terbentuk selama belajar di sana dan sepulangnya ke Indonesia, ia mengembangkannya dengan terlibat dalam organisasi di mana ia menuangkan pemikiran tersebut dalam perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara.

Kepulangan Amir ke Indonesia sekaligus mengawali sikap kontroversinya dengan pindah agama, pernikahan dengan perempuan dengan marga yang sama, dan posisinya dalam gerakan baru PKI pasca pemberontakan 1926-1927. Namun, itu hanya sebagian kecil dari cara berpikir Amir yang baru. Lebih lanjut pemikirannya dapat dilihat melalui

kepeduliannya terhadap masalah bahasa, pers, jurnalistik, kewarganegaraan, ekonomi, kehidupan bernegara, dan berbagai pertimbangan politik.

Pemikiran tersebut kemudian semakin berkembang ketika bertemu banyak orang dalam berbagai macam perkumpulan atau organisasi—Sukarno, Muhammad Yamin, Hatta, Abu Hanifah, A.K. Gani—untuk mendiskusikan berbagai problema di Indonesia bahkan dunia. Perkembangan pemikiran tersebut menginisiasi Amir dalam mendirikan organisasi dan partai sebagai bentuk perwakilan pemikirannya. Pemikiran-pemikiran tersebut juga dinyatakan dalam berbagai pengambilan keputusan politik ketika Amir menjabat sebagai menteri dan perdana menteri.

Keputusan Amir mendirikan gerakan sekaligus partai yang lebih radikal dari sebelumnya—FDR (kemudian dileburkan bersama PKI)—merupakan keputusan dari cara berpikir yang dipenuhi kekecewaan. Amir menaruh harapan pada diplomasi internasional khususnya Amerika, tetapi semuanya tidak terwujud. Setelahnya, Amir mengalami banyak kecaman dan menjadi korban intrik politik yang berusaha menyingkirkan para pemikir kiri. Kekecewaan dan kejatuhan dari kekuasaan membawa Amir pada cara berpikir yang jauh lebih liar sehingga mengantarkannya pada konflik angkatan bersenjata, dan terjebak mengakhiri hidup di sana.¹

Cerita mengenai perbuatan dan rangkaian pidato Amir yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya

1 Konflik Amir dengan angkatan bersenjata telah ada sejak ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

membawa pada kesimpulan bahwa Amir memiliki pemikiran nasionalisme sosial. Istilah ini—atau sosialisme nasional—berarti nasionalisme yang banyak dirangkai dengan sosialisme yang memiliki tujuan politik mengacu pada permasalahan ekonomi dan upaya pembentukan demokrasi massa.²

Hal tersebut ditunjukkan Amir dengan pandangannya tentang tiga hal. *Pertama*, kesamaan individu dalam setiap situasi. Amir berusaha menempatkan individu-individu pada garis kesejahteraan yang setara yang tentunya difasilitasi negara melalui keadilan sosial. Individu juga diajak ke dalam cara pikir agar masyarakat tidak terkotak-kotak pada kelas-kelas sosial—ia melakukannya dengan mendukung pembangkitan gerakan-gerakan buruh dan petani. Kebebasan identitas individu yang dituangkan dalam pergerakan tidak menjadi masalah selama sesuai dengan tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, mengenai posisi negara serta peranan negara dan masyarakat secara bersamaan. Amir merangkai kehidupan bernegara dan bernegara melalui pertimbangan demokrasi, keadilan sosial, dan pertahanan nasional, dan perlindungan terhadap masyarakat. Berkaitan dengan pertahanan, Amir bersikeras untuk menanamkan nilai bahwa tentara berfungsi sebagai pertahanan nasional dan pertahanan rakyat. Dalam konsep pertahanan nasional, secara jelas diputuskan Amir bahwa tentara adalah penjaga keamanan rakyat dan sebaiknya tidak ikut campur dalam

2 Edward Hallet Carr, Nasionalisme dalam Politik Internasional, hlm.31

masalah pemerintahan.

Negara melalui tentara bekerjasama dengan masyarakat untuk melawan kolonialisme dan imperialisme serta menjaga sumber-sumber ekonomi. Pemikiran menjaga kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat, menolak penguasaan asset-aset perusahaan besar kepada pemodal, perhatian kepada perjuangan pada buruh sebagai perjuangan kelas, dan cita-cita demokrasi yang berkeadilan sosial merupakan bangunan sebuah negara yang ingin dicapai Amir. Ia tidak hanya memikirkan masalah kemerdekaan negara secara fisik, tetapi substansi merdeka sebagai sebuah negara ke depannya.

Ketiga, ialah strategi dalam perjuangan. Penanaman nasionalisme dalam konteks penjajahan bukan sekadar nasionalisme demi mencapai kekuasaan baru sebagai sebuah negara. Amir juga menginginkan sebuah negara yang memiliki hubungan mapan dengan masyarakat. Kemapanan tersebut membawa hubungan negara dan masyarakat memiliki fungsi timbal balik untuk menjalankan kehidupan panjang sebagai negara yang penuh keberagaman.

Hubungan masyarakat dan negara yang mapan menjadi strategi dalam melawan kolonialisme. Demikian pula dengan adanya demokrasi yang memunculkan kebebasan pers—yang mampu menjadi alat mengumpulkan kekuatan masyarakat di mana opini dapat menjadi kekuatan dalam pertempuran. Amir memanfaatkan partai sebagai media penyaluran pemikiran berbangsa dan bernegara—mengenai apa yang harus diperjuangkan pada masa sekarang dan ke depannya.

Refleksi akhir dari strategi perjuangan Amir menunjukkan upaya serius dalam mengumpulkan kekuatan

buruh dan petani sebagai kelas pekerja demi melawan sistem kapitalisme dan imperialisme. Amir ingin membentuk massa sekaligus menyatakan upaya perbaikan kehidupan buruh dan petani sebagai kelompok yang tertindas.

Dalam realisasi menghadapi pertempuran, Amir juga mempengaruhi rakyat dengan tidak melakukan pembedaan laki-laki atau perempuan, tua-muda, agama dan suku apapun sebagai upaya membentuk perlawanan massa ikut bertempur melawan penjajahan. Amir memikirkan “jalan lain”, di mana konfrontasi dapat direalisasikan apabila diplomasi gagal dicapai. Maka dari itu, “jalan lain” bukan semata pertempuran antara negara yang biasanya diwakili melalui tentara sebagai benteng pertahanan, melainkan juga rakyat secara keseluruhan sebagai gerakan massa. Gerakan massa yang dibentuk Amir terlihat dari himbauannya agar negara mengambil sikap menjaga bahasa nasional dari pengaruh penjajahan.

Pemikiran nasionalisme ala Amir adalah buah gagasan kecintaan terhadap negara dan bangsa yang kompleks dan berjangka panjang. Prioritas utama menjadi bangsa dan negara adalah perlindungan atas kekayaan sumber daya alam sebagai sumber daya ekonomi negara dan manusia dari kolonialisme dan imperialisme. Dalam tatanan sosial, bagi Amir sangat penting memperhatikan buruh sebagai masyarakat yang harus dilepaskan dari penindasan sekaligus kekuatan dalam revolusi. Selanjutnya, penghargaan atas multikulturalisme Indonesia dan penjaminan hak asasi manusia menjadi kerangka berpikir Amir tentang nasionalisme dengan demokrasi sebagai perangkat perwujudannya.

Amir Sjarifoeddin di Mata Mereka

Jejak dan kesan Amir telah terpatri di dalam diri siapa pun yang mengenalnya. Pada masa mudanya, Amir memperdebatkan berbagai pergulatan pemikiran bersama teman-temannya di Kramat Jati 106. Setelah fase itu, ia menjadi sosok yang banyak terlibat dalam partai politik, pergerakan nasional, dan bidang pemerintahan. Keterlibatannya dalam banyak kegiatan tersebut membawanya pada berbagai jalinan hubungan dengan para pejuang semasanya. Hubungannya dengan para pejuang tersebut tidak selamanya berjalan mulus. Meskipun demikian, Amir tetap dikenal sebagai sosok pejuang yang kontroversial, membingungkan, tetapi hangat, dan bahkan bagi beberapa peneliti, Amir adalah sosok pejuang dengan pemikiran begitu brilian.

Abu Hanifah

Abu Hanifah telah mengenal Amir sejak mereka tinggal bersama pemuda lainnya di Kramat Jati 106. Namun, pidato Amir pada 23 September 1948 adalah dasar Abu Hanifah menyatakan bahwa Amir bukan seorang komunis fanatik yang sesungguhnya.

Menurutnya, Amir hanyalah seseorang yang terjebak dalam berbagai kekecewaan selama perjuangan politiknya. Sedari dulu, Amir merupakan sosok laki-laki yang brilian tetapi memiliki emosi yang meledak-ledak dan ambisius. Ketika mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri, Amir segera menjalin kerjasama dengan Musso. Ia tampak sangat mudah berpindah *partner* dan berbalik arah menyerang pemerintah atas pelaksanaan Perjanjian Renville padahal ia sendiri yang ikut menandatangani perjanjian

tersebut.

Abu Hanifah , *Revolusi Memakan Anak Sendiri: Tragedi Amir Syarifuddin*, Prisma: No. 8, Agustus 1977, hlm.99 - 100

Mohammad Hatta

Bagi Mohammad Hatta, Amir sangat sulit dipahami karena ia seorang komunis tetapi sekaligus sebagai sosok yang taat beragama. Mohammad Hatta sendiri pernah membantu melepaskan Amir dari eksekusi mati Jepang dengan dasar Amir adalah seorang Kristen yang taat. Namun kemudian Amir benar-benar ikut dalam Partai Komunis Indonesia bersama Muso setelah dia jatuh dari kedudukannya sebagai perdana menteri. Sosok Amir yang terpelajar di mata Hatta tidak bisa dilepaskan dari bible yang menjadi alat untuk meredakan amarah Amir atau menghentikan Amir ketika hendak memukul istrinya.

Z.Yasni& Hatta (ed), *Bung Hatta menjawab : wawancara Dr. Moh. Hatta dengan Dr. Z.Yasni*, halaman 3.

Sutan Sjahrir

Sjahrir dan Amir adalah duo sosialis yang memiliki kenangan terhadap orang-orang yang mengagumi kolaborasi mereka. Satu sama lain tentunya memiliki pandangan. Untuk Sjahrir, Amir memang seorang yang sosialis dan selalu berpikir perihal oportuniste politik. Sikap oportunistik tersebut yang kemudian membawa Amir pada kejatuhan.

Rudolf Mrazek, *Sjahrir : Politik dan Pengasingan di Indonesia.*, halaman 667.

Ali Sastroamidjojo

Ali mengenal Amir sejak keduanya berada di bawah naungan PNI; dan, mereka kembali dipertemukan di Partindo dan Gerindo. Pada masa-masa itu, Amir ialah sosok yang sangat ramah, pria yang sangat mencintai keluarga. Namun kemudian, Amir mengalami perubahan yang drastis. Amir yang dulu bersikap selayaknya seorang teman kemudian di belakangan hari menunjukkan tanda permusuhan. Istri Amir yang merupakan teman istri Ali sering menceritakan sikap temperamen dan kekasaran Amir.

Rudolf Mrazek, *Sjabrir : Politik dan Pengasingan di Indonesia*, halaman 654.

Soemarsono

Amir merupakan seorang tokoh pergerakan bersama-sama dengan Sukarno, Hatta, Sjahrir yang sering menyampaikan pidato-pidato radikal.

Disarikan dari: Hersri Setiawan, *Negara Madiun?: Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*.

Ben Anderson

Amir merupakan sosok yang memiliki kesombongan akan intelektualitas dan kapasitas yang dimilikinya. Kesombongan tersebut dinyatakan dengan menganggap remeh orang lain. Namun, Amir secara jelas memiliki haluan politik yang kuat. Sosok yang memaksakan ideologi partainya (Partai Sosialis) kepada tentara melalui Pendidikan Politik dan berusaha menghapus segala unsur Jepang pada diri tentara masa itu.

Wardaya, *Mencari Demokrasi*, halaman 26.

Rosihan Anwar

Dalam bukunya Rosihan Anwar mengatakan, “*Di mata saya sebagai seorang wartawan muda berusia 20-an di zaman revolusi, Bung Amir adalah seorang nasionalis dan idealis, tetapi bersamaan juga tragis*”.

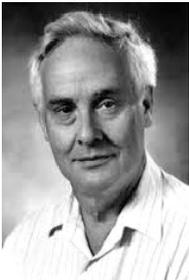
Pertemuan pertama Rosihan dan Amir terjadi pada pertengahan 1942 dalam kegiatan Barisan Pemuda Asia Raya (BPAR) di sebuah gedung di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Pertemuan kedua, terjadi di Stasiun Gambir ketika Rosihan menunggu kedatangan Amir ketika baru dikeluarkan dari penjara. Rosihan Anwar memiliki kesan mendalam terhadap penguasaan Amir terhadap fakta-fakta sejarah dan kefasihannya berbahasa Inggris. Nasib tragis yang menimpa Amir menimbulkan satu pertanyaan dalam dirinya apakah Amir benar seorang komunis. Pertanyaan tersebut disampaikan kepada Sjahrir dan jawabannya adalah tidak.

Disarikan dari: Rosihan Anwar, *Sejarah Kecil: Petite Historie Indonesia*, halaman 103-112.

Adrian Vickers

Penulis sejarah modern Indonesia ini menyatakan bahwa Amir Sjarifoeddin sebagai sosok intelektual yang beruntung memiliki kekayaan dari keluarganya sehingga dapat menikmati pendidikan elit di Belanda.

Adrian Vickers, Sejarah Modern Indonesia, halaman 133.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achdian, Andi 1996, *Tentang kolonialisme: Multatuli dan pemikirannya*, Driyarkara Tahun XXI No.3, Seksi Publikasi Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.
- Abdurrahman, Moeslim 2007, *Krisis sosial, krisis politik, krisis bangsa majemuk: Beberapa Catatan reflektif*, Impulse, Yogyakarta.
- Adra'i, Kadjat 2010, *Percintaan Bung Karno dengan anak SMA*, Komunitas Bambu, Jakarta.
- Agung, Ide Anak Agung Gde 191, *Renville*, trans. Hanny Runkat & M.Th. Sijabat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Aksp, Z (ed) 1984, *Individu dan pemikiran politik di negara sedang berkembang*, Bina Karier, Yogyakarta.
- Anderson, Benedict 1988, *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan perlawanan di Jawa 1944-1946*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Anderson, Benedict 2001, *Imagined Community*, trans. Omi Intan Naomi, Insist & Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anderson, Benedict 2000, *Kuasa Kata : Jelajah budaya-budaya politik di Indonesia*, trans. Revianto Budi Santosa, Matabangsa, Yogyakarta.
- Antara 1948, *Renvilee Principles: Pengumuman dan persetudjuan-persetudjuan*, Kantor Berita Antara, Jakarta.
- Anwar, Rosihan 1977, *Kisah-kisah Jakarta setelah proklamasi*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Anwar, Rosihan 2009, *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*

- Jilid II-III*, Buku Kompas, Jakarta.
- Anwar, Rosihan(ed.) 1980, *Mengenang Sjahrir*, Gramedia, Jakarta.
- Aritonang, Jan S. 2005, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Armada, Wina 1993, *Menggugat Kebebasan Pers*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Audi, Robert 2002, *Agama dan nalar sekuler dalam masyarakat liberal*, trans. Yusdani & Aden Wijdan, UII Press, Yogyakarta.
- Baghi, Felix(ed.) 2009, *Kewarga negaraan demokratis: Dalam sorotan filsafat politik*, trans. Yosef Maria Florisan & Alex Armanjaya, Maumere, Ledalero.
- Bambang, Sulistyono 1995, *Pemogokan buruh: Sebuah kajian sejarah*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Budi, Santoso A. 1994, *Politik penguasa dan siasat pemoeda: nasionalisme dan pendudukan Jepang di Indonesia*, seri siasat kebudayaan 04 Kanisius&LSR., Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Carr, E.H. 1950, *Nasionalisme dalam politik internasional*, trans. Markum, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chilcote, Ronald H. 1999, *Pembebasan nasional menentang imperialisme: Teori dan praktek revolusioner Amilcar Cablar*, Sahe Study & Yayasan HAK, Jakarta.
- Creswell, Jhon W. 199x8, *Qualitatif Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Traditions*, Sage Publication Inc., London.
- Crick, Bernard 2001, *Sosialisme*, Pustaka Promethea, Surabaya.
- Dahlan, Muhidin(ed) 2000, *Sosialisme religius suatu jalan*

- keempat*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln(eds) 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication Inc., London.
- Drooglever, P.J(ed.) 1992, *Menelusuri jalur Linggarjati: Diplomasi dalam perspektif sejarah.*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Ebenstein, William 2006, *Isme-isme yang mengguncang dunia*, Narasi, Yogyakarta.
- Fathorrohman, Deden & Wawan 2002, *Pengantar Ilmu Politik*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Gatut, Saksono Ign. 2009, *Neoliberalisme vs Sosialisme: Membangkitkan semangat ekonomi kerakyatan*, seri pustaka kuntara I, Forkoma PMKRI, Yogyakarta.
- Gie, Soe Hok 1997, *Orang-orang di persimpangan jalan kiri*, Bentang, Yogyakarta.
- Giebels, Lambert 2001, *Soekarno: Biografi 1901-1950*, Grasindo, Jakarta.
- Grant, Ted & Woods, Alan 2001, *Melawan imperialisme*, seri pembinaan pengajaran sejarah nomor 5, Sumbu, Yogyakarta.
- Gunawan, Restu 2005, *Muhammad Yamin dan cita-cita persatuan Indonesia*, Ombak, Jakarta.
- Hanifah, Abu 1977, *Revolusi memakan anak sendiri: Tragedi Amir Sjarifuddin*, Prisma Nomor 8 Tahun VI, LP3ES, Jakarta.
- Hanifah, Abu t.thn, *Perang, damai dan kolonialisme*, Fasco, Jakarta.
- Hartoko, Hani R. 1996, *Bayangan fasisme perspektif Sjahrir*, Driyarkara Tahun XXI No.3, Seksi Publikasi Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

- Hatmosuprobo,Suharjo 1977, *Sejarah Nasional Indonesia*, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Hatta, Mohammad 1981, *Mohammad Hatta, Indonesian Patriot: Memoirs*, Gunung Agung, Jakarta.
- Heryanto, Ariel(ed.) 1994, *Pers: hukum dan kekuasaan*, Bentang, Yogyakarta.
- Heywood, Andrew 1997, *Politics*, Macmillan Press, London.
- Hobsbawm ,E.J. 1992, *Nasionalisme menjelang Abad XXI*, PT.Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Howard, Rhoda E. & Jack Donelly 2006, 'Liberalisme dan hak-hak asasi manusia: Sebuah pertautan yang niscaya', dalam *Hak-hak asasi manusia: Aneka suara & pandangan: Jilid II*, ed. Frans Ceunfin, Maumere, Ledalero.
- Huntington, Samuel 2003, *Prajurit dan negara: Teori politik hubungan militer-sipil*, trans. Deasy Sinaga, Grasindo, Jakarta.
- Ingelson, John 1983, *Jalan Ke Pengasingan*, LP3ES, Jakarta.
- Johnson, John 2001, *Peran Media Bebas*, Demokrasi, Amerika Serikat.
- Junus, Umar 1969, *Sedjarah dan perkembangan kearah bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia*, Bhratara, Jakarta.
- Kahin, George McTurhan 1995, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Cornell University Press.
- Katubi 2008, *Bahasa dan nasionalisme di Indonesia: Kajian Politik Bahasa*, Masyarakat Indonesia Nomor 2 Edisi XXXIV, LIPI, Jakarta.
- Kolarz, Walter 1994, *Komunisme dan kolonialisme*, trans. M. Habib Mustopo & Arief Hertanto, Usaha Nasional, Surabaya.

- Kymlicka, Will 2002, *Kewargaan multikultural: Teori liberal mengenai hak-hak minoritas*, trans. Edlina H. Eddin, LP3ES, Jakarta.
- Laclau, Ernesto & Mouffe Chantal 2008, *Hegemoni dan strategi sosialis: Pos marxisme dan Gerakan sosial baru*, trans. Eko Prasetyo Darmawan, Resist Book, Yogyakarta.
- Lapian, A.B. 1985, *Gerakan Kristen Revolusioner sampai 1942*, Prisma 11 Tahun XIV, LP3ES, Jakarta.
- Leclerc, J. 1982, *Amir Sjarifuddin 75 Tahun*, Prisma Nomor 12 Desember 1982, LP3ES, Jakarta.
- Leclerc, J. 1993, *Amir Sjarifudin : Antara Negara dan Revolusi*, trans. Hersri Setiawan, Jaringan Kerja Budaya, Jakarta.
- Magnis, Franz Suseno 1999, *Pemikiran Karl Marx : Dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Makmur, Djohan 1993, *Sejarah pendidikan di Indonesia zaman penjajahan*, Depdikbud., Jakarta.
- Mangunwijaya, Y.B. 1977, *Dilema Sutan Sjahrir: Antara pemikir dan politikus*, Prisma Nomor 8 Tahun VI, LP3ES, Jakarta.
- McVey, Ruth T. 1968, *The rise of Indonesian communism*, Cornell University Press, Ithaca.
- Mewengkang, Jusuf 1988, *Digulisme dan perlawanan terhadap kolonialisme*, Prisma Nomor 7 Tahun XVII, LP3ES, Jakarta.
- Moetijar, S. 1946, *Soesana Politika semendjak Indonesia merdeka, 17 Agoestoes-31 Desember 1945*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Moleong, Lexi J. 2006, *Metodologi penelitian kualitatif*,

- Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mrazek, Rudolf 1996, *Sjabrir: Politik dan pengasingan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nagazumi, Akira 1989, *Bangkitnya nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*, Grafiti, Jakarta.
- Nalean, Ruben & Iskandar Gani 1990, *Dr. A.K. Gani: Pejuang berwawasan sipil dan militer*, Yayasan Indonesianologi, Jakarta.
- Nanawi, Hadari 2007, *Metode penelitian bidang sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nasution, A.H. 1977, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 3: Diplomasi sambil bertempur*-Jilid 4: Linggajati-Jilid 5: Agresi militer Belanda I, Jilid 6: Perang gerilya semesta I, Jilid 7: Renville, Jilid 8: Pemberontakan PKI 1948, Angkasa, Bandung.
- Ngelow, Zakaria 1994, *Kekristenan dan nasionalisme: Perjumpaan umat Kristen Protestan dengan pergerakan nasional Indonesia 1900-1950*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Onghokham 1980, *Kedudukan politik kaum militer dalam sejarah*, Prisma Nomor 12 Tahun IX, LP3ES, Jakarta.
- Pamungkas, Sigit 2001, *Pemikiran Politik H.O.S. Tjokroaminoto : Agama dan sosialisme*, Perpustakaan Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Parekh, Bikhu 2008, *Rethinking multiculturalism: Keberagaman budaya dan teori politik*, trans. C.B. Bambang Kukuh Adi, Kanisius & Impulse, Yogyakarta.
- Poeze, Harry 2011, *Madiun 1948 : PKI bergerak*, trans. Hersri Setiawan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Pontoh, Coed Husain(ed.) 2005, *Gerakan massa*

- menghadang imperialisme global*, seri pustaka I, Resist Book, Yogyakarta.
- Prasetyo, Eko(ed.) 1996, *Nasionalisme: Refleksi kritis kaum ilmuwan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Purcell, Hugh 2003, *Fasisme*, Insist, Yogyakarta.
- Reid, Anthony 1996, *Revolusi nasional Indonesia*, trans. Pericles G. Katoppo, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ricklefs, M.c. 2005, *Sejarah Indonesia modern 1200-2004*, trans. Satrio Wahano dkk., Serambi, Jakarta.
- Sabine, George H.1981, *Teori-teori politik : Sejarah pertumbuhan dan perkembangannya*, Binacipta, Bandung.
- Santoso Listiyono(ed.) 2007, *Epistemologi kiri*, seri pemikiran tokoh, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Setiawan 2002, *Negara Madiun?: Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*, Forum Studi Peradaban dan Perubahan.
- Shiraishi, Takashi 1997, *Zaman bergerak: Radikalisme rakyat di Jawa 1912-1926*, trans. Hilmar Farid, Pustaka Utama Garfity, Jakarta.
- Simatupang, T.B. 1967, *Tugas Kristen dalam revolusi*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Simatupang, T.B. 1987, 'Komunisme dipandang dari sudut agama Kristen Protestan' dalam *Dari revolusi ke pembangunan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Sindhunata 2000, 'Politik kebangsaan dalam keadilan sosial' dalam *Indonesia Abad XXI* ed. Ninok Leksono , Kompas, Jakarta.
- Slametmuljana 1959, *Politik bahasa nasional*, Pidato pada inagurasi UI 16 Mei 1959, Jakarta.
- Soebagijo, I.N. 1976, *Sebelas perintis pers Indonesia*,

- Djambatan, Jakarta.
- Soedarmanta, J.B.1992, *Jejak-jejak pahlawan perekat kesatuan bangsa Indonesia*, Grasindo, Jakarta melalui books.google.co.id, diakses pada 31 April 2012.
- Soedjono, Imam 2006, *Yang berlawanan : Membongkar tabir pemalsuan sejarah PKI*, Resist Book, Yogyakarta.
- Soekarno 1964, *Dibawah bendera revolusi*, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Suhelmi, Ahmad 2001, *Pemikiran politik barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunaryo 2004, 'Rasisme dalam hasrat kolonialisme: Sebuah studi pascakolonial', dalam *Hermeneutika pascakolonial* ed. Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, Kanisius, Yogyakarta.
- Suryadinata, Leo 1984, *Dilema minoritas Tionghoa*, Grafitipers, Jakarta.
- Suryadinata, Leo 1986, *Politik Tionghoa peranakan di Jawa 1917-1942*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Suryadinata, Leo 2002, *Pemikiran politik etnis Tionghoa*, LP3ES, Jakarta.
- Suyono 2005, *Seks dan kekerasan pada zaman kolonial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syam, Agus Riadi 2003, *Kritik Sutan Syahrir terhadap fasisme*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Tantri, Ktut 1961, *Revolusi di Nusa damai*, Gunung Agung, Jakarta.
- Thomson, David(ed.) 1986, *Pemikiran politik*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta .
- Toer, Pamoedya Ananta, Koesalah & Ediati Kamil 2003, *Kronik revolusi Indonesia Jilid II (1946)-Jilid III (1947)-Jilid IV (1948)*, Kepustakaan Populer

- Gramedia, Jakarta.
- Tondowidjojo 1987, *Peran media massa dalam pendidikan modern*, seri pustaka komunikasi 2 Sanggar Bina Tama, Surabaya.
- Townshend, Jules 2003, *Politik Marxisme*, trans. Ferdinand M. Fuad, Jendela, Yogyakarta.
- Trimurti, S.K. 1980, *Hubungan pergerakan buruh Indonesian dengan pergerakan kemerdekaan nasional*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Van Klinken, Gerry 2010, *5 Penggerak bangsa yang terlupa : Nasionalisme minoritas Kristen*, Lkis, Yogyakarta.
- Verkuyl, J 1966, *Indjil dan komunisme di Asia Afrika*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta.
- Vickers, Adrian 2011, *Sejarah Indonesia modern*, trans. Arif Maftuhin, Insan Madani, Yogyakarta.
- Wardaya, F.X. Baskara T. (ed.) 1999, *Mencari demokrasi*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta.
- Wardaya, F.X. Baskara T. (ed.) 2003, *Marx muda: Marxisme berwajah manusiawi*, Seri Pustaka Sindhunata 0915, Buku Baik, Yogyakarta.
- Weber, Max 2000, *Etika Protestan dan semangat kapitalisme*, Pustaka Prometheus, Surabaya.
- Wertheim, Wim F. 2008, *Jalan sosialisme dunia ketiga: Negara protektif versus pasar agresif*, trans. Oei Hay Djoen, Seri Pustaka I. Wibowo 103, ISAI & Pusat dan Analisa Tempo, Jakarta.
- Widjayakusuma, A.L. 1961, *Sedjarah pemuda dan sosialisme Indonsia*, Grip, Surabaya.
- Wilson 1994, *Kaum pergerakan di Hindia Belanda 1930-an: Reaksi terhadap fasisme*, Prisma Nomor 10 Tahun XXIII, LP3ES, Jakarta.

- Yasni ,Z (ed.) 1978, *Bung Hatta menjawab*, Gunung Agung, Jakarta.
- Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta 1978, *Bunga rampai Soempah Pemoeda*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Zulkifli, Arif(ed.) 2010, *Hatta: Jejak yang melampaui zaman; Sjabrir: Peran besar Bung kecil; Soekarno: Paradoks revolusi Indonesia; Tan Malaka: Bapak Republik yang dilupakan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Sumber Internet

- Aman, Mpd. 2008, *Sejarah Tata Negara : Sebuah konsepsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, melalui <http://www.scribd.com/doc/72526724/17/BAB-IV-NASIONALISME-INDONESIA-DALAM-PERKEMBANGAN-TATA-NEGARA-INDONESIA>, dilihat pada 10 April 2012.
- Anom, Erman, *Kebijakan dan sistem media era Soekarno*, Aceh International Conference 2011, dilihat melalui acehpublication.com pada 20 Desember 2012.
- Darmayana, Hiski, *Amir Sjarifuddin nasionalis dari tanah Batak yang terlupakan*, Edisi Senin, 23 Mei 2011, melalui <http://www.berdikarionline.com/tokoh/pemikiran-tokoh/20110523/amir-sjarifudin-harahap-nasionalis-dari-tanah-batak-yang-terlupakan.html>, dilihat pada 16 Desember 2012.
- Dewi, Ita Mutiara 2008, *Nasionalisme dan kebangkitan dalam teropong*, Mozaik, Vol.3 Nomor 3 melalui staff.uny.ac.id/.../NASIONALISME%20DAN%20

KEBANGKITAN, dilihat pada 5 Mei 2012.

Desyana, Cornilla, Amir Sjarifoeddin sang penentu Kongres Pemuda II, Edisi Minggu, 28 Oktober 2012, pukul 11: 12 WIB, melalui <http://www.tempo.co/read/news/2012/10/28/078438164/Amir-Sjarifoeddin-Sang-Penentu-Kongres-Pemuda-II>, dilihat pada 5 Desember 2012.

Desyana, Cornilla, Amir, dari bendahara Kongres Pemuda jadi wazir, Edisi Minggu, 28 Oktober 2012 pukul 11: 28 WIB, melalui <http://www2.tempo.co/read/news/2012/10/28/078438167/Amir-Dari-Bendahara-Kongres-Pemuda-Menjadi-Wazir>, dilihat pada 5 Desember 2012.

Ensiklopedia Jakarta, Hendricus Sneevliet, melalui jakarta.go.id/jaku1/encyclopedia/detail/876, dilihat pada 10 Desember 2012.

Ensiklopedia Jakarta, Kabinet Amir Syarifuddin, melalui <http://www.jakarta.go.id>, dilihat pada 12 Desember 2012.

Ensiklopedia Jakarta, Partai Indonesia, melalui jakarta.go.id/jaku1/encyclopedia/detail/2185, dilihat pada 14 Desember 2012.

Sekretariat Kabinet, Kabinet Amir Sjarifuddin 1, melalui <http://www.setkab.go.id/profil-kabinet-18-kabinet-amir-sjarifuddin-i.html>, dilihat pada 9 Desember 2012.

Kaskus, Amir Syarifuddin : Perdana Menteri yang dibunuh bangsa sendiri, <http://www.kaskus.us/showthread.php?p=654412908>, diakses pada 27 Maret 2012.

Kasenda, Peter, Amir Syarifuddin di persimpangan jalan, melalui <http://www.scribd.com/doc/40116021/Amir->

- Syarifuddin-Di-Persimpangan-Jalan, dilihat pada 15 Desember 2012.
- Lumbangaol, Jonathan Hotman, *Amir Syarifuddin Harahap Perdana Menteri RI Yang dilupakan*, Edisi 15 Desember 2008, 16:55:34 WIB, melalui <http://www.kabarindonesia.com>, dilihat pada 15 Desember 2012.
- Paulus Halim, Humala 2011, *Implementasi kebangsaan kaum muda berbasis etos kewirausahaan*, melalui <http://kem.ami.or.id/2012/01/implementasi-kebangsaan-kaum-muda-berbasis-etos-kewirausahaan/>, dilihat pada 2 April 2012.
- Sartono Kartodirjo dalam *Pembangunan bangsa tentang nasionalisme, kesadaran dan kebudayaan Nasional* (Yogyakarta :Aditya Media, 1993) melalui staff.undip.ac.id/sastra/.../files/.../nasionalisme-karakter-bangsa.doc,dilihat pada 31 April 2012.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Membangun semangat nasionalisme dengan bingkai kearifan lokal rakyat Aceh-Tinjauan ketahanan pangan* (Musataf Abubakar, DirekturUtamaPerumBulog) melalui http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2797, dilihat pada 5 Mei 2012.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Nasionalisme, etnistitas, dan agama di Indonesia :Tantangan globalisasi* (Azyumardi Azra ,Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat) melalui http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2255, dilihat pada 5 mei 2012.
- Sulistyo, Bambang,tanpa tahun, *Agama dan nasionalisme : Masyarakat Timur Tengah hingga Indonesia sebuah*

tinjauan dari perspektif sosial,

Universitas Hasanuddin, <http://unismuh.ac.id/files/Sulistyo.pdf>, dilihat pada 26 April 2012.

Widjojo, Muridan (tanpa tahun), Nasionalisme etnisitas, melalui elib.pdi.lipi.go.id/katalog/index.php searchkatalog/.../8777.pdf, dilihat pada 15 Mei 2012.

Indeks

A

- Abbas 25
- Agresi Militer I 84, 87
- antikolonialisme 71
- Anwar xvii, 51, 65, 143, 145, 146

B

- Babeuf 73
- Baginda Soripada Harahap 2
- Banteng Partindo 10
- Beel 54, 55
- Belanda vi, xv, xix, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 77, 78, 79, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 109, 110, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 143, 150, 153

- Boedi Oetomo (BO) 27
- Boven Digul 12

C

- Central Sjarikat Islam xiii, 27
- Charles van der Plas 40
- Christen Studenten Vereeniging op Java (CSV op Java) 14

D

- de Mirabeau 4, 5
- demokrasi iv
- Demokrasi iv, vii, xiii, 49, 60, 84, 99, 110, 113, 116, 142, 148
- demokrat 78, 110
- Departemen Economische Zaken 12
- de Saint-Simon 73
- Dimitrov 30
- Djaenah Harahap 9
- Djamin 2
- Djojopratiknjo 51

E

Engels 32, 72
Ephraim 2
Europese Lagere School (ELS)
3
Evatt xxi, 55

F

feodalisme 123, 132, 133
Fourier 73
Frans 14, 72, 73, 74, 148
Front Demokrasi Rakyat
(FDR) 60

G

Gani 24, 33, 35, 53, 118, 136,
150
garis van Mook 55
gendarmerie 117, 125, 126
Generasi 28 33
Gerakan Mahasiswa Kristen
Indonesia (GMKI) 8
Gerakan Pendidikan 40
Graham 59, 100
Gymnasium Harleem xxi, 8,
80
Gymnasium Leiden 94, 95

H

Hamonangan 3
Hanifah xvi, 18, 19, 24, 25,
31, 32, 48, 65, 77, 78,
95, 136, 140, 141, 147
Hasjim 48
Hatta vii, xvi, 6, 16, 18, 35,
43, 45, 46, 47, 48, 59,
61, 63, 65, 68, 95, 102,
136, 141, 142, 148, 154
Havelaar 32

Hendromartono 48
Hian 116
Hindia-Belanda 3, 11
Holst 6

I

Idenburg 12, 13
Ien 58
imagined community 70
imperialisme x, 41, 71, 74, 75,
95, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 122, 126,
131, 138, 139, 146,
147, 151
Indische Sociaal-Democ-
ratische Vereeniging
(ISDV) 27
Indische Partij 26
Indonesia Muda 11
Insulinde 27
Ius Soli 87

K

kapitalisme 32, 74, 139, 153
Kartawidjaja 58
Kartawiguna 11
Katekismus 8
Kolopaking 48
Komisi Jasa Baik 57
Komisi Tiga Negara xiii, 57
Komunisme 32, 72, 73, 148,
151
Konferensi Nederlands-In-
dische Zendings Bond
(NIZB) 81
Kongres Koreksi Serikat Bu-
ruh 121, 131
Kongres Pemuda 41, 155

Kristen vii, viii, x, xiii, xxi, 1,
2, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15,
16, 17, 24, 32, 65, 69,
74, 79, 80, 81, 82, 111,
122, 132, 141, 146,
149, 150, 151, 153

L

Lansbury 74
Leimena 14, 118
Liberalisme 75, 148

M

Madiun vii, xvi, 16, 24, 34,
46, 63, 64, 65, 69, 76,
78, 102, 135, 142, 150,
151
Malaka 29, 30, 36, 46, 49, 95,
96, 154
Malik 48, 114
Mangoenkarso 48
Mangoenkoesoemo 87
Ma'roef 51
Marx 6, 31, 32, 72, 73, 74,
149, 153
Marxisme 32, 70, 72, 73, 153
Masjumi 43, 53, 54, 59, 60,
61, 96
Medan 2, 3, 7
Moekti 51
Moestopo 51
Monang 2
multikulturalisme 76, 139
Musso xvi, 29, 30, 31, 60, 62,
63, 64, 65, 68, 69, 103,
104, 140

N

Nainggolan 14
Nasionalisme vii, ix, xvi, 1,
2, 14, 24, 35, 70, 71,
75, 76, 80, 84, 92, 111,
114, 115, 135, 137,
146, 148, 151, 153,
154, 156, 157
nasionalisme liberal 75
nasionalisme sosial 137
nasionalis revolusioner 78
nasionalis sosialis radikal 78
Netherlands East Indies (NEI)
40
Netherlands-Indies Civil Ad-
ministration (NICA) 96

O

Owen 74

P

Pane 35, 87, 116
Partai Buruh 43, 53, 61
Partai Gerakan Rakyat Indone-
sia (Gerindo) 11
Partai Indonesia (Partindo) 34
Partai Katolik Rakyat Indone-
sia 80
Partai Kristen 15, 17, 81, 82
Partai Nasional Indonesia xiv,
53, 87
partai politik iv
Partai Rakyat Sosialis (Paras)
40
Partai Sjarikat Islam Indonesia
(PSII) 54
Partai Sosialis xiii, xv, xix,
40, 41, 42, 43, 44, 48,
53, 61, 68, 110, 111,

121, 131, 142
 Partai Sosialis Indonesia
 (Parsi) 40
 Pembela Tanah Air (PETA)
 50
 Pemberontakan Madiun 1948
 24
 Pemuda Sosialis Indonesia
 xiii, 41
 Pendidikan Politik Tentara 51
 Perhimpoean Peladjar-Pelad-
 jar Indonesia xiv, 25
 Perjanjian Linggarjati 52, 60,
 96, 97, 104
 Perjanjian Renville 43, 58, 59,
 60, 61, 99, 102, 104,
 105, 140
 Perkoempoelan Hindia (Indies
 Association) 6
 Persatuan Islam 80
 Persatuan Kaum Kristen 15
 Perundingan Renville 99
 Pijper 111
 Pindor 25
 Prawiranegara 48

R

Revolusi Eropa 1848 27
 Revolusi Perancis 4, 5, 25, 27,
 73, 114, 115
 Robespierre 5

S

Salim 58
 Sastradireja 11
 Sastroamidjojo xvii, 58, 142
 Satrotomo 48
 Scheiber 2

Schepper 8, 13, 14, 24
 Semaoen 27, 28, 30
 Sentral Organisasi Buruh Selu-
 ruh Indonesia (SOBSI)
 61
 Sibolga 2
 Simatupang 32, 36, 65, 151
 Sipirok 2
 Siregar 2
 Siwabessey 14
 Sjahrir xvii, 30, 40, 41, 42,
 43, 44, 46, 47, 48, 49,
 50, 51, 52, 53, 58, 60,
 61, 65, 68, 95, 96, 104,
 141, 142, 143, 146,
 147, 149, 150, 154
 Sjarifoeddin i, iii, iv, vi, vii,
 viii, xvi, xix, xxi, 8, 48,
 140, 143, 155
 Sneevliet 28, 155
 Soedarsono 48
 Soedirman 50
 Soedjono 11, 25, 28, 29, 30,
 41, 42, 152
 Soegondo 53
 Soemarsono xvii, 16, 17, 18,
 46, 51, 142, 151
 Soenarjo 51
 Soepadiono 11
 Soepeno 48
 Soerjaningrat 26
 Soewandi 48
 Sosialisme 73, 108, 110, 146,
 147
 Sualoon 2
 Sumpah Pemuda 1928 33
 Sutan Gunung Tua 2

T

Tajaloedin 48
Tambunan 14
Tam Lin Djie 48
Tampubolon 4, 8
Tapanuli 2, 3, 4, 7
Tentara Keamanan Rakyat
50, 52
Theosophical Society 6
The Social Gospel 122, 132
Tjokroadisoerjo 58
Tjokroaminoto 51, 74, 150
Tudung Sutan Gunung Mulia
3, 7

V

Vereeniging voor Spoor-en
Tramwegpersonel xiv,
27

Y

Yamin 10, 11, 18, 24, 33, 35,
36, 49, 87, 136, 147

Z

Zaman Reactie/Partij 27

Biodata Pengarang



Yema Siska Purba, lahir 15 Februari 1991 di Sidamanik, Sumatera Utara. Selama menempuh pendidikan SD-SMA, dia sangat sering mengikuti kegiatan seni menyanyi dan menari, tetapi kemudian justru terjerumus di jurusan Politik dan Pemerintahan UGM. Pernah menjabat sebagai Menteri Kajian dan Riset (2011) di Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan. Sepanjang masa pendidikannya sangat menyukai

cerita-cerita sejarah—terutama perihal Gestok dan masa kemerdekaan Indonesia—yang kemudian membawanya pada penelitian tentang sejarah. Sekarang bekerja sebagai *asisten project* di *Research Centre for Politics and Government*. Yema dapat dikontak melalui ysiskap@gmail.com.

